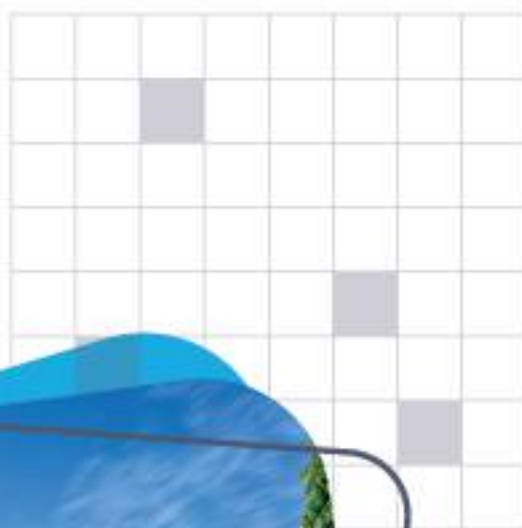
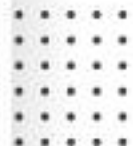




KOMDIGI

Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital



LAPORAN KINERJA

LAKIN

BALMON MATARAM

2024



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram Tahun 2024 ini disusun untuk melengkapi Laporan Kinerja Direktorat Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah pusat kepada masyarakat. Laporan Kinerja ini juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan lebih transparan dalam menyajikan program kerja.

Laporan ini disusun sebagai dokumen pendukung.

Laporan ini berisikan laporan capaian kinerja yang mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram Tahun 2024 yang telah disepakati antara Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tabel Capaian Kinerja
Balmon SFR Kelas II Mataram

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	ANGGARAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
Meningkatnya pelayanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	1.	Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	100 %	100 %	100 %
	2.	Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100 %	100 %	100 %
	3.	Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	100 %	100 %	100 %
	4.	Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	93 %	100 %	107.53%
	5.	Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	95 %	100 %	105.26 %
	6.	Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100 %	228 %	228 %
	7.	Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL	100 %	100 %	100 %
	8.	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100 %	140 %	140 %
	9.	Persentase (%) Sosialisasi/Bimbingan Teknis SRC/LRC	100 %	200 %	200 %
	10.	Persentase (%) ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN	100 %	194 %	194 %
	11.	Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	1.	Nilai kinerja Anggaran Balai Monitor SFR kelas II Mataram Tahun 2024	91 %	91.4 %	101.03 %
	2.	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	98 %	100 %	102.4 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram memiliki 2 sasaran kegiatan, yaitu Meningkatkan Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien. Sasaran kegiatan ini merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan untuk satu tahun perencanaan. Ringkasan pencapaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram diuraikan dalam bab ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada Bab III.



→ SASARAN 1

"Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi"

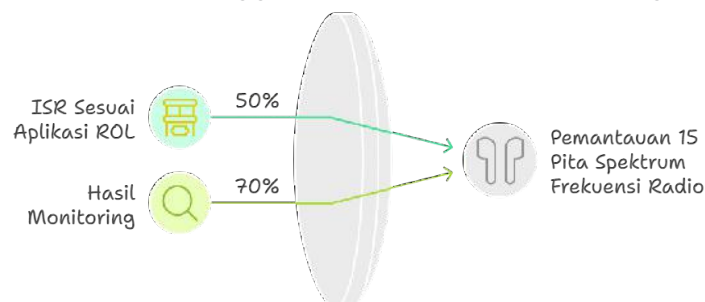
terdapat 11 Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

1. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

Pada tahun 2024, salah satu indikator kinerja yang ditetapkan untuk Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram adalah Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota. Target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah 100% dari total cakupan monitoring. Untuk mencapai target ini, pembagian bobot monitoring dilakukan dengan proporsi 70% untuk monitoring per kabupaten/kota dan 30% untuk monitoring rutin pita frekuensi marabahaya menggunakan perangkat SMFR (Stasiun Monitoring Frekuensi Radio) tetap/transportable.

Untuk mencapai target 100%, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram harus melaksanakan dua hal utama sebagai berikut:

- Monitoring di Kabupaten/Kota: Monitoring dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram. Target kinerja ini telah tercapai dengan dilakukan monitoring di 10 kabupaten/kota, yang berarti tercapai 100%. Monitoring di kabupaten/kota dianggap berhasil jika memenuhi tiga kriteria berikut:



- Monitoring Rutin Pita Frekuensi Marabahaya pada SMFR Tetap/Transportable: Monitoring ini ditargetkan dilakukan selama 240 hari kerja dalam setahun, atau minimal 14 kali di 6 lokasi site SMFR tetap/transportable setiap bulannya. Monitoring ini mencakup pengawasan dan identifikasi terhadap lima pita frekuensi marabahaya yang telah ditentukan. Target kinerja ini juga telah tercapai dengan 240 hari kerja monitoring yang telah dilaksanakan sepanjang tahun atau tercapai 100%.

Berdasarkan pencapaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja persentase (%) monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kabupaten/Kota telah tercapai 100%, sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Dengan melakukan monitoring di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerja, serta memanfaatkan perangkat SMFR yang ada, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan, baik dalam hal cakupan monitoring di Kabupaten/Kota maupun dalam monitoring rutin pita frekuensi marabahaya. Secara keseluruhan, indikator kinerja tersebut telah tercapai 100%.

2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

Indikator kinerja Persentase (%) pemeriksaan stasiun radio memiliki target 100% pada Tahun 2024. Untuk mencapai target ini, pembagian bobot pemeriksaan stasiun radio dilakukan dengan proporsi 80% untuk pemeriksaan stasiun radio dan 20% untuk monitoring alat/perangkat telekomunikasi.

Untuk mencapai target 100%, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram harus melakukan dua hal utama:

- a. Pemeriksaan stasiun radio: meliputi kegiatan inspeksi data ISR microwave Link secara remote site dengan jumlah 1.255 data sampling, inspeksi data ISR microwave Link secara open shelter dengan jumlah 323 data sampling, pengukuran parameter teknis pemancar stasiun radio siaran FM dengan jumlah 47 ISR, pengukuran parameter teknis Televisi Digital Terrestrial dengan jumlah 14 ISR.
- b. Monitoring perangkat telekomunikasi dengan target 8 (delapan) kali yang dilakukan terhadap setidaknya 3 jenis perangkat prioritas yang ditetapkan Direktorat Pengendalian SDPPI.

Untuk mencapai target 100%, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram harus melakukan dua hal utama

- a. Pemeriksaan stasiun radio meliputi :
 1. Pemeriksaan remote site : Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram telah melakukan inspeksi data ISR secara remote site terhadap stasiun radio microwave link sebanyak 1.255 ISR atau tercapai 100%
 2. Pemeriksaan Open Shelter : Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram telah melakukan inspeksi data ISR secara open shelter terhadap stasiun radio microwave link sebanyak 323 ISR atau tercapai 100%
 3. Pengukuran Stasiun Siaran : Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram telah melakukan pengukuran parameter teknis radio siaran FM di Provinsi NTB sejumlah 47 ISR atau tercapai 100% dan telah melakukan pengukuran parameter teknis TV digital sejumlah 14 ISR atau tercapai 100%
- b. Dari total capaian ketiga kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemeriksaan stasiun radio tercapai 100% dengan pembobotan 80%
Monitoring perangkat telekomunikasi terlaksana 12 (dua belas) kali kegiatan dari target 8 (delapan) kali kegiatan atau tercapai 100% dengan pembobotan 20%.

Berdasarkan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio telah tercapai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan baik, baik dari segi cakupan pemeriksaan stasiun radio maupun monitoring perangkat telekomunikasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja tersebut telah tercapai 100%.



3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi

Indikator persentase penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada Tahun 2024 ditargetkan 100% yang artinya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram harus melaksanakan tindak lanjut aduan gangguan frekuensi radio 100% dari jumlah aduan yang diterima. Tahun 2024 terdapat 7 pengaduan gangguan spektrum frekuensi radio yang diterima dan seluruhnya telah berhasil ditindaklanjuti, sehingga target 100% penanganan gangguan tercapai. Dengan demikian, capaian ini menunjukkan komitmen dan kemampuan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram dalam menjaga kualitas pengelolaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja.

4. Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi

Pada perjanjian kinerja tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram memiliki indikator kinerja penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi dengan target sebesar 93%, yang terdiri dari dua komponen utama:

1. Penertiban frekuensi radio dengan pembobotan 60%. Perhitungan capaian kinerja penertiban frekuensi radio melalui tindak lanjut data ilegal hasil temuan spektrum frekuensi radio (SFR) yang berstatus ilegal selama kegiatan Penertiban Nasional (Tibnas) maupun penertiban skala regional yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi legal atau off air. Selama tahun 2024 jumlah data ilegal yang telah ditindak lanjut menjadi legal/off air pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram sebanyak 212 dari total 212 data ilegal atau tercapai 100% dengan kinerja penertiban frekuensi radio adalah sebesar 60%
2. Penertiban alat/perangkat telekomunikasi dengan pembobotan 40%. Berdasarkan hasil monitoring alat/perangkat telekomunikasi sepanjang Tahun 2024, termonitor 141 alat/perangkat telekomunikasi dengan rincian 98 perangkat bersertifikat dan 43 perangkat tidak bersertifikat. Dari temuan perangkat tidak bersertifikasi tersebut, telah ditindaklanjuti dengan kegiatan penertiban dan pemberian sanksi administrasi berupa surat teguran, surat pernyataan serta penarikan perangkat dari peredaran. Dengan demikian penertiban alat/perangkat telekomunikasi tercapai 100% dengan pembobotan 40%.

Berdasarkan pencapaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Persentase (%) Penertiban Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat telekomunikasi telah terlaksana 100% dari yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja sebesar 93% atau tercapai 107%. Dengan melakukan tindak lanjut data ilegal hasil penertiban frekuensi radio menjadi legal/off air dan melakukan tindak lanjut data ilegal hasil penertiban alat/perangkat telekomunikasi. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram telah berhasil mencapai target yang ditetapkan, baik dari segi cakupan penertiban penertiban alat/perangkat telekomunikasi.



5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi

Indikator kinerja persentase Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio (SMFR) di UPT ditargetkan sebesar 95% yang dihitung dari pemanfaatan perangkat SMFR transportable untuk melakukan monitoring 15 pita frekuensi serta 5 pita frekuensi marabahaya minimal 14 hari dalam 1 bulan.

Selama tahun 2024, Balai Monitor SFR Kelas II Mataram telah memanfaatkan perangkat SMFR minimal 14 hari untuk melakukan monitoring 15 pita frekuensi serta 5 pita frekuensi marabahaya sesuai dengan target indikator kinerja IK1

Berdasarkan pencapaian yang telah diraih, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Persentase Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio (SMFR) di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram pada tahun 2024 telah berhasil dilaksanakan dengan sangat baik. Indikator ini ditargetkan sebesar 95% sesuai dengan perjanjian kinerja (PK) yang telah disepakati, dan capaian yang diperoleh mencapai 100%, yang berarti 105% dari target yang ditetapkan

6. Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koodinasi Pelimpahan ke KPKNL

Indikator kinerja Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koodinasi Pelimpahan ke KPKNL memiliki target 100% pada Tahun 2024.

Untuk mencapai target ini, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram harus melaksanakan dua komponen utama: penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL untuk piutang yang melebihi Rp. 8.000.000,-. Penanganan piutang dilakukan dengan menghubungi debitur, dengan target bulanan yang akan disampaikan oleh Direktorat Operasi Ditjen SDPPI setiap awal bulan.

7. Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koodinasi Pelimpahan ke KPKNL

Indikator kinerja Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koodinasi Pelimpahan ke KPKNL memiliki target 100% pada Tahun 2024.

Untuk mencapai target ini, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram harus melaksanakan dua komponen utama: penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL untuk piutang yang melebihi Rp. 8.000.000,-. Penanganan piutang dilakukan dengan menghubungi debitur, dengan target bulanan yang akan disampaikan oleh Direktorat Operasi Ditjen SDPPI setiap awal bulan.

Sepanjang tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram telah melaksanakan penanganan piutang dengan menghubungi sebanyak 337 waba dari total target 337. Upaya penanganan ini dilakukan melalui berbagai media komunikasi serta kunjungan langsung kepada debitur untuk memastikan penyelesaian piutang yang ada. Dalam hal koordinasi pelimpahan ke KPKNL, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram telah melakukan koordinasi terkait pelimpahan sisa piutang dari tahun sebelumnya yang belum dibayarkan. Dari total tiga piutang yang dikoordinasikan, dua piutang telah berhasil dibayarkan, sementara satu piutang lainnya masih dalam proses koordinasi dengan KPKNL untuk penyelesaian lebih lanjut.



Dengan langkah-langkah yang telah diambil ini, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan, sehingga dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

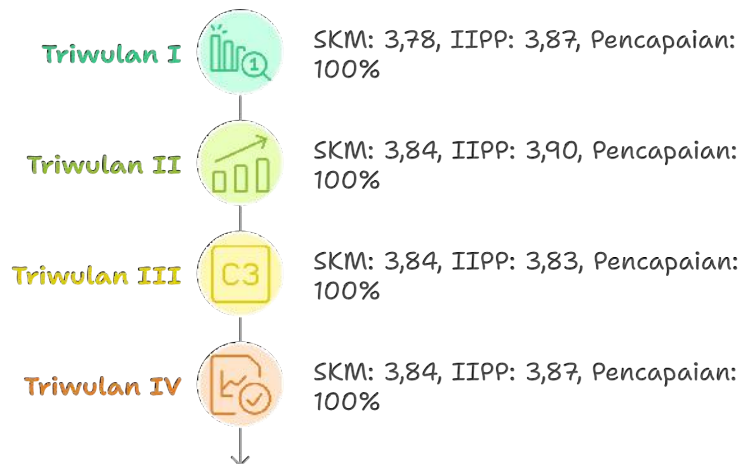
8. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram menetapkan target kinerja sebesar 100% untuk sosialisasi pelayanan publik dan survei kepuasan yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Sosialisasi Pelayanan Publik** dilakukan dengan target minimal mencakup 50% dari wilayah layanan, melibatkan sekurangnya 50 peserta per kegiatan. Sepanjang tahun 2024, Balai Monitor telah berhasil melaksanakan sosialisasi di 9 Kabupaten/Kota dari 10 Kabupaten/Kota dalam wilayah layanan, dengan total peserta mencapai 375 orang.

Kegiatan sosialisasi ini menunjukkan upaya yang efektif dalam memperkenalkan layanan kepada masyarakat serta memastikan bahwa informasi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh warga di wilayah layanan.

- b. **Survei Kepuasan Masyarakat** sebagai bagian dari upaya untuk mengukur efektivitas pelayanan publik dan menjangring masukan dari masyarakat, Balai Monitor melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dengan standar minimal masing-masing sebesar 3,2 (SKM) dan 3,6 (IIPP). Sepanjang tahun 2024, Balai Monitor Mataram telah melaksanakan survei sebanyak empat kali dengan hasil sebagai berikut:



Hasil survei di atas menunjukkan bahwa seluruh hasil survei kepuasan masyarakat telah melebihi standar yang ditetapkan, dengan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi atas pelayanan yang diberikan oleh Balai Monitor. Dengan skor yang konsisten lebih tinggi dari standar yang ditargetkan, hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik terus meningkat dan memenuhi ekspektasi masyarakat.

Berdasarkan uraian capaian kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja untuk persentase (%) sosialisasi pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat telah tercapai dengan sangat baik. Pencapaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan, dengan total capaian yang mencapai 140%.

9. **Persentase (%) Sosialisasi/Bimbingan Teknis SRC/LRC**

Pada tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram menetapkan indikator kinerja dengan target 100% untuk sosialisasi/bimbingan teknis (Bimtek) terkait Short Range Certificate (SRC) serta Long Range Certificate (LRC) dengan jumlah peserta yang ditargetkan sebanyak 50 orang. Sepanjang tahun 2024, Balai Monitor telah berhasil melaksanakan sosialisasi/Bimtek SRC/LRC sebanyak dua kali, dengan total jumlah peserta mencapai 100 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta mengenai SRC dan LRC, sehingga mereka dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam praktik di lapangan. Dengan pencapaian ini, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram telah memenuhi dan bahkan melampaui target yang ditetapkan yaitu tercapai 200%, menunjukkan komitmen tinggi terhadap peningkatan kapasitas dan kompetensi peserta dalam bidang yang relevan.

10. **Persentase (%) ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN**

Pada tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram menetapkan indikator kinerja sebesar 100% untuk persentase Izin Stasiun Radio (ISR) maritim nelayan melalui program MOTS-IKRAN, dengan jumlah target penerbitan ISR Maritim dan IKRAN sebanyak 50 dokumen. Sepanjang tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram berhasil melaksanakan proses penerbitan ISR Maritim dan IKRAN sebanyak 97 dokumen dengan rincian 47 ISR Maritim dan 50 dokumen IKRAN.

Dengan pencapaian ini, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan yaitu tercapai 194%, menunjukkan komitmen dan dedikasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan dukungan terhadap sektor maritim nelayan. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas program serta sinergi antara berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan implementasi program MOTS-IKRAN.

11. **Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR**

Indikator kinerja terkait persentase (%) verifikasi data koordinat site Izin Stasiun Radio (ISR) merupakan salah satu target dalam perjanjian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram untuk tahun 2024. Target yang ditetapkan adalah mencapai 100% dari sampel yang telah disepakati oleh Direktorat Operasi Ditjen SDPPI, yaitu 43,83% dari total 6.386 ISR, atau setara dengan 2.799 ISR. Selain itu, target harus mencakup 50% kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB. Sepanjang tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram telah berhasil melaksanakan verifikasi koordinat untuk 2.799 ISR di 5 kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi NTB atau tercapai 100%. Pencapaian ini menunjukkan komitmen dan dedikasi Balai Monitor dalam meningkatkan akurasi data dan kualitas layanan, serta mendukung pengelolaan spektrum frekuensi radio yang lebih efektif. Dengan keberhasilan ini, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram telah memenuhi target yang ditetapkan, sekaligus berkontribusi terhadap pengembangan telekomunikasi di wilayah NTB.



→ SASARAN II

“ Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien ”

terdiri dari 2 indikator kinerja sebagai berikut:

1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Mataram Tahun 2024

Indikator kinerja yang berkaitan dengan nilai kinerja anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar 91, sejalan dengan capaian kinerja pada periode tahun sebelumnya. Indikator ini mencakup dua aspek utama, yaitu nilai perencanaan anggaran (Smart DJA) dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA pada Omspan), masing-masing dengan bobot 50%.



Dengan pencapaian ini, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram tidak hanya memenuhi target yang ditetapkan, tetapi juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif. Pencapaian ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja organisasi dan mendukung tujuan strategis dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Nilai kualitas pelaporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) merupakan salah satu indikator kinerja yang penting dalam perjanjian kinerja tahun 2024, dengan target yang ditetapkan sebesar 98, sesuai dengan capaian kinerja pada periode tahun sebelumnya. Indikator ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kualitas pelaporan keuangan di tingkat Satuan Kerja (Satker) yang berfungsi sebagai UAKPA.

Pada tahun 2024, nilai kualitas pelaporan keuangan di level UAKPA diukur berdasarkan komponen penilaian yang telah ditetapkan. Formulasi perhitungan indikator penilaian untuk Laporan Keuangan UAKPA dilakukan berdasarkan skala 100, yang kemudian dikurangi dengan faktor pengurang yang ditentukan oleh Biro Keuangan.

Berdasarkan penilaian dari tim penilai Biro Keuangan, kualitas pelaporan keuangan UAKPA Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram untuk periode tahun 2024 berhasil memperoleh nilai sempurna, yaitu 100. Pencapaian ini menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pengelolaan keuangan dan ketepatan dalam penyajian laporan, serta mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan organisasi. Dengan hasil ini, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram tidak hanya memenuhi namun juga melampaui target yang ditetapkan, menegaskan posisi sebagai lembaga yang profesional dan efisien dalam pengelolaan anggaran.



KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan ridho-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada instansi yang lebih tinggi serta masyarakat. Dokumen ini berfungsi sebagai laporan strategis yang mencakup capaian kinerja serta kendala-kendala yang dihadapi, dan selanjutnya dapat dijadikan umpan balik untuk perbaikan di tahun-tahun mendatang. Dengan demikian, LKIP ini diharapkan dapat membantu dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja, serta pelaksanaan pengukuran kinerja yang lebih efektif dimasa yang akan datang. Dokumen ini menyajikan data terpadu yang mengaitkan kinerja anggaran dengan sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan produktivitas instansi. Penyusunan LKIP ini telah dilakukan dengan cermat, tepat, terukur serta melibatkan Sub Bagian Umum, serta seluruh Tim Kerja di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram. Kami percaya bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai manifestasi kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui LKIP Tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian misi, sasaran, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024, sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 2020 - 2024 serta Rencana Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram Tahun 2024. Kami berharap laporan ini dapat memberikan informasi yang jelas mengenai keberhasilan dan capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2024. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mataram, Januari 2025
KEPALA BALAI

KASNO, S.T., M.H.





DAFTAR ISI

2	RINGKASAN EKSEKUTIF	2
	KATA PENGANTAR	12
	PENDAHULUAN	14
24	PERJANJIAN KINERJA	24
	RENCANA STRATEGIS	24
	SASARAN PROGRAM	28
	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	29
31	AKUNTABILITAS KINERJA	31
	SASARAN PERTAMA	31
	SASARAN KEDUA	81
	KINERJA LAINNYA	100
105	PENUTUP	105
106	GALLERY FOTO	106



BAB I PENDAHULUAN

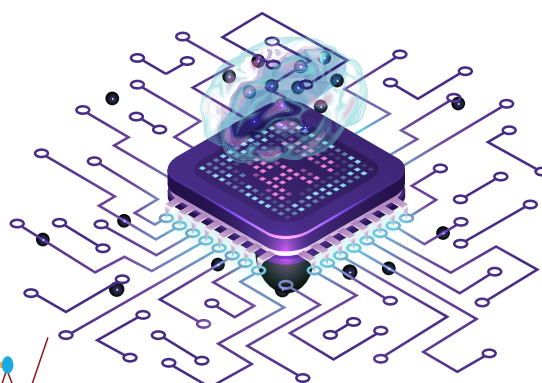
A. LATAR BELAKANG

Di era teknologi digital saat ini yang ditandai dengan berkembangnya Artificial Intelligence (AI), Cloud Computing, Data Analytics, transformasi digital menjadi suatu perubahan yang tidak bisa dihindari oleh berbagai sektor, termasuk di Pemerintahan. Transformasi digital merupakan proses integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek kehidupan atau bisnis, serta mengubah cara organisasi beroperasi dan memberikan nilai kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas suatu organisasi. Transformasi ini tidak hanya melibatkan penggunaan teknologi baru, tetapi juga perubahan budaya, strategi, dan proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pengalaman masyarakat.

Proses transformasi digital di Indonesia memiliki banyak tantangan, pemerataan jaringan internet (Band width) menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mendorong suksesnya transformasi digital di Indonesia. Salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan internet adalah spektrum frekuensi radio. Spektrum frekuensi radio merupakan media nirkabel yang digunakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam menggelar layanannya seperti seluler 4G/5G, Wifi, internet dst.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) merupakan lembaga yang mendapatkan mandat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk mengelola spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan khususnya dalam mendukung transformasi digital. Ditjen SDPPI dituntut untuk melaksanakan tugas tersebut dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip good governance.

Agar memiliki nilai manfaat dan ekonomi yang tinggi, penggunaan spektrum frekuensi radio wajib dikelola, ditata, serta diawasi dan dalam penggunaannya wajib dilengkapi dengan Izin. Hal ini sangat penting guna memberikan jaminan pengguna spektrum frekuensi radio bebas dari gangguan atau interferensi. Penggunaan spektrum frekuensi radio yang bersih dan bebas dari gangguan khususnya untuk alokasi frekuensi radio seluler dan Wifi serta ditambah dengan meratanya jaringan telekomunikasi, merupakan salah satu faktor utama kunci suksesnya transformasi digital.



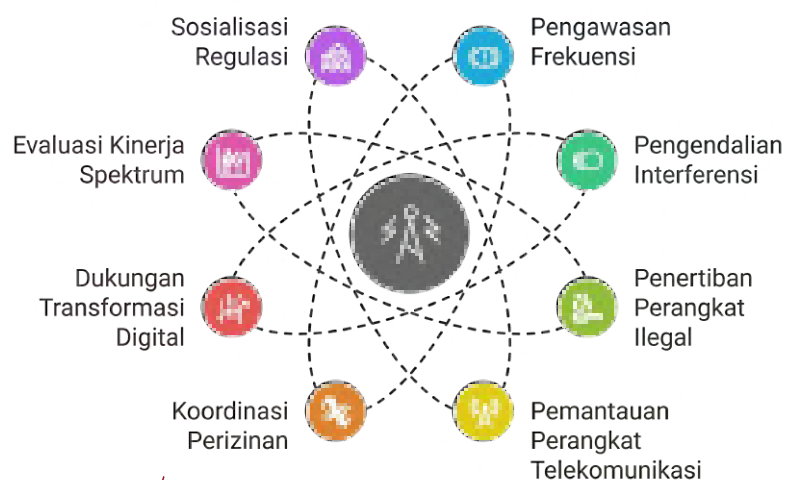
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Ditjen SDPPI yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan serta pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam pelaksanaannya, Balai Monitor memastikan bahwa seluruh penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi beroperasi sesuai dengan ketentuan dan telah dilengkapi dengan izin yang sah, sehingga terwujud ketertiban dan terbebas dari gangguan. Selain itu, pengawasan terhadap alat dan perangkat telekomunikasi, termasuk perangkat pemancar dan penerima sinyal, menjadi aspek krusial dalam menjaga kualitas layanan telekomunikasi serta mencegah penggunaan perangkat ilegal yang dapat mengganggu kestabilan jaringan. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan spektrum frekuensi radio dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung transformasi digital di Indonesia.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram atas pencapaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formal, tetapi juga sebagai alat evaluasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunannya, laporan ini mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) 2020–2024 serta Rencana Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram Tahun 2024. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

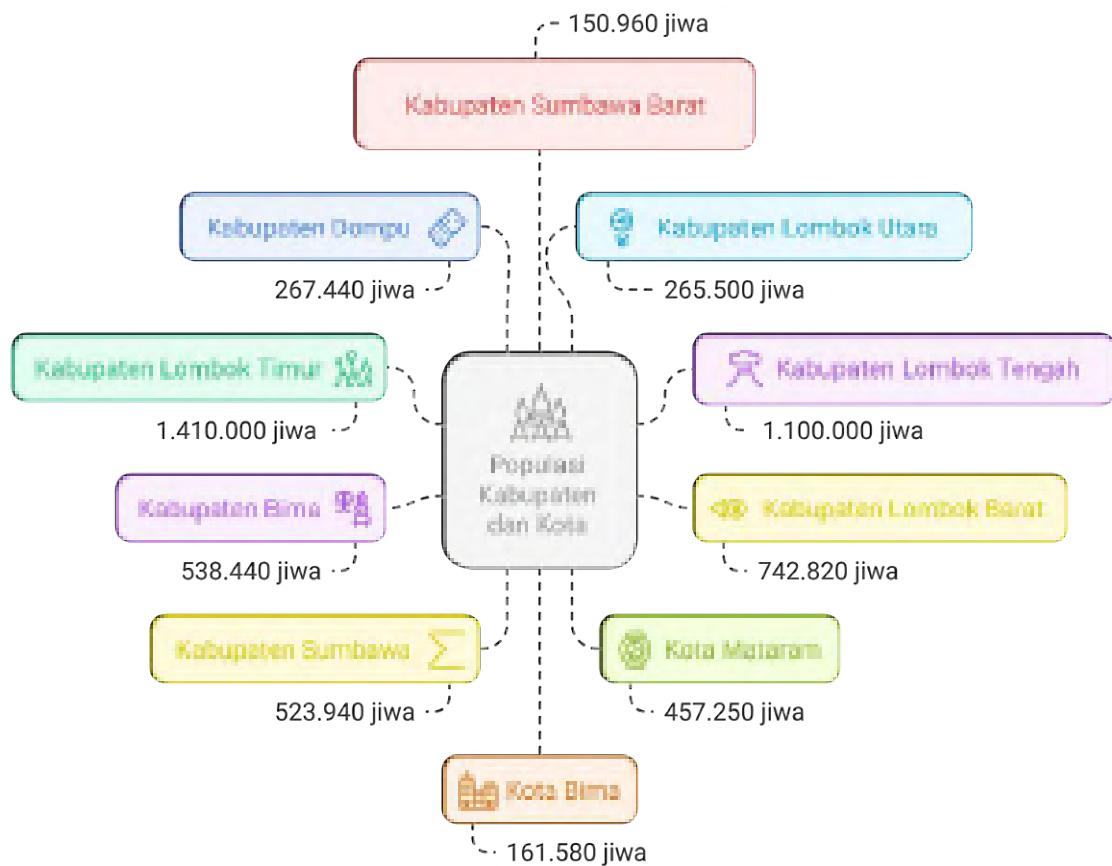
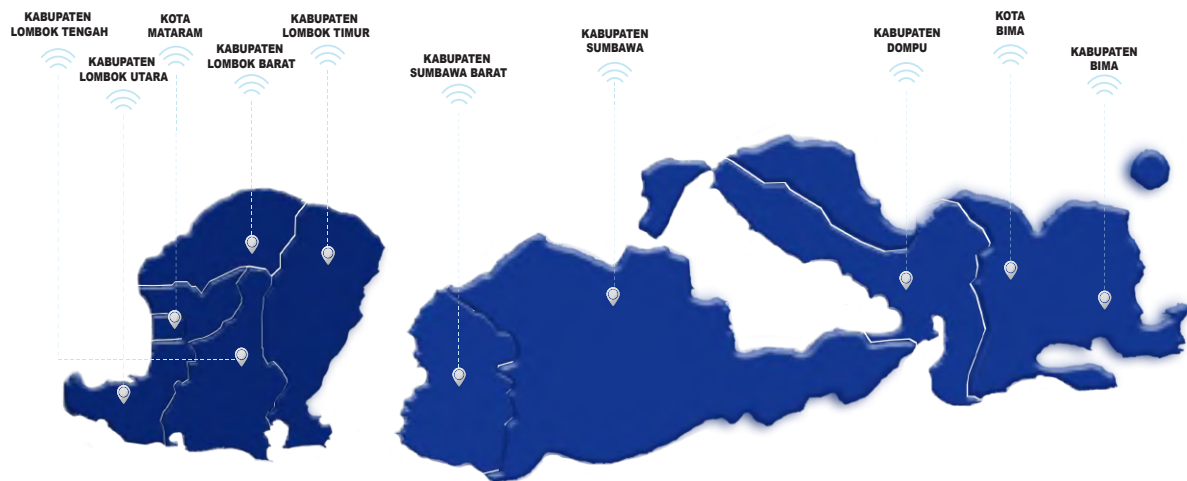
Melalui LKIP Tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan memastikan pengelolaan spektrum frekuensi radio berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan layanan publik yang optimal dan berkelanjutan.

BALMON MATARAM



Gambaran Umum Wilayah Nusa Tenggara Barat

Secara geografis wilayah Nusa Tenggara Barat terdiri dari atas 2 pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan ratusan pulau-pulau kecil, dengan luas wilayah 19.675,89 km², dan penduduk wilayah NTB berjumlah 5.62 Juta jiwa terdiri dari jenis kelamin laki laki berjumlah 2.685.709 jiwa atau 50,11% sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 2.755.618 jiwa atau 49,03% (data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota dan 116 kecamatan yang ada



Pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang semakin luas di Nusa Tenggara Barat telah memberikan dampak signifikan bagi konektivitas masyarakat, terutama dengan tersedianya layanan seluler, internet broadband, serta siaran televisi digital dan radio FM. Kemajuan ini tidak hanya didukung oleh peningkatan jaringan telekomunikasi dari berbagai operator, tetapi juga oleh keberadaan alat dan perangkat telekomunikasi yang semakin canggih, seperti pemancar, penerima sinyal, antena, serta perangkat lainnya yang memastikan kualitas layanan tetap stabil dan minim gangguan. Dengan tersedianya infrastruktur dan perangkat yang andal, masyarakat NTB kini dapat lebih mudah mengakses informasi, meningkatkan produktivitas di berbagai sektor, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan daerah di era digital ini.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio yang berada di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram memiliki tugas, fungsi, dan struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram memiliki tugas utama untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam bidang penggunaan spektrum frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram menyelenggarakan berbagai fungsi, antara lain:

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- c. penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- d. pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- e. penyampaian izin stasiun radio & surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio;
- f. Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
- g. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- h. Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- i. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatatusahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.



Struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jabatan Fungsional adalah jabatan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan fungsional ini memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio, sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu dalam jabatan tersebut.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional yang disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing, dan pengangkatannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap jabatan fungsional memiliki tanggung jawab tertentu yang mendukung kelancaran operasional dan pelaksanaan tugas di Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Jumlah kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, untuk memastikan bahwa setiap tugas dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efisien dan sesuai dengan kapasitas yang ada.

Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional di Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal SDPPI Nomor: 126 Tahun 2024, yang mengatur tentang Ketua dan Anggota Tim Kerja serta tugas dan hasil kerja Tim Kerja di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio. Adapun rincian tugas dan pembagian jabatan fungsional di lingkungan ini adalah sebagai berikut:



a. Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi

Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi memiliki lingkup kerja sebagai berikut:

- Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- Pelaksanaan pengukuran dan inspeksi penggunaan spektrum frekuensi radio;
- Pemantauan dan evaluasi penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi

Dari pelaksanaan lingkup kerja tersebut, Tim kerja Monitoring dan Evaluasi Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan / atau Perangkat Telekomunikasi menghasilkan output kerja sebagai berikut:

- Rekapitulasi hasil pemantauan, observasi, identifikasi, deteksi lokasi dan sumber pancaran
- Data hasil inspeksi stasiun radio
- Data potensi dan pemetaan sumber daya frekuensi setiap wilayah layanan
- Rekapitulasi hasil pengukuran parameter teknis dan wilayah jangkauan
- Rekapitulasi data hasil pemantauan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi baik yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat
- Dokumen mengenai pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggar penggunaan spektrum frekuensi radio serta alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.

b. Tim Kerja Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

Tim Kerja Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi memiliki lingkup kerja Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.

Dari pelaksanaan lingkup kerja tersebut Tim Kerja Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi menghasilkan hasil kerja :

- Dokumen target operasi penertiban SFR dan alat/perangkat telekomunikasi;
- Dokumen tindak lanjut operasi penertiban [dokumen perizinan dan berkas penyidikan] pelanggaran penggunaan SFR dan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.
- Dokumen pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggar penggunaan SFR serta alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.
- Dokumen pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggar penggunaan SFR serta alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.



- Laporan hasil evaluasi pembinaan/pencegahan pelanggaran SFR alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.
- Laporan koordinasi hasil penertiban penggunaan SFR dan alat telekomunikasi dan / atau perangkat telekomunikasi dengan instansi terkait

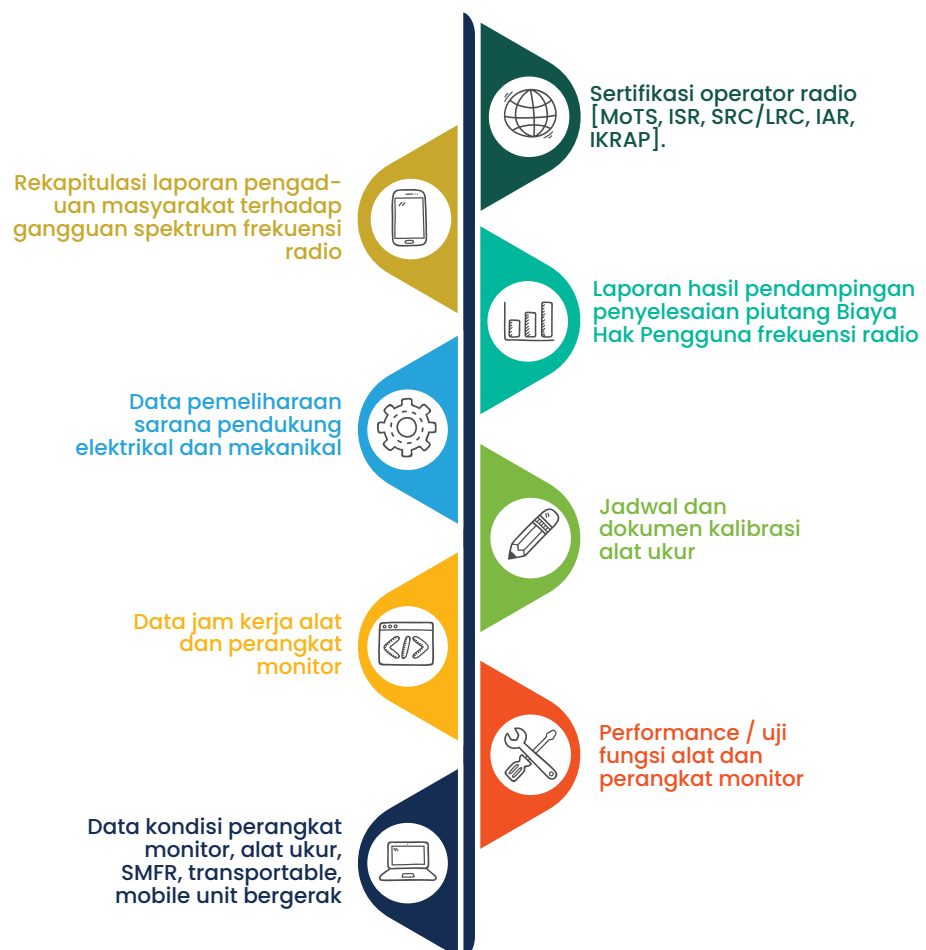
c. Tim Kerja Pemeliharaan Infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio dan Konsultasi Publik

Tim Kerja Pemeliharaan Infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio dan Konsultasi

Publik memiliki lingkup kerja :

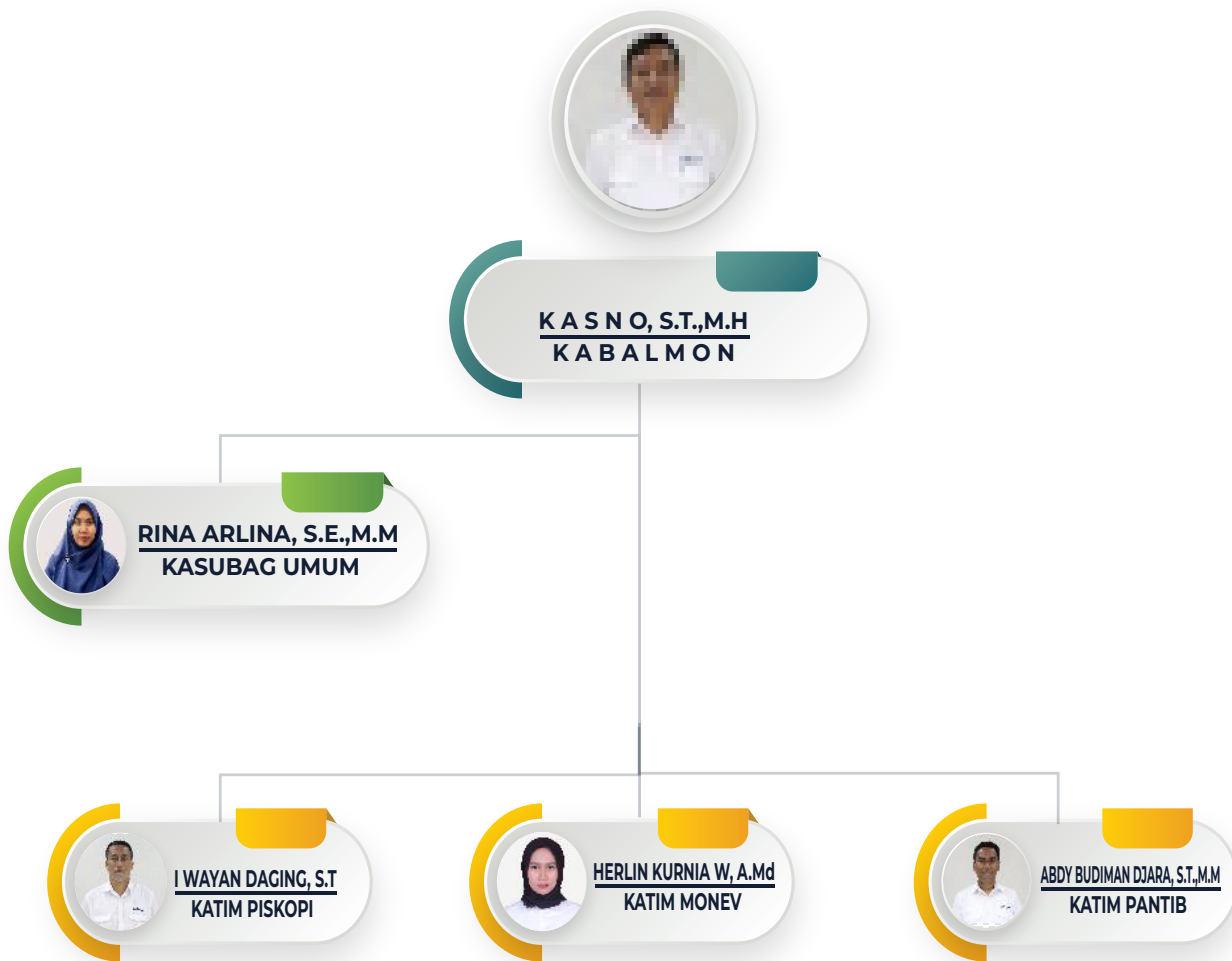


Dari pelaksanaan lingkup kerja tersebut Tim Kerja Pemeliharaan Infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio dan Konsultasi Publik menghasilkan hasil kerja :



STRUKTUR ORGANISASI

BALMON MATARAM



C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Pada tahun 2024, transformasi digital dan layanan broadband, khususnya wireless broadband, telah mengalami perkembangan pesat di Nusa Tenggara Barat (NTB). Peningkatan ini menyebabkan lonjakan kebutuhan bandwidth yang signifikan, berdampak pada alokasi spektrum frekuensi, kinerja industri, serta kebutuhan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan ekosistem industri secara keseluruhan. Mobile broadband menjadi solusi utama dalam menyediakan konektivitas nasional, terutama bagi wilayah kepulauan yang sulit dijangkau oleh jaringan kabel.

Kehadiran berbagai acara internasional seperti MotoGP, MXGP, Shell Eco Marathon, dan ARRC di NTB telah meningkatkan kebutuhan akan layanan telekomunikasi yang andal. Untuk mendukung kelancaran acara-acara tersebut, pengelolaan spektrum frekuensi radio yang efisien menjadi sangat penting, terutama dalam penyediaan konektivitas internet yang stabil serta penyiaran dan komunikasi yang lancar selama berlangsungnya acara. Oleh karena itu, penyiapan regulasi dan kebijakan yang tepat terkait pengelolaan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya terbatas sangat krusial.

Namun, dalam upaya memaksimalkan potensi spektrum frekuensi radio, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain:



Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan kerjasama antara pemerintah, penyedia layanan telekomunikasi, dan masyarakat untuk memastikan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang efektif dan efisien, guna mendukung transformasi digital yang berkelanjutan di NTB.

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja organisasi, pencapaian yang telah diraih, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk perbaikan dan pengembangan di masa depan. Ruang Lingkup Laporan Kinerja ini meliputi empat bagian utama sebagai berikut:



1. Pendahuluan

Berisikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh organisasi

2. Perencanaan Kinerja

Berisikan ikhtisar tentang perjanjian kinerja serta target yang telah ditetapkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram untuk tahun 2024.

3. Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan hasil capaian kinerja organisasi selama tahun 2024 untuk setiap pernyataan sasaran strategis dan pernyataan indikator kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta penyajian tentang pengelolaan dan realisasi anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan organisasi

4. Penutup

Berisikan kesimpulan umum tentang pencapaian kinerja yang telah diraih organisasi serta langkah langkah yang akan ditempuh oleh organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.



BAB II PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020–2024

Sumber daya frekuensi merupakan aset terbatas yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur TIK dan peningkatan kecepatan akses layanan digital, sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menargetkan percepatan transformasi digital nasional. Bagi penyelenggara telekomunikasi, kepemilikan hak penggunaan spektrum frekuensi menjadi faktor utama dalam efisiensi biaya pembangunan dan pengoperasian infrastruktur, sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Alokasi lebar pita frekuensi yang optimal memungkinkan pengurangan jumlah pembangunan BTS, yang berdampak pada penghematan biaya investasi dan operasional, percepatan time to market, serta peningkatan kualitas akses layanan. Sementara itu, bagi masyarakat, ketersediaan spektrum frekuensi yang dikelola secara optimal akan mendorong pemerataan infrastruktur TIK, meningkatkan akses layanan digital, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis digital yang menjadi salah satu fokus utama dalam Renstra Kementerian Kominfo 2020–2024. Bagi pemerintah, sumberdaya frekuensi ini memiliki peran penting dalam peningkatan PNBPN dan mendorong tumbuhnya ekonomi di berbagai sektor. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat arah kebijakan dan strategi agar pemanfaatan frekuensi dapat memberikan manfaat bagi semua stakeholder dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa arah kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya frekuensi dan perangkat TIK antara lain:

- 01 penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan mobile broadband 
- 02 Penyelesaian regulasi terkait spektrum frekuensi radio yang mendukung peningkatan konektivitas broadband 
- 03 Optimalisasi dan penyediaan spektrum frekuensi radio untuk publik service dan instansi pemerintah 
- 04 Penyusunan masterplan spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyiaran digital 



Direktorat Jenderal Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) merupakan salah satu Ditjen yang berada di bawah Kementerian Kominfo sesuai Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal menciptakan terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi yang optimal dan mewujudkan industri komunikasi dan informasi yang berdaya saing dan ramah lingkungan melalui manajemen spektrum frekuensi yang efektif dan efisien, serta mendorong penggunaan teknologi yang inovatif serta optimal. Berdasarkan tugas dan fungsinya tersebut, Ditjen SDPPI memiliki misi untuk 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tatanan spektrum radio yang efisien untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis wireless broadband.
2. Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional, termasuk frekuensi dan slot orbit, mendorong kerjasama dengan industri satelit global dgn memperhatikan kepentingan nasional.
3. Mewujudkan pelayanan frekuensi dan sertifikasi perangkat yang cepat, tepat dan benar secara profesional dan berintegritas.
4. Terkelolanya Penerimaan Negara Bukan Pajak dari izin yang diberikan kepada para pemangku kepentingan di bidang SDPPI.
5. Mewujudkan standar perangkat informatika yang mendukung kemandirian teknologi di bidang wireless broadband.
6. Mewujudkan kepastian hukum di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat informatika.
7. Mewujudkan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi secara terpadu.
8. Mengembangkan sistem stasiun monitoring frekuensi dan sistem monitoring perangkat yang terintegrasi secara nasional.
9. Mewujudkan peningkatan kualitas layanan pengujian dan kalibrasi perangkat informatika yang profesional, berintegritas dan diakui dunia internasional.
10. Mewujudkan dukungan teknis dan administrasi yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen SDPPI

Untuk mewujudkan misi tersebut, ada sejumlah sasaran program yang diemban oleh Direktorat Jenderal SDPPI yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBPN Ditjen SDPPI
2. Optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio
3. Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Pengembangan ekosistem industri perangkat TIK
5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien



Untuk mencapai sasaran program di atas, Direktorat Jenderal SDPPI melakukan rencana kegiatan yang dalam pelaksanaannya perlu dukungan oleh Unit Pelaksana Teknis di seluruh wilayah Indonesia, yaitu :

1. Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio

Untuk mewujudkan tatanan spektrum frekuensi radio yang efektif, efisien, dinamis dan optimal maka dibutuhkan adanya layanan perizinan di bidang layanan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat yang cepat, tepat, dan benar secara profesional dan berintegritas. Hal ini akan meningkatkan kontribusi sektor bisnis sebagai aktor utama. UPT Balai Monitor sebagai garda terdepan dalam pelayanan spektrum frekuensi radio memberikan layanan konsultasi pendampingan dan bimtek e-licensing, penyampaian invoice, menjaga operasional perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) untuk mendukung kegiatan monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio di UPT, menjamin Operasional Aplikasi E-licensing SIMS untuk mendukung smart Service, layanan pengaduan penyelesaian gangguan frekuensi radio dan penanganan pelanggaran standar perangkat telekomunikasi

2. Penyelenggaraan Layanan Publik Bidang Frekuensi dan Perangkat TIK

Dalam melaksanakan penyelenggaraan layanan publik bidang frekuensi dan perangkat TIK dibutuhkan peningkatan penyelenggaraan layanan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. Pendapatan ini diperoleh dari adanya layanan perizinan spektrum frekuensi radio dan layanan sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi serta penyelesaian penanganan piutang BHP frekuensi radio yang sesuai dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu, diperlukan juga peningkatan layanan monitoring. UPT sebagai perpanjangan tangan dari Dirjen SDPPI melakukan upaya pencegahan timbulnya piutang dengan selalu memantau penyelesaian tagihan oleh wajib bayar serta melakukan pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio yang dilakukan oleh KPKNL. Selain itu, UPT juga melakukan peningkatan layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi.

3. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum

Pengelolaan keuangan, BMN dan Umum merupakan kegiatan untuk dukungan manajemen dan teknis yang dilakukan oleh Sekretariat Ditjen SDPPI dibantu oleh Unit Pelaksanaan Teknis di seluruh Indonesia sebagai dukungan teknis administratif yang sesuai dengan reformasi birokrasi. Layanan publik yang cepat, tepat dan benar akan memberikan lingkungan yang kondusif bagi pelaku bisnis telekomunikasi serta masyarakat sebagai pengguna jasa dan layanan telekomunikasi.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram menetapkan arah kebijakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut



- a. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian melalui kegiatan pemantauan, pengukuran, pemeriksaan (validasi) dan penertiban penggunaan frekuensi radio.
- b. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang selaras dengan perkembangan TIK.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio.
- d. Peningkatan kualitas pembinaan dan penertiban pengguna spektrum frekuensi radio ilegal.
- e. Menjaga berfungsinya perangkat pendukung layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penanganan gangguan.
- f. Peningkatan sosialisasi penggunaan spektrum frekuensi radio dan pemanfaatan teknologi informasi/media sosial dalam desiminasi informasi.
- g. Melakukan branding dengan cara melakukan kunjungan ke para pengguna frekuensi radio.
- h. Melakukan survei kepuasan publik serta bimtek E-Licensing terkait pelayanan perizinan.
- i. Senantiasa melakukan analisa dan evaluasi untuk peningkatan tata kerja dan kualitas pelaksanaan tugas.



B. SASARAN PROGRAM

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan ini merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan kegiatan untuk satu tahun perencanaan.

Dalam sasaran kegiatan ditetapkan sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya. Pada Tahun 2024 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram menetapkan 2 sasaran kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja dan target yang dirincikan sebagai berikut:

I. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

Untuk mengukur kinerja dalam rangka mendukung sasaran kegiatan tersebut, ada 11 (sebelas) indikator kinerja yang akan digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan sasaran kegiatan tersebut, yaitu :

1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota dengan target 100%
2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio dengan target 100%
3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi dengan target 100%
4. Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi dengan target dengan target 93%
5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT dengan target 95%
6. Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT dengan target 100%
7. Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koodinasi Pelimpahan ke KPKNL dengan target 100%
8. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 100%
9. Persentase (%) Sosialisasi/Bimbingan Teknis SRC/LRC dengan target 100%
10. Persentase (%) ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN dengan target 100%
11. Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR dengan target 100%

II. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Untuk mengukur kinerja dalam rangka mendukung sasaran kegiatan tersebut, adalah terdapat 2 indikator kinerja yang akan digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan sasaran kegiatan tersebut, yaitu :

1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Mataram Tahun 2024 dengan target nilai 91
2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)



C. BERAHLAK



D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program atau kegiatan yang telah ditentukan, beserta indikator kinerja yang terukur. Perjanjian ini menjadi dasar untuk menetapkan komitmen penerima amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram telah mengalokasikan dana dengan pagu awal sebesar 16,138,975,000 dan tahun 2024 Kementerian Keuangan menetapkan Automatic Adjustment sehingga pagu menjadi sebesar Rp. 15.495.663.000,- yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Rupiah Murni.



SASARAN KEGIATAN I

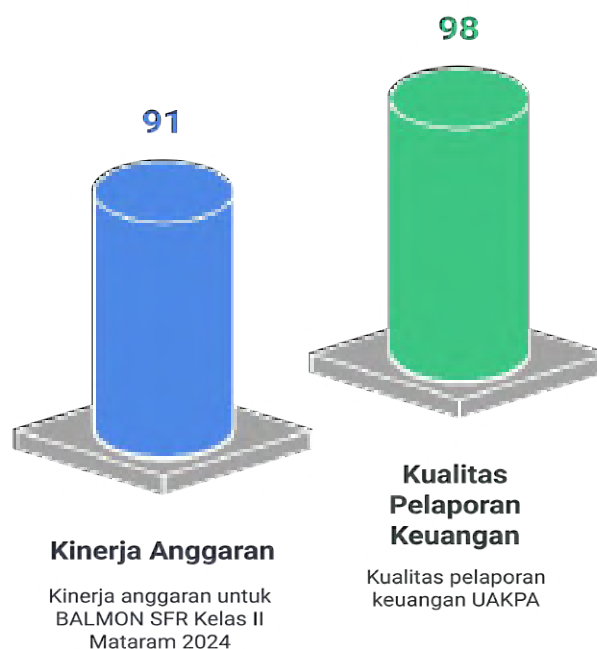
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

NO (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)
1.	Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	100 %
2.	Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100 %
3.	Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	100 %
4.	Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	93 %
5.	Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	95 %
6.	Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100 %
7.	Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL	100 %
8.	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100 %
9.	Persentase (%) Sosialisasi/Bimbingan Teknis SRC/LRC	100 %
10.	Persentase (%) ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN	100 %
11.	Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR	100 %

SASARAN KEGIATAN II

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Target Kinerja untuk 2024



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



➡ SASARAN I

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

1. Indikator Kinerja Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

a. Latar Belakang

Pengawasan terhadap penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) perlu terus ditingkatkan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama di era revolusi industri 4.0. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan SFR dan Alat Perangkat Telekomunikasi (APT) dilakukan secara aman, tertib, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram (Balmon Mataram) menjalankan pengawasan ini melalui kegiatan monitoring penggunaan SFR, yang menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan spektrum frekuensi di tingkat kabupaten/kota. Monitoring ini mencakup identifikasi serta pemantauan penggunaan SFR oleh berbagai layanan telekomunikasi, perangkat nirkabel, dan sistem komunikasi lainnya.

1. Monitoring Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota:

Monitoring ini memiliki target 100% kabupaten/kota yang termonitor dengan bobot 70%. Sebuah kabupaten/kota dihitung telah termonitor apabila memenuhi ketiga komponen berikut:

- Okupansi pada 15 pita frekuensi radio.
- 70% identifikasi hasil monitoring spektrum frekuensi radio.
- 50% Identifikasi Stasiun Radio (ISR) yang termonitor.



Kegiatan okupansi dilakukan dengan cara mengamati kepadatan penggunaan pita frekuensi radio sesuai dengan alokasi masing-masing, baik HF, VHF, UHF, maupun SHF secara rutin. Setelah kegiatan okupansi dilakukan, hasil yang diperoleh kemudian diidentifikasi penggunaannya, baik yang memiliki izin, tanpa izin, maupun yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

2. Monitoring Rutin Pita Frekuensi Marabahaya pada SMFR Tetap/Transportable:

Monitoring ini ditargetkan selama 240 hari kerja dalam setahun, yang berarti dilakukan secara rutin paling sedikit 14 kali di 6 site SMFR tetap/transportable setiap bulannya. Monitoring ini mencakup pengawasan dan identifikasi terhadap 5 pita frekuensi marabahaya yang telah ditentukan. Target kinerja ini telah tercapai dengan 240 hari kerja pada tahun 2024, atau mencapai 100% dengan bobot 30%.

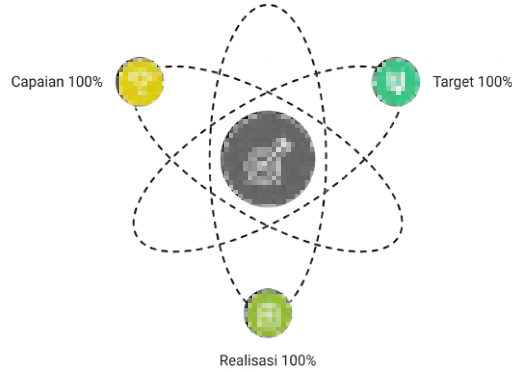
b. Capaian Kinerja

Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang terdiri dari 10 kabupaten/kota, dengan kondisi geografis kepulauan. Pada tahun 2024, Balmon Mataram menargetkan untuk melakukan observasi/monitoring spektrum frekuensi radio di seluruh kabupaten/kota. Target yang harus dicapai untuk Indikator Kinerja Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota adalah 100% kabupaten/kota termonitor, dengan bobot 70%. Selain itu, Monitoring Rutin Pita Frekuensi Marabahaya pada SMFR Tetap/Transportable harus dilakukan sebanyak 240 hari selama tahun 2024, yang mencakup pengawasan dan identifikasi terhadap 5 pita frekuensi marabahaya yang telah ditentukan dengan bobot 30%. Berdasarkan target yang telah ditetapkan untuk Indikator Kinerja Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota, Balmon Mataram telah berhasil mencapai target 100%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam melakukan monitoring secara menyeluruh di seluruh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat. Grafik atau tabel yang menggambarkan capaian kinerja dapat dilihat di bawah ini:

BULAN	PROGRES CAPAIAN OBSMON 15 PITA (%)	PROGRES CAPAIAN OBSMON 15 PITA (%)
JANUARI	0.00	0.00
FEBRUARI	28.00	2.10
MARET	49.00	3.60
APRIL	70.00	6.30
MEI	70.00	10.80
JUNI	70.00	13.64
JULI	70.00	16.37
AGUSTUS	70.00	19.09
SEPTEMBER	70.00	21.82
OKTOBER	70.00	24.55
NOVEMBER	70.00	27.27
DESEMBER	70.00	30.00



Perbandingan Antara Target dan Capaian Kinerja tahun 2024 Indikator kinerja Persentase (%)
Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota



1. Monitoring Penggunaan Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota target 70%

Tabel /Grafik monitoring Penggunaan Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota perbulan

BULAN	CAPAIAN
JANUARI	0
FEBRUARI	40
MARET	70
APRIL	100
MEI	100
JUNI	100
JULI	100
AGUSTUS	100
SEPTEMBER	100
OKTOBER	100
NOVEMBER	100
DESEMBER	100

Okupansi Sesuai Pita Penugasan

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Pengendalian SDPPI Nomor: 1083/DJSDP-PI.4/PR.04.01/01/2024 tanggal 19 Januari 2024, perihal Penugasan terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT Direktorat Pengendalian SDPPI Tahun 2024, terdapat 15 subservice/pita frekuensi radio yang harus dimonitor. Pada tahun 2024, telah dilakukan kegiatan okupansi 15 pita sesuai dengan pita penugasan di seluruh kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Tabel 15 Pita Frekuensi Target Monitoring

NO	SUBSERVICE	PITA FREKUENSI
1	Radio FM	87-108 MHz
2	Penerbangan VHF	108-137 MHz
3	Komrad VHF, GRN, Maritim VHF	137-174 MHz
4	DRM, DAB	174-230 MHz
5	Tetap, Bergerak, Marabahaya	300-430 MHz
6	Komrad UHF	430-460 MHz
7	Tetap, Bergerak	460-470 MHz
8	Televisi UHF, IMT	478-806 MHz
9	Trunking, Downlink Selular 800	806-880 MHz
10	Downlink Seluler 900	925-960 MHz
11	IMT	1427-1518 MHz
12	Downlink Seluler 1800	1805-1880 MHz
13	Downlink Seluler 2100	2110-2170 MHz
14	IMT	2170-2200 MHz
15	Selular, Broadband 2.3	2300-2400 MHz



2. Identifikasi Hasil Monitoring

Tabel Identifikasi Hasil Monitoring Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota Tahun 2024

WILAYAH	Jumlah IDEN Termonitor	Jumlah IDEN dalam PK 70%	IDEN Teridentifikasi	Capaian Target (%)
MATARAM	4401	3081	4198	136.25
LOBAR	3835	2685	3738	139.22
KLU	431	302	398	131.79
LOTENG	2164	1515	2130	140.59
LOTIM	270	189	225	119.05
KSB	232	162	213	131.48
SUMBAWA	437	306	433	141.50
DOMPU	212	148	205	138.51
KOTA BIMA	419	293	412	140.61
BIMA	213	149	203	136.24
TOTAL	12614	8830	12155	137.66

Sepanjang tahun 2024, Balmon Mataram telah berhasil melaksanakan kegiatan okupansi 15 pita frekuensi radio di seluruh Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengguna frekuensi radio yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dari hasil okupansi yang diperoleh, ditetapkan target minimal identifikasi sebesar 70% dari total penggunaan frekuensi yang terdeteksi. Pada kegiatan okupansi tersebut, termonitor sebanyak 12.614 penggunaan frekuensi, yang mana target identifikasi untuk mencapai 70% adalah 8.830 penggunaan.

Balmon Mataram berhasil mengidentifikasi sebanyak 12.155 penggunaan frekuensi, yang berarti 96,361% dari total hasil okupansi. Dengan demikian, Balmon Mataram berhasil melampaui target identifikasi yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 137,66%. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen tinggi dalam pelaksanaan kegiatan okupansi dan identifikasi frekuensi, serta upaya maksimal untuk memastikan pemanfaatan spektrum frekuensi radio di wilayah Nusa Tenggara Barat dapat dikelola dengan baik.

3. Monitoring ISR

Tabel Monitoring ISR Perkabupaten/Kota Tahun 2024

WILAYAH	JUMLAH ISR	Target Monitor ISR dalam PK 50%	ISR TERMONITOR	Capaian Target (%)
MATARAM	154	77	149	193.51
LOBAR	82	41	75	182.93
KLU	37	19	32	168.42
LOTENG	79	40	71	177.50
LOTIM	60	30	54	180.00
KSB	50	25	48	192.00
SUMBAWA	67	34	50	147.06
DOMPU	40	20	37	185.00
KOTA BIMA	47	24	41	170.83
BIMA	29	15	27	180.00
TOTAL	645	325	584	179.69

Dalam monitoring penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) di tingkat kabupaten/kota, Balmon Mataram juga menetapkan target monitoring Identifikasi Stasiun Radio (ISR) sebesar 50% dari total 645 ISR, atau sekitar 325 ISR yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara Barat.



Pada tahun 2024, Balmon Mataram berhasil memonitori sebanyak 584 ISR, yang berarti telah mencapai 179,69% dari target yang ditetapkan, atau melampaui target secara signifikan. Monitoring ISR ini difokuskan pada dua kategori utama, yaitu ISR dinas siaran dan ISR dinas bergerak darat, yang merupakan bagian dari prioritas pengawasan SFR. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas Balmon Mataram dalam memastikan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang lebih baik dan terkontrol, serta mendukung keberlanjutan pengawasan terhadap penggunaan frekuensi radio di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Tabel Monitoring Rutin Pita Frekuensi Marabahaya

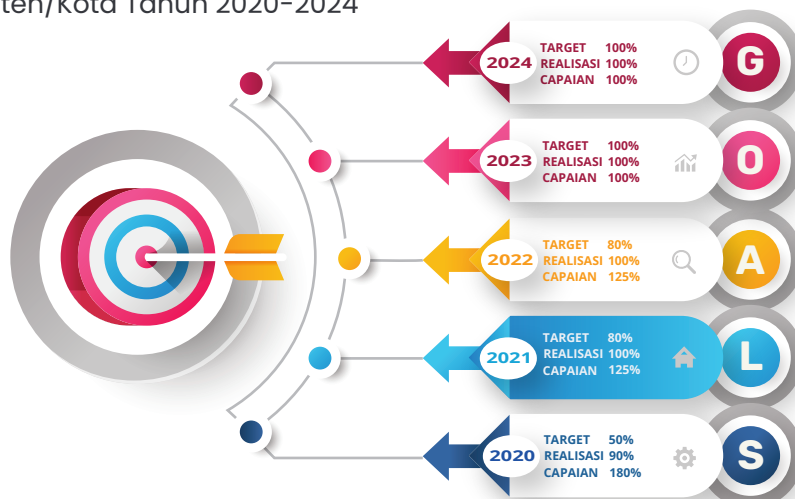
WILAYAH	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI	
	OPS	NON OPS	OPS	NON OPS	OPS	NON OPS	OPS	NON OPS	OPS	NON OPS	OPS	NON OPS
TCI Mataram	0	0	17	1	18	0	17	0	18	1	18	0
TCI Batu	0	0	18	0	18	0	16	0	18	0	18	0
TCI Narmada	0	0	17	1	18	0	15	0	18	1	18	0
LS Bima	0	0	10	7	16	0	14	0	17	7	18	0
LS LOTENG	0	0	15	0	16	0	16	0	18	0	18	0
LS Sumbawa	0	0	12	3	14	0	16	0	18	3	18	0

WILAYAH	JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER	
	OPS	NON OPS	OPS	NON OPS	OPS	NON OPS	OPS	NON OPS	OPS	NON OPS	OPS	NON OPS
TCI Mataram	23	0	22	0	10	12	0	31	0	30	14	4
TCI Batu	23	0	22	0	20	0	18	0	19	0	19	0
TCI Narmada	23	0	22	0	20	0	18	0	1	27	0	31
LS Bima	21	0	20	0	17	0	22	0	15	0	14	0
LS LOTENG	18	0	21	0	17	0	22	0	18	0	15	2
LS Sumbawa	21	0	22	0	18	0	19	0	18	0	14	0

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Monitoring Rutin Pita Frekuensi Marabahaya menggunakan SMFR Tetap/Transportable telah dilaksanakan selama 240 hari selama tahun 2024. Setiap site dimonitor setidaknya 14 hari setiap bulan, yang mencakup pengawasan dan identifikasi terhadap 5 pita frekuensi marabahaya yang telah ditentukan. Namun terdapat beberapa site yang mengalami kerusakan dan dilaporkan sebagai non-operasional. Hingga saat ini, masih ada satu site, yaitu Site Narmada, yang belum dapat beroperasi.

Capaian Kinerja Renstra Balmon Mataram Tahun 2020-2024 (Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja)

Indikator Kinerja Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024



Capaian kinerja yang sangat baik dalam monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio selama periode 2020-2024 menunjukkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan Spektrum Frekuensi Radio, mencerminkan keberhasilan strategi dan upaya yang dilakukan dalam memastikan optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi di wilayah nusa Tenggara barat.

C. **Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional**
Standar Nasional yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam peraturan Dirjen SDPPI Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dirjen SDPPI Tahun 2020-2024, Target indikator ini terdapat pada target Rencana strategis Dirjen SDPPI Tahun 2020-2024 yaitu Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik dan pada Sasaran Program 3. Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik,

Indikator Kinerja Sasaran Program	Target Rencana Strategis 2020-2024	Realisasi 2024
IKP 3.3 Persentase layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	100	100

D. Penyebab Keberhasilan Serta Alternatif Solusi

Indikator Kinerja Sasaran Program	Keberhasilan/Kegagalan
Indikator Kinerja Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota tahun 2024 telah mencapai angka maksimal yaitu tercapai 100% dari yang ditargetkan	BERHASIL

1. Faktor yang menyebabkan keberhasilan peningkatan kinerja :

Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam pelaksanaan tugas monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio. Sarana SMFR yang memadai yang digunakan oleh SDM yang kompeten tentunya memberikan hasil yang optimal, sehingga meningkatkan efektivitas pencapaian target.

2. Alternatif Solusi

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis

E. Faktor Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian target Indikator kinerja Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota tidak terlepas dari dukungan sarana Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) yang memadai. Sarana SMFR yang memadai memegang peranan penting dalam memberikan hasil yang efektif.



2. Indikator Kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

a. Latar Belakang

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, Balmon Mataram secara rutin melaksanakan pemeriksaan terhadap stasiun radio yang beroperasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemeriksaan ini sangat penting untuk memastikan kesesuaian antara parameter teknis yang ditetapkan dalam izin penggunaan SFR dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Selain itu, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan bahwa alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh pemilik stasiun radio telah memenuhi standar teknis yang ditentukan, yang dibuktikan dengan adanya sertifikat yang sah. Pada tahun 2024, Balmon Mataram telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) yang mencakup indikator kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio dengan target sebesar 100%. Indikator kinerja ini terdiri dari dua komponen utama yang menjadi parameter dalam pengukurannya, yaitu:

1. Pemeriksaan stasiun radio
2. Monitoring alat dan perangkat telekomunikasi

Pemeriksaan Stasiun Radio

Pemeriksaan stasiun radio terbagi menjadi dua jenis, yaitu pemeriksaan terhadap stasiun radio microwave link dan pengukuran parameter teknis stasiun siaran.

Pemeriksaan stasiun radio microwave link

Pemeriksaan ini dilakukan terhadap penggunaan microwave link yang digunakan oleh operator seluler. Mengingat adanya peningkatan kualitas layanan seluler di wilayah Nusa Tenggara Barat, penggunaan microwave link sebagai media transmisi juga semakin meningkat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengawasan secara rutin terhadap penggunaan microwave link ini guna mencegah potensi gangguan frekuensi radio yang dapat menyebabkan degradasi kualitas layanan seluler.

Pengukuran parameter teknis stasiun siaran

Pengukuran ini dilakukan terhadap Radio Siaran FM dan Televisi Digital untuk memastikan bahwa parameter teknis yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam izin penggunaan SFR. Penyimpangan pada parameter teknis dapat berdampak negatif, seperti mengurangi kualitas siaran atau bahkan menyebabkan gangguan yang tidak dapat diterima oleh audiens dan penyelenggara siaran lainnya.

Monitoring Alat dan Perangkat Telekomunikasi

Selain pemeriksaan stasiun radio, Balmon Mataram juga melakukan monitoring terhadap alat dan perangkat telekomunikasi, baik yang digunakan oleh pengguna SFR maupun yang diperdagangkan di pasar. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan atau diperdagangkan telah



memenuhi ketentuan standar teknis yang berlaku dan telah dilengkapi dengan sertifikat yang sah. Penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis berpotensi menimbulkan gangguan frekuensi radio yang dapat merugikan pengguna frekuensi lainnya.

Dengan pelaksanaan pemeriksaan dan monitoring yang rutin dan terencana, Balmon Mataram bertujuan untuk menjaga kestabilan penggunaan frekuensi radio, mencegah gangguan frekuensi, serta mendukung kelancaran layanan telekomunikasi dan penyiaran di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

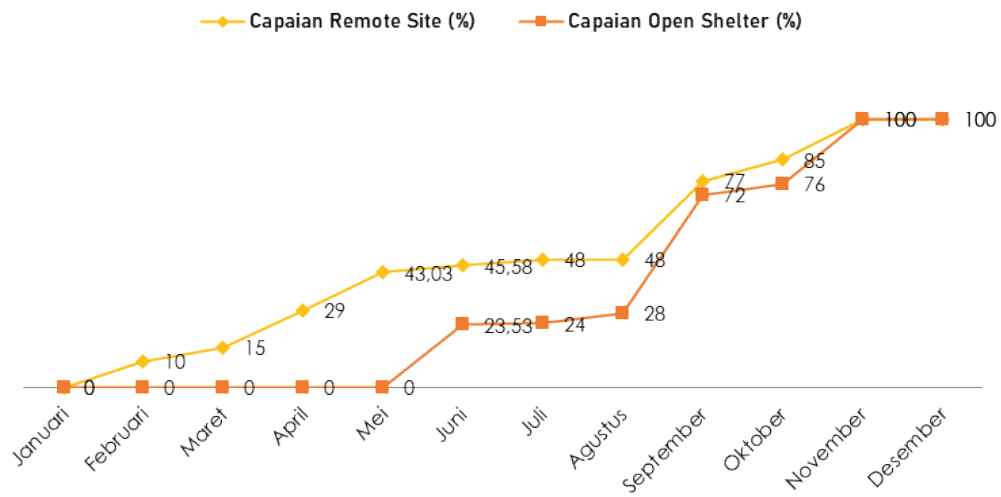
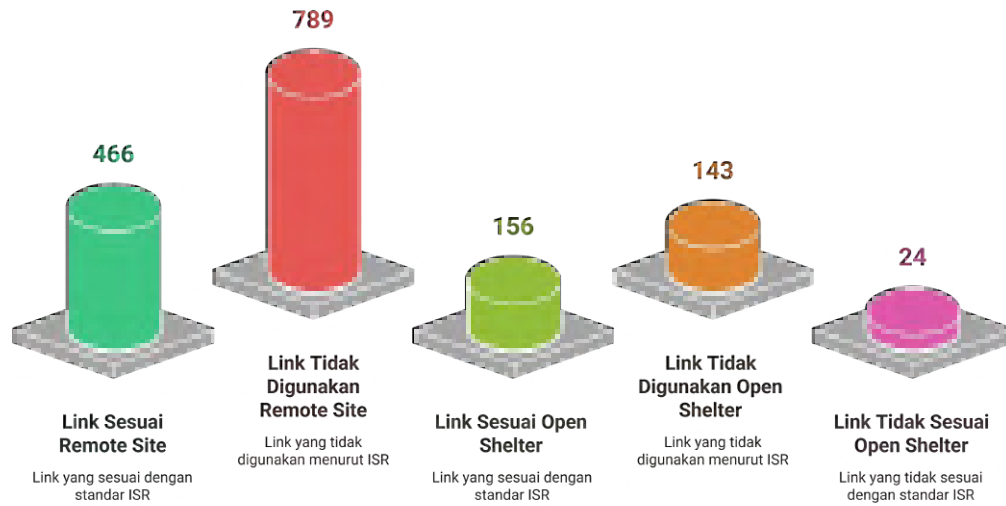
b. Capaian Kinerja

Dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan frekuensi radio serta memastikan akurasi data perizinan pada database Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS), Balmon Mataram melaksanakan kegiatan inspeksi stasiun radio sebagai tindak lanjut dari hasil validasi data ISR yang dilakukan oleh Ditjen SDPPI terhadap penggunaan frekuensi microwave link oleh operator seluler.

Pelaksanaan pemeriksaan microwave link tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pengendalian SDPPI Nomor 1083/DJSDPPI.4/PR.04.01/01/2024, tanggal 19 Januari 2024, yang terkait dengan Perjanjian Kinerja (PK) UPT Direktorat Pengendalian SDPPI Tahun 2024. Dalam kegiatan ini, pemeriksaan dilakukan menggunakan dua metode, yaitu metode remote site dan open shelter. Target kinerja yang ditetapkan untuk pemeriksaan microwave link ini adalah 100%.

Adapun jumlah ISR microwave link yang menjadi target pemeriksaan di wilayah Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024 adalah sebanyak 1.255 ISR yang diperiksa dengan menggunakan metode remote site dan 323 ISR yang diperiksa dengan menggunakan metode open shelter. Dengan demikian, total target pemeriksaan adalah sebanyak 1.578 ISR microwave link yang tersebar di 10 kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara Barat. Target pemeriksaan ini mencakup 5 operator seluler utama, yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Telkomsel, PT. Indosat Ooredoo Hutchison, PT. XL Axiata, dan PT. Smart Telecom. Dari hasil pelaksanaan pemeriksaan dengan metode remote site terhadap 1.255 ISR microwave link, ditemukan bahwa sebanyak 466 (37,13%) ISR microwave link penggunaannya sudah sesuai dengan ISR, dan sebanyak 789 (62,87%) ISR microwave link sudah tidak digunakan. Selain itu, juga dilaksanakan pemeriksaan microwave link dengan metode open shelter terhadap 323 ISR. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa sebanyak 156 (48,30%) microwave link telah sesuai ISR, 143 (44,27%) microwave link sudah tidak digunakan, serta 24 (7,43%) microwave link yang tidak sesuai ISR.

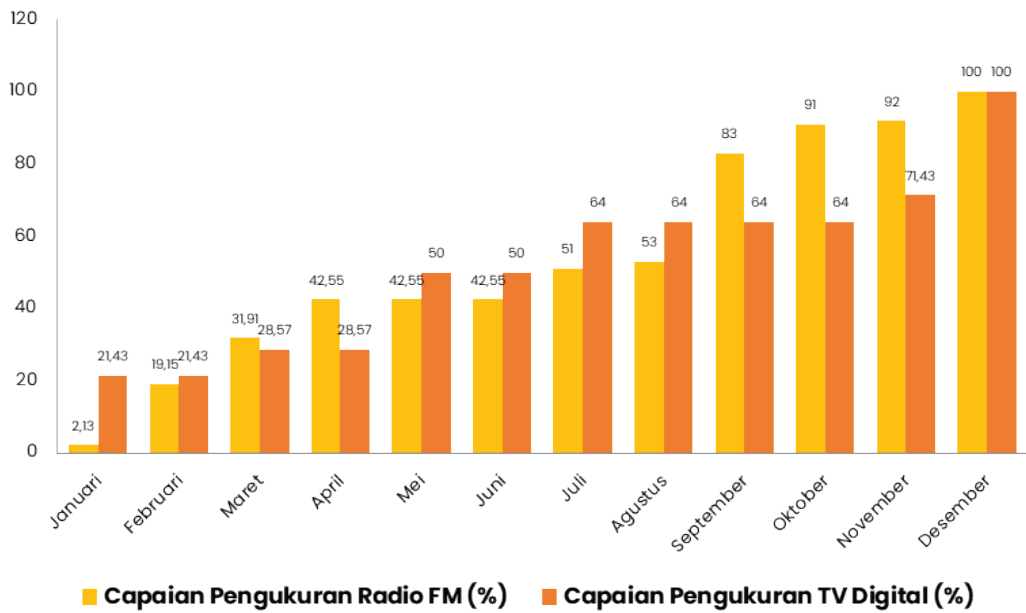




Dengan demikian, pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio ini dapat memastikan bahwa penggunaan frekuensi untuk keperluan microwave link di wilayah Nusa Tenggara Barat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan membantu menjaga kualitas layanan telekomunikasi serta mencegah terjadinya gangguan frekuensi radio.

Pemeriksaan Stasiun Siaran

Pemeriksaan stasiun siaran dilaksanakan dengan melakukan pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran Radio FM dan Televisi Digital. Pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran bertujuan untuk memastikan kesesuaian parameter teknis dan administrasi stasiun radio dengan data ISR.



Tabel Rekapitulasi Pengukuran Stasiun Siaran Radio FM dan Televisi Digital

WILAYAH	TOTAL ISR SIARAN	STASIUN SIARAN TERUKUR
MATARAM	20	20
LOBAR	2	2
KLU	1	1
LOTENG	12	12
LOTIM	9	9
KSB	1	1
SUMBAWA	6	6
DOMPU	2	2
BIMA	5	5
KOTA BIMA	3	3

Maksud dan tujuan pengukuran spektrum frekuensi radio siaran adalah sebagai berikut: Pada tahun 2024, jumlah stasiun siaran di Nusa Tenggara Barat yang terdaftar adalah 61 ISR, yang terdiri dari 47 stasiun Radio FM dan 14 stasiun Televisi Digital. Target pengukuran parameter teknis ditetapkan 100% dari total ISR yang ada.



Sebanyak 61 stasiun radio, yang terdiri dari 47 stasiun Radio FM dan 14 stasiun Televisi Digital, seluruhnya telah dilakukan pengukuran parameter teknis. Dengan demikian, persentase realisasi untuk sub indikator pengukuran stasiun Radio FM dan Televisi Digital mencapai 100%.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi untuk komponen pemeriksaan stasiun radio pada tahun 2024 adalah 100%. Pembobotan keseluruhan untuk komponen ini adalah 80%, yang merupakan rata-rata dari realisasi pemeriksaan microwave link secara remote site sebesar 100%, pemeriksaan microwave link secara open shelter sebesar 100%, dan pengukuran stasiun radio sebesar 100%.

Monitoring Alat dan Perangkat Telekomunikasi

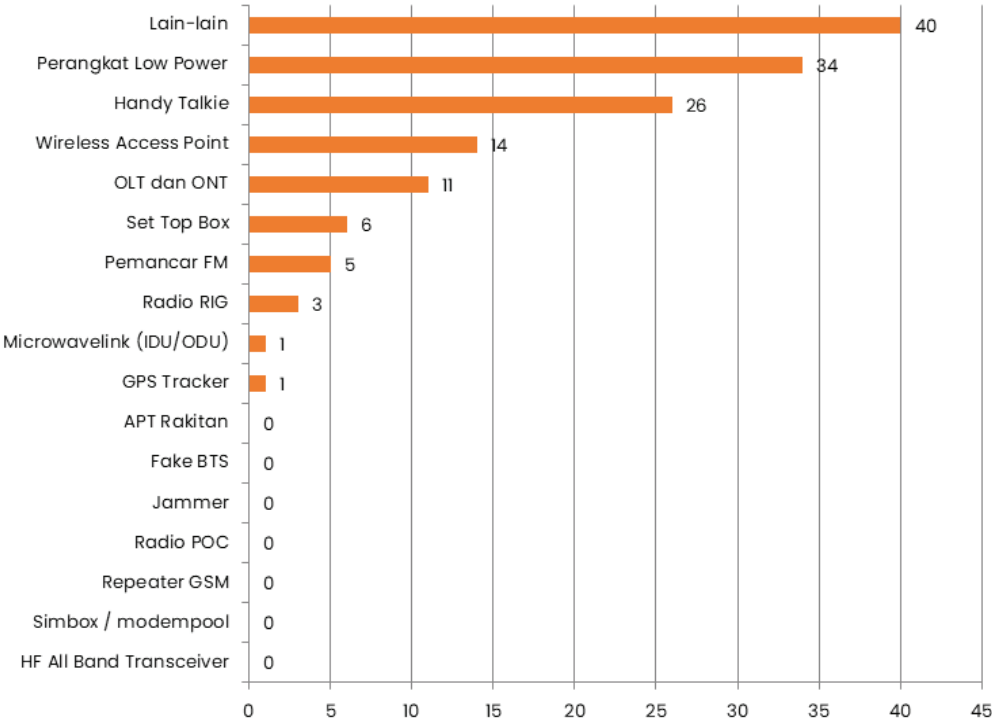
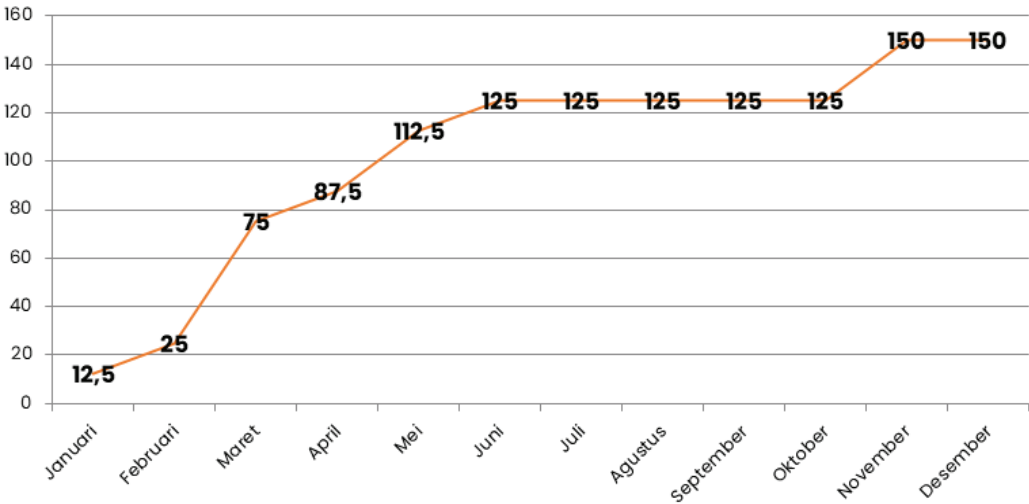
Berdasarkan Nota Dinas Direktur Pengendalian SDPPI Nomor: 1083/DJSDPPI.4/PR.04.01/01/2024 tanggal 19 Januari 2024, perihal Penugasan terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT Direktorat Pengendalian SDPPI Tahun 2024, kegiatan monitoring alat dan perangkat telekomunikasi ditargetkan sebanyak 8 kali kegiatan terhadap 16 jenis perangkat prioritas dengan paling sedikit 3 jenis perangkat setiap kegiatan.

Sepanjang tahun 2024, telah dilaksanakan sebanyak 12 kali kegiatan monitoring alat dan perangkat telekomunikasi, sehingga persentase realisasi untuk sub indikator monitoring alat dan perangkat telekomunikasi adalah 100%. Dari kegiatan monitoring alat dan perangkat telekomunikasi yang telah dilaksanakan, ditemukan 3 kasus penggunaan ataupun perdagangan alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Permen Kominfo No. 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau perangkat Telekomunikasi, dan dari ketiga alat/perangkat telekomunikasi tersebut telah dilakukan BA teguran dan BA peringatan sebagai langkah penegakan aturan.

Dengan tercapainya realisasi sebesar 100% untuk kedua komponen, yaitu pemeriksaan stasiun radio dan monitoring alat serta perangkat telekomunikasi, maka capaian indikator kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio pada tahun 2024 mencapai 100%. Capaian ini mencerminkan komitmen yang tinggi dalam memastikan bahwa operasional frekuensi radio di wilayah Nusa Tenggara Barat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mengurangi potensi gangguan yang diakibatkan oleh perangkat telekomunikasi ilegal yang beredar di masyarakat.

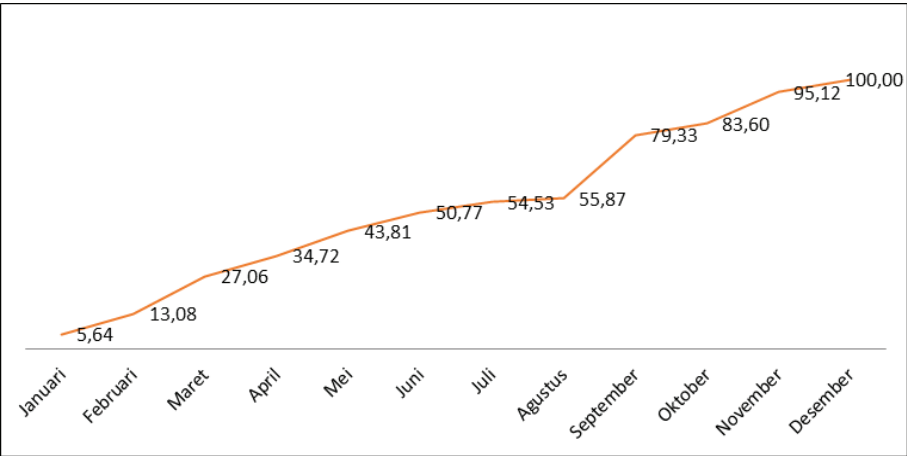


Tabel/Grafik Capaian Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio Kumulatif tiap Bulan



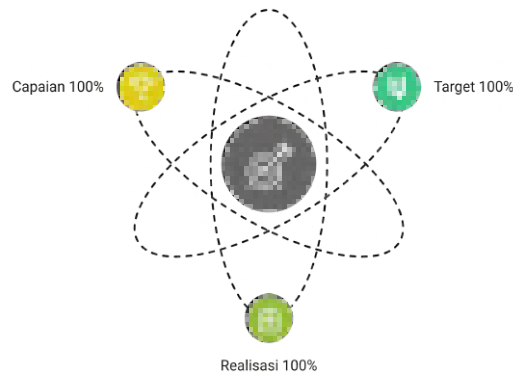
Tabel/Grafik Capaian Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun

BULAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
CAPAIAN	5,64%	13,08%	27,06%	34,72%	43,81%	50,77%	54,53%	55,87%	79,33%	83,60%	95,12%	100%



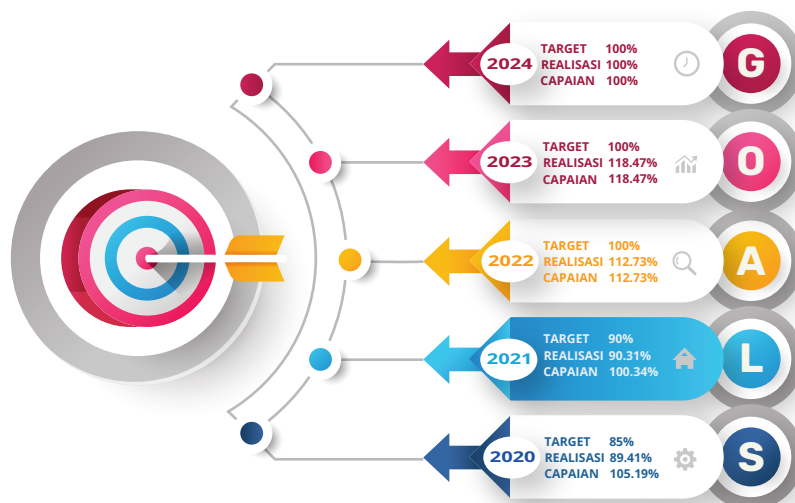
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio



Capaian Kinerja Renstra Balmon Mataram Tahun 2020–2024 (Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja)

Indikator Kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio



Capaian kinerja yang sangat baik dalam Indikator Kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio selama periode 2020–2024 memberikan dampak positif yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap berbagai aspek di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Standar Nasional yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam peraturan Dirjen SDPPI Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dirjen SDPPI Tahun 2020–2024, Target indikator ini terdapat pada target Rencana strategis Dirjen SDPPI Tahun 2020–2024 yaitu Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik dan pada Sasaran Program 3. Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik,

Indikator Kinerja Sasaran Program	Target Rencana Strategis 2020-2024	Realisasi 2024
IKP 3.3 Persentase layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	100	100

d. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif Solusi

Indikator Kinerja Sasaran Program	Keberhasilan/Kegagalan
Indikator Kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio tahun 2024 telah mencapai angka maksimal yaitu tercapai 100% dari yang ditargetkan	BERHASIL

1. Faktor yang menyebabkan keberhasilan peningkatan kinerja

Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam pelaksanaan tugas inspeksi dalam rangka validasi data ISR (open shelter dan remote site, pengukuran parameter teknis radio siaran dan televisi digital serta monitoring APT). Sarana SMFR yang memadai yang digunakan oleh SDM yang kompeten memberikan hasil yang optimal, sehingga pencapaian target.

2. Solusi Alternatif

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis

e. Faktor Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio tidak terlepas dari dukungan sarana Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) yang memadai. Selain itu koordinasi dan kolaborasi antar elemen yang terkait seperti stakeholder dan sistem aplikasi monitoring juga penting dalam pencapaian target indikator tersebut.

2. Indikator Kinerja Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

a. Latar Belakang

Layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio merupakan bagian penting dari layanan publik yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan meningkatnya penggunaan spektrum frekuensi radio, potensi gangguan merugikan atau harmful interference juga semakin besar, sering kali disebabkan oleh penggunaan frekuensi yang tidak sesuai atau tanpa Izin Stasiun Radio (ISR) yang sah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi pengguna frekuensi yang sah melalui penanganan gangguan ini, yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Ditjen SDPPI di seluruh Indonesia. Meskipun fokus utama penanganan gangguan frekuensi adalah sektor-sektor yang berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia, penanganan ini juga melibatkan



berbagai dinas dan layanan lain, seperti dinas bergerak darat, dinas tetap, siaran, satelit, dan lain-lain, guna memastikan respon cepat dan mencegah dampak yang lebih besar. Keberhasilan pelaksanaan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio sangat bergantung pada dua faktor utama:

1. Perangkat monitoring yang canggih dan efektif untuk mendeteksi gangguan.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dan memiliki kompetensi untuk menangani masalah gangguan frekuensi dengan cepat dan tepat.

b. Capaian Kinerja

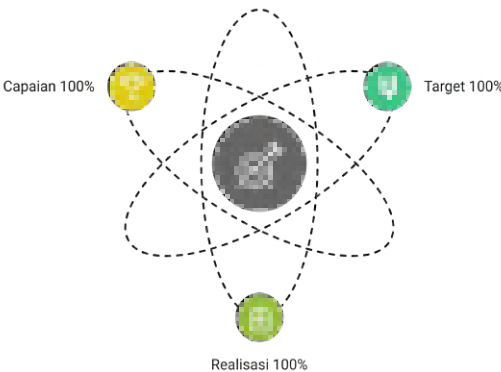
Pada tahun 2024, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja dengan indikator kinerja Persentase (%) Penanganan Gangguan, dengan target 100% untuk penanganan aduan gangguan Spektrum Frekuensi Radio (SFR). Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram (Balmon Mataram) berkomitmen untuk menangani setiap aduan gangguan yang diterima dengan respons yang cepat dan efektif.

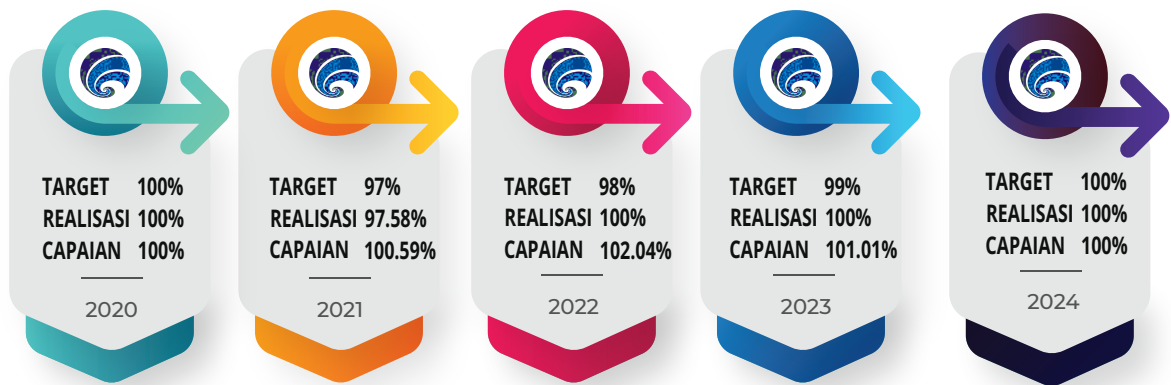
Sepanjang tahun 2024, Balai Monitor Mataram berhasil menindaklanjuti semua aduan gangguan yang diterima. Dari total 7 aduan gangguan SFR yang masuk, Balai Monitor telah berhasil menindaklanjuti keseluruhan aduan tersebut dengan pencapaian 100%. Setiap aduan yang diterima telah diproses secara sistematis, termasuk analisis gangguan, identifikasi sumber masalah, dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

BULAN	Jumlah Aduan Diterima	Jumlah Aduan Tertangani	KETERANGAN
JANUARI	1	1	Aduan dari koperasi Janur Indah
FEBRUARI	-	-	
MARET	-	-	
APRIL	1	1	Aduan dari BMKG
MEI	1	1	Aduan dari Airnav
JUNI	1	1	Aduan dari SMOS
JULI	-	-	
AGUSTUS	1	1	Aduan dari PT. PLN
SEPTEMBER	-	-	
OKTOBER	-	-	
NOVEMBER	1	1	Aduan dari ORARI
DESEMBER	1	1	Aduan dari SMOS

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian IK Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio





Capaian kinerja yang sangat baik dalam Indikator Kinerja Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio selama periode 2020-2024 memberikan dampak positif yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap berbagai aspek di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Dampak kinerja penanganan gangguan yang baik adalah terciptanya lingkungan komunikasi yang aman, lancar, dan efisien. Dengan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio yang tepat waktu dan sesuai prosedur, risiko gangguan merugikan dapat diminimalisir, yang pada gilirannya akan menjaga kualitas layanan komunikasi, termasuk layanan yang vital seperti navigasi, siaran, dan komunikasi darurat. Selain itu, penanganan yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio yang sah, mendukung kepatuhan terhadap peraturan, serta memastikan bahwa pengguna frekuensi yang telah mendapatkan Izin Stasiun Radio (ISR) tetap terlindungi dari gangguan yang dapat merugikan operasi mereka. Dampaknya, ini akan memperkuat infrastruktur komunikasi secara keseluruhan, mendukung perkembangan teknologi, dan menjaga keselamatan serta kenyamanan masyarakat.

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan

Standar Nasional yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam peraturan Dirjen SDPPI Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dirjen SDPPI Tahun 2020-2024, Target indikator ini terdapat pada target Rencana Strategis Dirjen SDPPI Tahun 2020-2024 yaitu Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik dan pada Sasaran Program 3, pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Indikator Kinerja Sasaran Program	Target Rencana Strategis 2020-2024	Realisasi 2024
IKP 3.2 Persentase penanganan gangguan spektrum yang mengganggu komunikasi terkait keselamatan	100%	100%



d. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif Solusi

Indikator Kinerja Sasaran Program	Keberhasilan/Kegagalan
Indikator Kinerja Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota tahun 2024 telah mencapai angka maksimal yaitu tercapai 100% dari yang ditargetkan	BERHASIL

1. Faktor yang menyebabkan keberhasilan peningkatan kinerja :

- Sosialisasi yang efektif terkait penggunaan frekuensi radio dan peraturan-peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 dan Peraturan Kemenkominfo Nomor 9 Tahun 2023, juga memiliki peran penting. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengguna frekuensi radio mengenai kewajiban dan tanggung jawab, serta memperjelas sanksi yang dapat dikenakan bagi pelanggaran.
- Pelaksanaan penertiban yang tegas terhadap penggunaan frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi (APT) ilegal, turut memberikan efek jera yang penting dalam mencegah terjadinya gangguan spektrum frekuensi radio. Upaya penertiban ini berkontribusi dalam menjaga keteraturan dan kelancaran operasional jaringan komunikasi frekuensi radio yang ada.



2. Alternatif Solusi

- Menyusun kegiatan sosialisasi baik secara offline maupun online
- Menyusun kegiatan penertiban frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi melibatkan instansi terkait seperti Polri dan TNI

e. Faktor Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio sangat bergantung pada berbagai faktor pendukung yang saling terkait. Salah satu faktor penunjang sarana Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) yang memadai, yang memungkinkan pemantauan dan identifikasi gangguan dengan akurat serta respons cepat terhadap permasalahan yang timbul.

4. Indikator Kinerja Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi

a. Latar Belakang

Penggunaan spektrum frekuensi radio secara ilegal dapat menimbulkan gangguan atau interferensi berbahaya (harmful interference) terhadap penyelenggara komunikasi lain, terutama yang telah memiliki izin resmi. Selain itu, praktik ini berisiko mengancam keamanan serta dapat menyebabkan kerugian ekonomi akibat penggunaan perangkat komunikasi ilegal yang belum tersertifikasi.

Berdasarkan hasil pengawasan dan monitoring spektrum frekuensi radio di wilayah Nusa Tenggara Barat, ditemukan kasus penggunaan spektrum frekuensi radio secara ilegal yang melibatkan berbagai sektor, seperti Dinas Bergerak Darat, Dinas Tetap, Dinas Amatir, Dinas Maritim, hingga Dinas Siaran. Penyalahgunaan ini dapat mengganggu kelancaran komunikasi dan menimbulkan dampak negatif bagi pengguna yang sah. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dalam menjaga ketertiban dan keberlanjutan sistem komunikasi yang legal dan aman.



Sebagai langkah mitigasi, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas II Mataram secara rutin melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio. Upaya ini mencakup pengamatan, pemantauan, pemeriksaan, pengukuran, hingga pelaksanaan operasi penertiban terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio ilegal serta perangkat yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Melalui pengawasan yang ketat dan langkah-langkah penegakan hukum yang tegas, diharapkan penggunaan spektrum frekuensi radio dapat lebih tertib, aman, dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

b. Capaian Kinerja

Pada tahun 2024, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja dengan Indikator Kinerja berupa Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Alat/Perangkat Telekomunikasi, dengan target capaian sebesar 93%, yang terdiri dari dua komponen utama:

1. Penertiban frekuensi radio dengan pembobotan 60% dari total penilaian.

Perhitungan capaian kinerja penertiban frekuensi radio adalah data ilegal mengacu pada temuan spektrum frekuensi radio (SFR) yang berstatus ilegal selama kegiatan Penertiban Nasional (Tibnas) maupun penertiban skala regional yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi legal atau off air. Selama tahun 2024 jumlah data ilegal yang telah ditindaklanjuti menjadi legal/off air pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram sebanyak 212 tindakan dari total 212 temuan atau tercapai 100% dengan pembobotan 60% maka nilai capaian kinerja penertiban frekuensi radio adalah sebesar 60%.

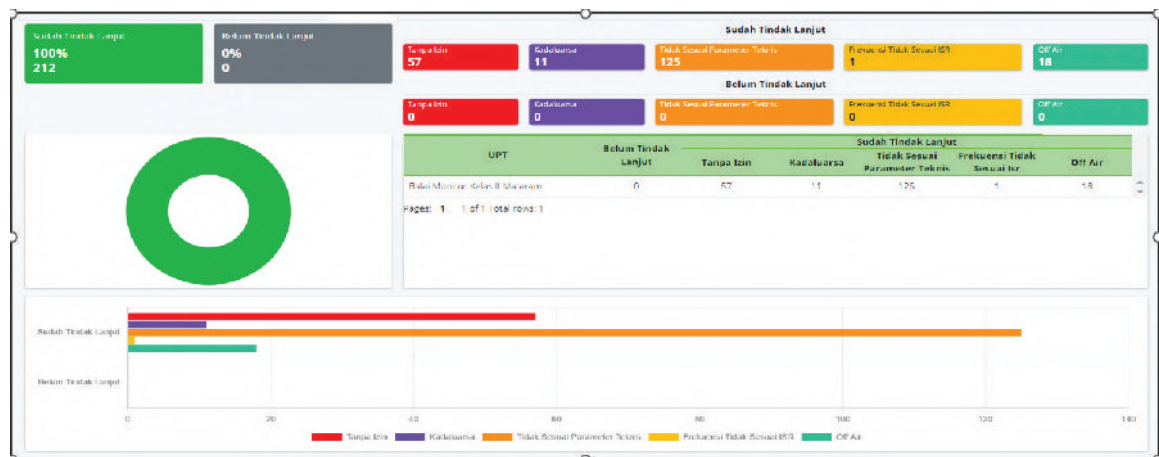
2. Penertiban Alat/Perangkat Telekomunikasi (Bobot 40% dari Total Penilaian).

Penertiban alat/perangkat telekomunikasi bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, terutama terkait perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikat atau beredar di luar ketentuan.

Berdasarkan hasil monitoring alat/perangkat telekomunikasi sepanjang tahun 2024, teridentifikasi sebanyak 141 perangkat yang termonitor, dengan rincian 98 perangkat bersertifikat dan 43 perangkat tidak bersertifikat. Seluruh perangkat yang tidak bersertifikat telah dilakukan tindakan penertiban melalui mekanisme surat teguran, surat pernyataan, serta penarikan perangkat dari peredaran. Dengan demikian, tingkat keberhasilan penertiban alat/perangkat telekomunikasi mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan bobot penilaian sebesar 40% dari total keseluruhan.



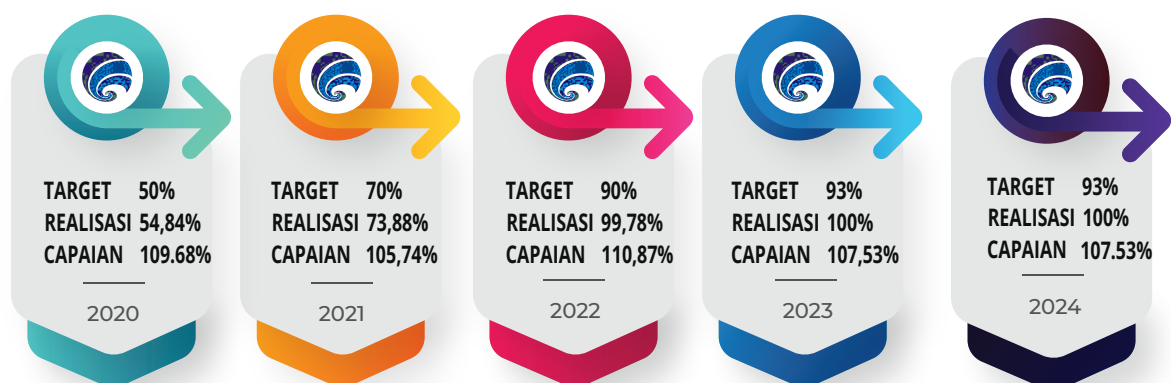
Berdasarkan pencapaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Persentase (%) Penertiban Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat telekomunikasi telah terlaksana 100% dari yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja sebesar 93% atau mencapai 107% yang diperoleh dengan melakukan tindakan lanjut data ilegal hasil penertiban frekuensi radio menjadi legal/off air dan melakukan tindakan lanjut data ilegal hasil penertiban alat/perangkat telekomunikasi. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan baik, baik dari segi cakupan penertiban frekuensi maupun penertiban alat/perangkat telekomunikasi.



Total Hasil Monitoring	TERTSERIFIKASI	TIDAK TERTSERIFIKASI	Tindak Lanjut Penertiban	KETERANGAN
141	98	43	43	Pengenaan surat teguran, surat pernyataan serta penarikan perangkat dari peredaran

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/perangkat Telekomunikasi



Capaian kinerja yang sangat baik dalam Indikator Kinerja Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/perangkat Telekomunikasi selama periode 2020–2024 memberikan dampak positif yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap berbagai aspek di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Beberapa dampak utama yang terlihat antara lain:

1. Meningkatkan Kualitas dan Keamanan Jaringan Telekomunikasi

Penertiban frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi ilegal dapat mengurangi interferensi berbahaya (*harmful interference*), sehingga kualitas layanan komunikasi meningkat dan jaringan menjadi lebih stabil serta aman.

2. Menjaga Kepatuhan terhadap Regulasi

Dengan adanya pengawasan dan tindakan tegas terhadap perangkat yang tidak bersertifikat, penyelenggara telekomunikasi dan masyarakat lebih patuh terhadap regulasi yang berlaku, sehingga tercipta ekosistem komunikasi yang tertib dan legal.

3. Mencegah Kerugian Ekonomi

Penggunaan perangkat ilegal yang tidak memenuhi standar dapat menyebabkan gangguan jaringan dan merugikan industri telekomunikasi serta pengguna layanan. Penertiban membantu mencegah potensi kerugian ekonomi akibat penggunaan perangkat yang tidak sah.

4. Melindungi Keselamatan dan Kepentingan Publik

Perangkat ilegal yang tidak sesuai standar teknis dapat memancarkan sinyal yang mengganggu frekuensi layanan penting seperti penerbangan, maritim, atau layanan darurat. Penertiban ini berkontribusi dalam menjaga keselamatan dan kepentingan publik.

5. Mendorong Penggunaan Perangkat Bersertifikat

Dengan adanya tindakan tegas terhadap perangkat ilegal, masyarakat dan pelaku industri semakin terdorong untuk menggunakan perangkat yang telah bersertifikasi dan memenuhi standar nasional maupun internasional.

6. Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Spektrum Frekuensi

Frekuensi radio merupakan sumber daya terbatas yang harus dikelola dengan optimal. Penertiban frekuensi ilegal memastikan penggunaan spektrum lebih efisien dan sesuai peruntukannya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pengguna yang sah.

7. Mendukung Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi

Dengan lingkungan komunikasi yang lebih tertib dan bebas gangguan, inovasi di sektor telekomunikasi dapat berkembang lebih cepat, mendukung transformasi digital, serta meningkatkan daya saing industri di era teknologi yang semakin maju.



c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Standar Nasional yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam peraturan Dirjen SDPPI Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dirjen SDPPI Tahun 2020–2024, Target indikator ini terdapat pada target Rencana strategis Dirjen SDPPI Tahun 2020–2024 yaitu Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik dan pada Sasaran Program 3. Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Indikator Kinerja Sasaran Program	Target Rencana Strategis 2020-2024	Realisasi 2024
IKP 3.3 Persentase layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	100%	107.53%

d. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif Solusi

Indikator Kinerja Sasaran Program	Keberhasilan/Kegagalan
Indikator Kinerja Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/perangkat Telekomunikasi tahun 2024 tercapai 107,53% dari yang ditargetkan	BERHASIL

1. Faktor yang menyebabkan keberhasilan peningkatan kinerja

- Kolaborasi yang optimal antara pihak yang terlibat, seperti aparat penegak hukum seperti Polri serta instansi terkait lainnya.
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam pelaksanaan tugas monitoring dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio.
- Sarana SMFR yang memadai yang digunakan oleh SDM yang kompeten memberikan hasil yang optimal, sehingga meningkatkan efektivitas pencapaian target.
- Pelaksanaan sosialisasi terkait penggunaan spektrum frekuensi radio pada Skala Regional dan Nasional oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Ditjen SDPPI, dengan melibatkan audiens dari berbagai instansi.

2. Alternatif Solusi

- Koordinasi yang intens dengan pihak terkait sehingga tercipta kolaborasi yang maksimal.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis.
- Menyusun kegiatan sosialisasi terkait penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi



e. Faktor Penunjang Keberhasilan

1. Faktor yang menyebabkan keberhasilan peningkatan kinerja

- Peraturan dan kebijakan yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak.
- Ketersediaan sumber daya yang memadai mulai dari kualitas SDM, perangkat, serta anggaran demi meningkatkan efektivitas penertiban.
- Sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran spektrum frekuensi radio ilegal dapat memberikan pesan jelas tentang konsekuensi dari penggunaan frekuensi ilegal, serta
- Sosialisasi regulasi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/perangkat Telekomunikasi, sehingga perlu dilakukan Sosialisasi pada Skala Regional dan Nasional oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Ditjen SDPPI, dengan melibatkan audiens dari berbagai instansi.

5. Indikator Kinerja Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

a. Latar Belakang

Untuk mendukung pengelolaan spektrum frekuensi radio yang optimal, efektif, dan efisien, serta meminimalkan penggunaan frekuensi ilegal yang berpotensi menimbulkan interferensi berbahaya (harmful interference), Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Mataram telah dilengkapi dengan sarana pengawasan yang memadai. Sarana ini mencakup infrastruktur sistem perangkat monitoring, sumber daya manusia (SDM), serta biaya operasional dan pemeliharaan yang mendukung kelancaran pengelolaan spektrum. Balmon Mataram memiliki Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) yang terdiri dari stasiun monitor tetap/transportable, stasiun monitor bergerak, dan stasiun monitor jinjing (portable). Perangkat utama meliputi stasiun monitor tetap di beberapa lokasi strategis seperti Mataram, Batulayar, Narmada, Praya, Sumbawa Besar, dan Sila (Bima), serta stasiun monitor bergerak SMFR Tipe 2. Selain itu, perangkat pendukung juga tersedia untuk memperkuat fungsi pemantauan spektrum frekuensi radio.



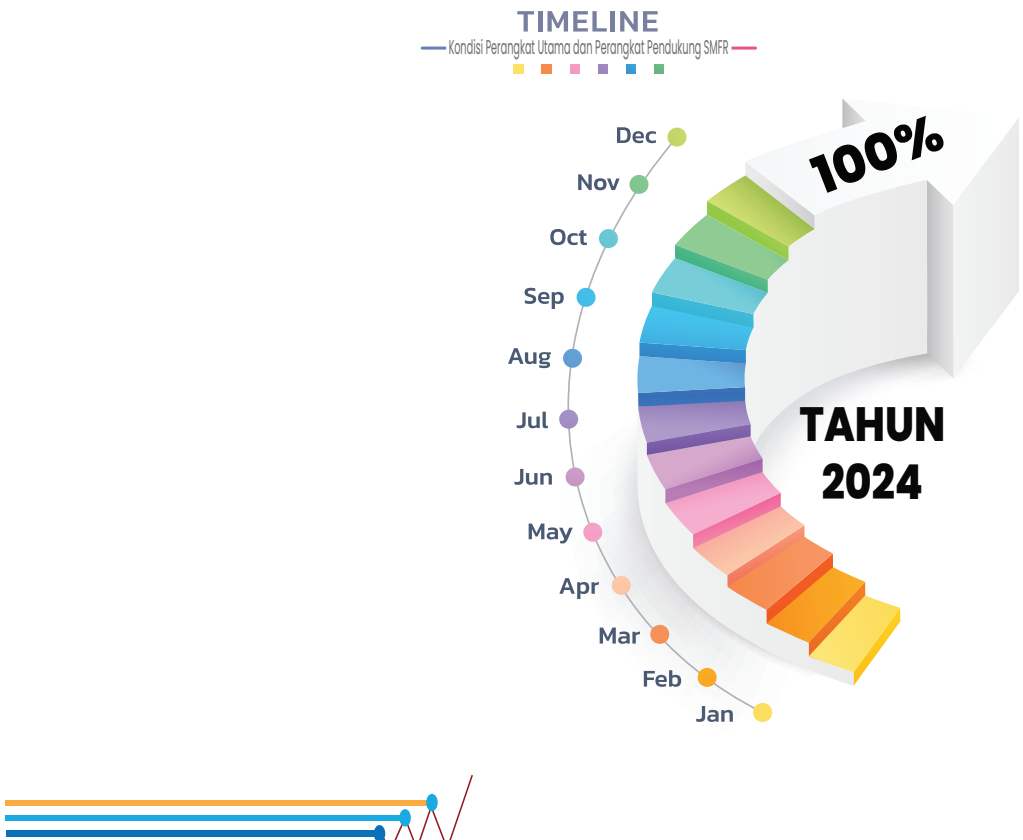
Berfungsinya perangkat SMFR menjadi indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Balmon Mataram Tahun 2024, guna memastikan perangkat selalu terawat dan berfungsi optimal guna pencapaian sasaran kinerja, sehingga pengelolaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja UPT dapat berjalan secara efektif dan efisien.

b. Capaian Kinerja

Untuk tahun 2024, Balmon Mataram menetapkan sasaran kinerja berupa berfungsinya perangkat pendukung Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) dan alat monitoring/ukur sebesar 95%. Capaian kinerja ini memerlukan rutinitas kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat pendukung SMFR serta alat monitoring/ukur secara berkala dan terencana. Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan ini bertujuan untuk memastikan perangkat selalu dalam kondisi optimal, mendukung kelancaran operasional Balmon Mataram.

Tabel Kondisi Perangkat Utama dan Perangkat Pendukung SMFR Balmon Mataram Tahun

BULAN	JENIS PERANGKAT	CAPAIAN
JANUARI	100%	100%
FEBRUARI	100%	100%
MARET	100%	100%
APRIL	100%	100%
MEI	100%	100%
JUNI	100%	100%
JULI	100%	100%
AGUSTUS	100%	100%
SEPTEMBER	100%	100%
OKTOBER	100%	100%
NOVEMBER	100%	100%
DESEMBER	100%	100%



Tabel Monitoring Perbaikan Perangkat SMFR Transportable Tahun 2024

NO	KEGIATAN	BULAN	NAMA/ PERANGKAT	DIAGNOSA	TINDAKAN	KETERANGAN	PELAKSANA
1.	Optimalisasi dan Pemeliharaan Site LS Praya		Antena/ Triplexer	Penerimaan kurang masikmal	Optimalisasi dengan menambah antena dan Triplexer	Sensitifitas meningkat 5 - 8 dB	
2.	Perbaikan Site TCI Mataram	Desember	Site Asrama Haji Mataram	Perangkat Mati dan tidak dapat beroperasi	Perbaikan Power System dan RMU	Perangkat berfungsi kembali	
3.	Perbaikan Site LS Sumbawa	April	RMU LS	Koneksi dari CC terputus	Instalasi LAN Device	Koneksi CC Kembali Normal	
4.	Perbaikan Site LS Sumbawa	Juni	Mikrotik Router	Serangan Brute force Pada Mikrotik	Penambahan rules di Firewall	Koneksi CC Kembali Normal	
5.	Perbaikan Site TCI Batulayar	Maret	Mikrotik LHG 5 RBLHG-5nD	Optimalisasi koneksi Internet	Instalasi Antena Link	Peningkatan Bandwith Internet	
6.	Perbaikan Site TCI Narmada	November	Regulator TCI	Optimalisasi koneksi Internet	Kerusakan Regulator	Menunggu Jadwal Vendor	
7.	Perbaikan Site LS Bima	Desember	Kamera CCTV	Kerusakan Lensa optic	Perbaikan/Replace	CCTV Kembali Bisa diakses	
8.	Perbaikan HDD DVR LS Bima	Juli	Harddisk DVR	Kerusakan HDD	Perbaikan/Replace	Playback Bisa Diakses	

Tabel Daftar Perbaikan/Pemeliharaan Perangkat SMFR dan Alat Monitoring/Ukur Tahun 2024

BULAN	JENIS ALAT / PERANGKAT	PEKERJAAN/PEMELIHARAA
Juli	Portable Receiver R&S PR100	Penggantian Chasing
Juli	Portable Receiver R&S DDF 007	Penggantian Pin AUX
Desember	Antena Horn ETS Lingrend	Perbaikan
Desember	DDF007	Penggantian Chasing
Desember	Antena R&S HE400	Perbaikan Kabel Data
Desember	Antena R&S ADD107	Perbaikan Kabel Data

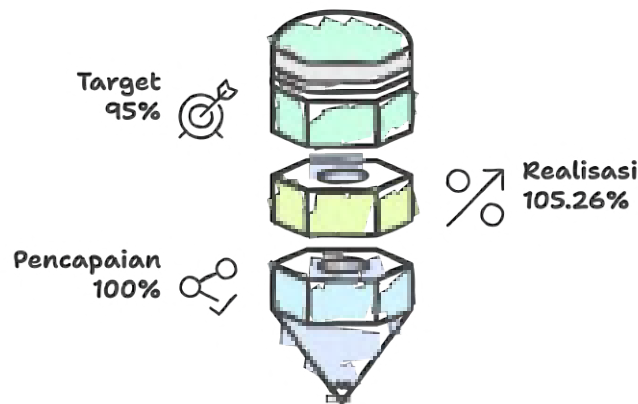
Tabel Kondisi Operasional Perangkat SMFR Transportable Tahun 2024

SITE	ON(%)	OFF(%)
SITE MATARAM	76.6%	23.4%
SITE BATU	97.1%	2.9%
SITE NARMADA	76.4%	23.6%
SITE PRAYA	91%	9%
SITE SUMBAWA BESAR	99.4%	0.6%
SITE SILA BIMA	99%	1%



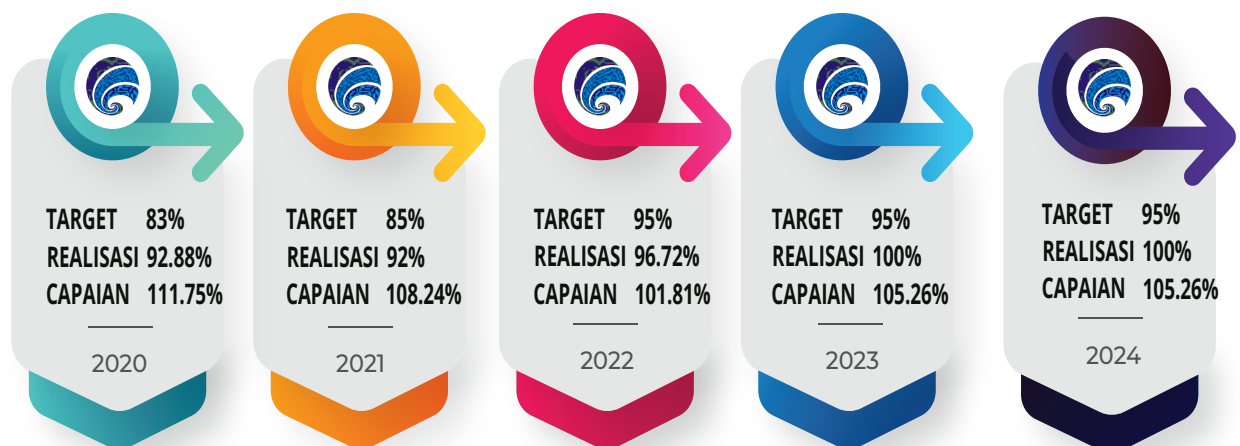
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT



Capaian Kinerja Renstra Balmon Mataram Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT Tahun 2020-2024



Capaian kinerja yang sangat baik dalam Indikator Kinerja Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT selama periode 2020-2024 memberikan dampak positif yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap berbagai aspek di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Beberapa dampak utama yang terlihat antara lain:

1. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Spektrum Frekuensi

Perangkat yang berfungsi optimal memungkinkan pemantauan spektrum frekuensi yang lebih akurat, real-time, dan menyeluruh, sehingga deteksi penggunaan frekuensi ilegal dan interferensi dapat dilakukan dengan cepat.



2. Meminimalkan Gangguan (Harmful Interference)

Dengan perangkat yang selalu terawat dan berfungsi baik, identifikasi dan penanganan gangguan frekuensi dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga kualitas komunikasi tetap stabil dan bebas dari gangguan.

3. Mendukung Kepatuhan terhadap Regulasi

Monitoring yang lebih baik mendorong pengguna frekuensi untuk lebih patuh terhadap regulasi, mengurangi penggunaan spektrum ilegal, dan meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan spektrum.

4. Meningkatkan Keandalan Sistem Telekomunikasi

Pengelolaan spektrum yang lebih tertib dan minim gangguan berkontribusi terhadap keandalan jaringan telekomunikasi, baik untuk layanan publik, komunikasi darurat, maupun industri strategis.

5. Mempercepat Respons terhadap Gangguan

Perangkat yang berfungsi dengan baik memungkinkan tim pengawasan merespons dan menindaklanjuti laporan gangguan dengan lebih cepat dan tepat, sehingga dampak negatif terhadap layanan komunikasi dapat diminimalkan.

6. Mendukung Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Frekuensi

Penggunaan spektrum yang lebih tertib dan terstruktur memastikan bahwa sumber daya frekuensi dikelola secara optimal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pengguna yang sah tanpa terjadi penyalahgunaan.

7. Meningkatkan Capaian Kinerja Balmon Mataram

Tercapainya indikator kinerja ini mencerminkan profesionalisme dan efektivitas Balmon Mataram dalam menjalankan tugasnya, sekaligus memperkuat perannya dalam menjaga keteraturan penggunaan spektrum frekuensi radio.

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Standar Nasional yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam peraturan Dirjen SDPPI Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dirjen SDPPI Tahun 2020–2024, Target indikator ini terdapat pada target Rencana strategis Dirjen SDPPI Tahun 2020–2024 yaitu Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik dan pada Sasaran Program 3. Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik

Indikator Kinerja Sasaran Program	Target Rencana Strategis 2020-2024	Realisasi 2024
IKP 3.3 Persentase layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	100%	105.26%

Indikator Kinerja Sasaran Program	Keberhasilan/Kegagalan
Indikator Kinerja Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT tahun 2024 telah tercapai 105.26% dari yang ditargetkan	BERHASIL



e. Faktor Penunjang Keberhasilan

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam pelaksanaan tugas inspeksi kondisi perangkat monitoring secara berkala
2. Kegiatan preventif maintenance secara berkala guna memastikan operasional perangkat SMFR berfungsi optimal
3. Telah dilakukan kerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk memastikan koneksi internet tetap stabil

6. Indikator Kinerja Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT**a. Latar Belakang**

Amatir Radio adalah kegiatan komunikasi dan pengembangan diri yang dilakukan oleh individu berlisensi sesuai regulasi yang berlaku. Untuk dapat berpartisipasi, seseorang harus memiliki Izin Amatir Radio (IAR), yang memungkinkan penggunaan frekuensi radio tertentu berdasarkan tingkatan dan ketentuan teknis yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, aman, dan sesuai peraturan. Pada tahun 2024, Balmon Mataram menargetkan pelaksanaan dua jenis Ujian Nasional Amatir Radio (UNAR), yaitu UNAR CAT Reguler dan UNAR Non-Reguler.

- UNAR CAT Reguler dilaksanakan setiap bulan sepanjang tahun dengan jumlah peserta terbatas, menyesuaikan kapasitas perangkat komputer yang tersedia.
- UNAR Non-Reguler diadakan berdasarkan permintaan Organisasi Amatir Radio Lokal di daerah tertentu, dengan frekuensi pelaksanaan yang lebih fleksibel.

Melalui kedua skema ini, diharapkan semakin banyak penggiat amatir radio yang dapat mengikuti ujian, memperoleh lisensi, serta turut berkontribusi dalam pengembangan komunitas amatir radio di Indonesia.

b. Capaian Kinerja

Indikator kinerja persentase (%) peserta ujian negara amatir radio berbasis CAT ditargetkan sebesar 100% sesuai perjanjian kinerja (PK) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram Tahun 2024 dengan sample 50% dari capaian tahun sebelumnya atau 150 peserta.

Untuk mencapai target kinerja ini, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram telah melaksanakan Ujian Nasional Amatir Radio (UNAR) berbasis Computer Assisted Test (CAT) secara reguler dan non-reguler. Sepanjang tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram telah berhasil menyelenggarakan UNAR berbasis CAT sebanyak 11 kali, dengan total jumlah peserta ujian mencapai 342 orang atau mencapai 228% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya maksimal Balai Monitor Mataram dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ujian.

1. Meningkatkan Jumlah Amatir Radio Berlisensi

Pencapaian target UNAR memastikan lebih banyak individu memperoleh Izin Amatir Radio (IAR), sehingga semakin banyak pengguna frekuensi yang terampil, legal, dan sesuai regulasi.



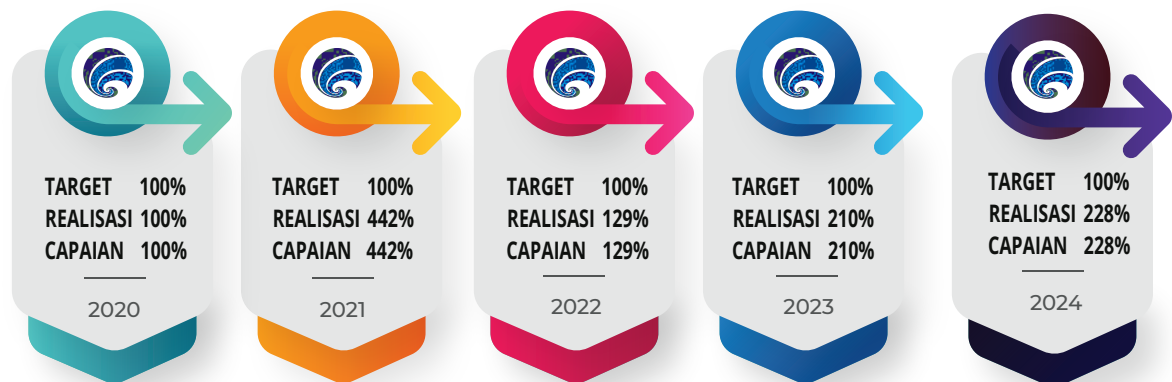
Tabel Daftar Peserta UNAR

NO	Lokasi Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan	JUMLAH PESERTA				LULUS				TIDAK LULUS			
			YD	YC	YB	JML	YD	YC	YB	JML	YD	YC	YB	JML
1	Lombok Timur	28 Januari 2024	22	0	0	22	18	0	0	18	4	0	0	4
2	Mataram	26 Februari 2024	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0
3	Mataram	28 Maret 2024	2	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1
4	Mataram	18 April 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Lombok Tengah	02 Juni 2024	98	4	0	102	77	4	0	81	21	0	0	21
6	Lombok Tengah	23 Juni 2024	24	0	0	24	21	0	0	21	3	0	0	3
7	Lombok Timur	18 Agustus 2024	20	0	0	20	15	0	0	15	5	0	0	5
8	Sumbawa	25 Agustus 2024	111	4	0	115	85	4	0	89	26	0	0	26
9	Lombok Barat	13 Oktober 2024	17	2	0	19	17	2	0	19	0	0	0	0
10	Lombok Tengah	24 November 2024	12	2	0	14	11	2	0	13	1	0	0	1
11	Lombok Timur	15 Desember 2024	20	0	0	20	19	0	0	19	1	0	0	1
JUMLAH			330	12	0	342	268	12	0	280	62	0	0	62

Total peserta UNAR CAT secara keseluruhan adalah sebanyak 342 peserta dimana target yang direncanakan adalah sebanyak 150 peserta, sehingga capaian pelaksanaan UNAR berbasis CAT berdasarkan jumlah peserta adalah sebesar 228%.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT Tahun 2020–2024



Capaian kinerja yang sangat baik dalam Indikator Kinerja Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT selama periode 2020–2024 memberikan dampak positif yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap berbagai aspek di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Beberapa dampak utama yang terlihat antara lain:

1. Meningkatkan Jumlah Amatir Radio Berlisensi
Pencapaian target UNAR memastikan lebih banyak individu memperoleh Izin Amatir Radio (IAR), sehingga semakin banyak pengguna frekuensi yang terampil, legal, dan sesuai regulasi.



2. Menjaga Ketertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Dengan semakin banyaknya amatir radio yang memiliki lisensi, penggunaan spektrum frekuensi radio menjadi lebih tertib, aman, dan sesuai ketentuan, mengurangi risiko interferensi atau penyalahgunaan frekuensi.

3 Mendorong Pengembangan Komunitas Amatir Radio

UNAR yang berhasil dilaksanakan akan memperluas komunitas amatir radio di berbagai daerah, mendorong kolaborasi, pertukaran pengetahuan, serta pengembangan teknologi komunikasi berbasis radio.

4 Meningkatkan Kesiapan dalam Keadaan Darurat

Amatir radio sering berperan penting dalam situasi bencana atau keadaan darurat sebagai komunikasi cadangan. Dengan bertambahnya jumlah amatir radio yang tersertifikasi, maka kapasitas komunikasi darurat juga semakin meningkat.

5 Mendukung Inovasi dan Eksperimen Teknologi Radio

Dengan memiliki izin resmi, amatir radio dapat melakukan eksperimen teknologi komunikasi, mendorong inovasi dalam pengembangan perangkat dan teknik komunikasi berbasis radio.

6 Memperluas Akses dan Kesempatan bagi Masyarakat

Pelaksanaan UNAR, baik reguler maupun non-reguler, memberikan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat dari berbagai wilayah untuk mengikuti ujian, mendapatkan lisensi, dan berkontribusi dalam dunia amatir radio.

7 Meningkatkan Capaian Kinerja Balmon Mataram

Keberhasilan dalam mencapai target UNAR mencerminkan efektivitas Balmon Mataram dalam melaksanakan tugasnya, memperkuat perannya dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio, serta meningkatkan pelayanan publik di sektor telekomunikasi.

c Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Standar Nasional yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam peraturan Dirjen SDPPI Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dirjen SDPPI Tahun 2020-2024, Target indikator ini terdapat pada target Rencana strategis Dirjen SDPPI Tahun 2020-2024 yaitu Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik dan pada Sasaran Program 3. Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik,

Indikator Kinerja Sasaran Program	Target Rencana Strategis 2020-2024	Realisasi 2024
IKP 3.3 Persentase layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	100%	228%

d. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Sasaran Program	Keberhasilan/Kegagalan
Indikator Kinerja Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT tahun 2024 tahun 2024 telah tercapai 228% dari yang ditargetkan	BERHASIL



1. Faktor yang menyebabkan keberhasilan peningkatan kinerja

Faktor Keberhasilan dalam pencapaian target pelaksanaan UNAR sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dan kerja sama yang baik antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mataram dengan Organisasi Amatir Radio Daerah dan Lokal. Kerja sama ini mencakup proses penjangkaran calon peserta UNAR serta dukungan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti fasilitas PC/Laptop dan jaringan internet.

2. Alternatif Solusi

Koordinasi yang intens antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mataram dengan Organisasi Amatir Radio baik di tingkat ORDA maupun di tingkat ORLOK.

e. Faktor Penunjang Keberhasilan

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian target pelaksanaan UNAR adalah dukungan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti fasilitas PC/Laptop dan jaringan internet.

7. Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koodinasi Pelimpahan ke KPKNL

a. Latar Belakang

Indikator kinerja penanganan tagihan dan piutang BHP (Biaya Hak Penggunaan) frekuensi radio memiliki target realisasi sebesar 100% dari target piutang di UPT tahun 2024 dan target koordinasi pelimpahan KPKNL tahun 2024. Dengan telah diterapkannya e-licensing dan penerapan tanda tangan digital dalam perizinan spektrum frekuensi radio maka klien/para pengguna frekuensi radio yang sudah memiliki akun e-licensing akan menerima SPP BHP frekuensi radio dan ISR melalui email dan atau situs aplikasi billing-isr.postel.go.id sehingga Balmon Mataram tidak lagi berkewajiban untuk mengirimkan SPP dan salinan ISR kepada mereka, tetapi Balmon Mataram tetap melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pembayaran SPP dimaksud.

Dalam rangka mengurangi atau mencegah timbulnya piutang BHP frekuensi, petugas Balmon Mataram menghubungi klien (pihak perusahaan atau instansi pemerintah) melalui telepon maupun mengirimkan tagihan SPP BHP melalui media whatsapp untuk mengingatkan batas jatuh tempo pembayaran SPP BHP frekuensi, Jika SPP BHP belum dibayar dan telah terbit Surat Peringatan (SP) 1/2/3 dan SP terakhir maka petugas akan mengunjungi klien tersebut ataupun menghubungi via media telepon, whatsapp, dan media lainnya untuk mengkonfirmasi penyelesaian pembayaran BHP tersebut.

b. Capain Kinerja

Sepanjang tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram telah melaksanakan distribusi SPP dan penanganan piutang dengan menghubungi sebanyak 337 dari total target 337. Upaya penanganan ini dilakukan melalui berbagai media komunikasi serta kunjungan langsung kepada debitur untuk memastikan penyelesaian piutang yang ada.



Dalam hal koordinasi pelimpahan ke KPKNL, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram telah melakukan koordinasi terkait pelimpahan sisa piutang dari tahun sebelumnya yang belum dibayarkan. Dari total tiga piutang yang dikoordinasikan, dua piutang telah berhasil dibayarkan, sementara satu piutang lainnya masih dalam proses koordinasi dengan KPKNL untuk penyelesaian lebih lanjut.

Dengan langkah-langkah yang telah diambil ini, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan, sehingga dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel rekapitulasi pendistribusian SPP BHP frekuensi selama tahun 2024 sebagai berikut:

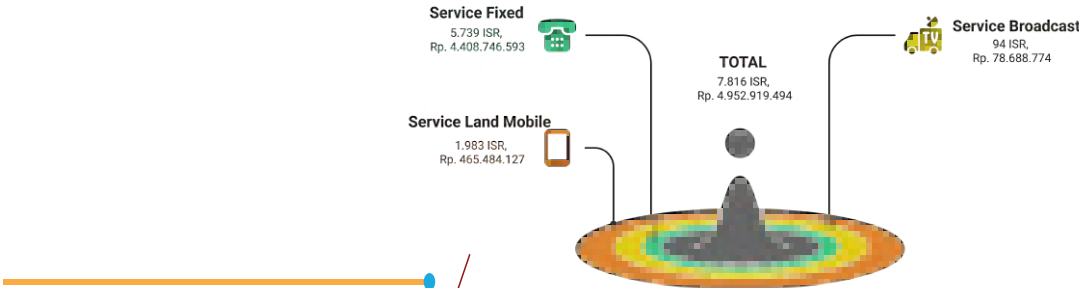
Tabel Rokapitulasi Pendistribusian SPP, ST dan ISR UPT

BULAN	SPP	Jumlah Penerbitan Tagihan BHP					Jumlah Penanganan Piutang Dihubungi		
		ST-1	ST-2	ST-3	ST-T	Total	lewat media	datang langsung	Total
JANUARI	22	6	2	1	4	35	35	-	35
FEBRUARI	14	3	1	1	4	23	23	-	23
MARET	12	6	2	-	4	24	23	1	24
APRIL	11	3	4	2	4	24	24	-	24
MEI	10	2	-	1	4	17	17	-	17
JUNI	18	6	1	1	4	29	27		29
JULI	20	3	1	1	3	27	27	-	27
AGUSTUS	26	8	1	1	3	39	36	3	39
SEPTEMBER	25	3	4	-	3	35	35	-	35
OKTOBER	15	6	1	-	2	24	22	2	24
NOVEMBER	17	7	3	1	2	30	25	5	30
DESEMBER	25	3	1	-	1	30	30	-	30
JUMLAH	215	56	21	7	38	337	324	13	337

Tabel Rekapitulasi Jumlah SPP Terbayar

NO	BULAN	TARGET BULANAN			REALISASI TERBAYAR		
		SPP	ST	ISR	SPP	ST	ISR
1	JANUARI	24	13	18	10	0	18
2	FEBRUARI	20	13	15	6	3	15
3	MARET	7	8	6	3	0	6
4	APRIL	20	13	8	6	6	8
5	MEI	11	4	15	2	0	15
6	JUNI	11	8	0	1	2	0
7	JULI	20	7	13	7	1	13
8	AGUSTUS	27	11	15	11	3	15
9	SEPTEMBER	21	9	11	10	0	11
10	OKTOBER	28	10	31	12	1	31
11	NOVEMBER	21	13	18	10	5	18
12	DESEMBER	35	5	25	12	0	25
Jumlah		245	114	175	90	21	175

Grafik Nilai BHP Frekuensi Radio Untuk Broadcast dan Land Mobile



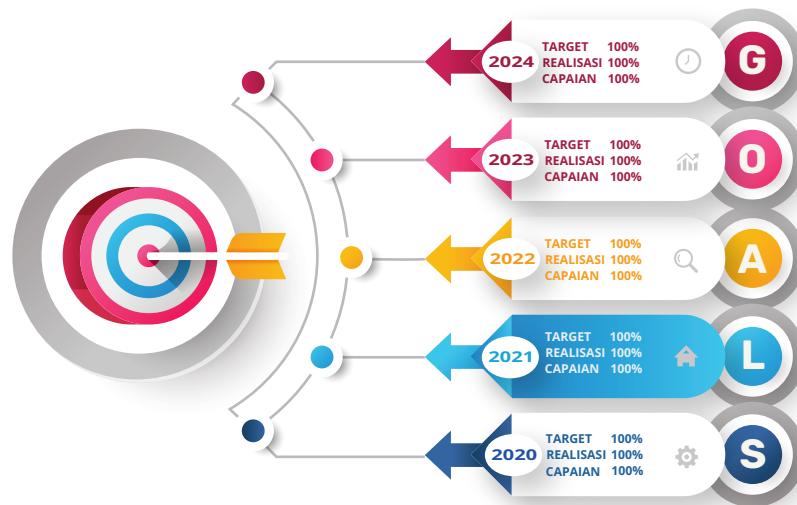
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL



Capaian Kinerja Renstra Balmon Mataram Tahun 2020–2024 (Perbandingan Realisasi

Indikator Kinerja Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKN Tahun 2020–2024



Capaian kinerja yang sangat baik dalam Indikator Kinerja Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKN selama periode 2020–2024 memberikan dampak positif yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap berbagai aspek di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Beberapa dampak utama yang terlihat antara lain:

a. Meningkatkan Penerimaan Negara

Penyelesaian piutang yang efektif berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara, memastikan bahwa dana yang tertagih dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan layanan publik.

b. Memperbaiki Tata Kelola Keuangan

Pengelolaan piutang yang baik mencerminkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan kredibilitas instansi dalam mengelola keuangan negara atau daerah.

c. Mengurangi Risiko Kerugian Keuangan

Dengan penanganan yang tepat, jumlah piutang tak tertagih dapat diminimalkan, mengurangi potensi kerugian finansial yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan organisasi.



d. Meningkatkan Kepatuhan dan Disiplin Wajib Bayar

Tindakan penagihan yang konsisten dan tegas mendorong peningkatan kepatuhan wajib bayar, baik individu maupun badan usaha, sehingga mencegah terjadinya tunggakan di masa mendatang.

e. Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Anggaran

Dana yang berhasil tertagih dapat dialokasikan kembali untuk kebutuhan operasional yang lebih produktif, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran instansi.

f. Mendukung Stabilitas dan Keberlanjutan Operasional

Dengan berkurangnya beban piutang, instansi memiliki stabilitas finansial yang lebih baik, memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan program kerja berjalan lebih optimal.

g. Meningkatkan Capaian Kinerja Instansi

Pencapaian target dalam penanganan piutang mencerminkan keberhasilan instansi dalam menjalankan tugasnya, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang bersangkutan.

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Standar Nasional yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam peraturan Dirjen SDPPI Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dirjen SDPPI Tahun 2020-2024, Target indikator ini terdapat pada target Rencana strategis Dirjen SDPPI Tahun 2020-2024 yaitu Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik dan pada Sasaran Program 3. Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Indikator Kinerja Sasaran Program	Target Rencana Strategis 2020-2024	Realisasi 2024
IKP 3.3 Persentase layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	100%	228%

d. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Sasaran Program	Keberhasilan/Kegagalan
Indikator Kinerja Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKN tahun 2024 tahun 2024 telah tercapai 100% dari yang ditargetkan	BERHASIL

1. Faktor yang menyebabkan keberhasilan peningkatan kinerja :

- Kolaborasi yang optimal dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan klien
- Konsistensi dalam distribusi dengan Strategi Distribusi yang Beragam



2. Alternatif Solusi

- Intens koordinasi antara Unit Pelaksana Teknis (UPT), Ditjen SDPPI dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan komunikasi klien
- Mendata SPP BHP Frekuensi Radio secara berkala dan mendistribusikannya.

e. Faktor Penunjang Keberhasilan

- Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten yang dimiliki
- Pemantauan dan Evaluasi Rutin, dimana Balmon Mataram secara konsisten melakukan pemantauan dan evaluasi distribusi tagihan untuk mengidentifikasi masalah secara dini dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan.

8. Indikator Kinerja Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan

a. Latar Belakang

Balmon Mataram berkomitmen memberikan layanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel, terutama dalam izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Sertifikasi Operator Radio (SOR). Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 dan PP No. 96 Tahun 2012, penyelenggaraan layanan ini harus melibatkan masyarakat agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan, Balmon Mataram secara rutin melaksanakan Sosialisasi Pelayanan Publik. Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat

Memberikan edukasi tentang regulasi penggunaan frekuensi radio, prosedur perizinan, serta pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

2. Mendorong Penggunaan Frekuensi yang Legal

Mengurangi pelanggaran dan gangguan akibat penggunaan spektrum secara ilegal atau tidak sesuai ketentuan.

3. Meningkatkan Partisipasi Publik

Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan masukan guna meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola spektrum frekuensi radio.

Untuk mengukur efektivitas layanan, Balmon Mataram juga melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Integritas Pelayanan Publik (IPP). Hasil survei ini menjadi dasar perbaikan layanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui sosialisasi dan survei ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya penggunaan frekuensi radio yang tertib dan sesuai regulasi, sehingga tercipta ekosistem komunikasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan.



b. Capaian Kinerja

Pada tahun 2024, Balmon Mataram telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP) sebanyak empat kali, yang masing-masing dilakukan pada setiap triwulan. Survei ini dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi Survei Pelayanan Publik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PAN RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat. Berikut adalah analisis capaian kinerja berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan.

Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survei IKM pada tahun 2024 menunjukkan nilai rata-rata yang memuaskan di setiap indikator pelayanan publik.

Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas dengan kualitas layanan yang diberikan oleh Balmon Mataram, dengan nilai IKM yang konsisten berada di atas ambang batas minimal 3,2, yang berarti capaian ini memenuhi kriteria "100%" berdasarkan standar capaian IKM yang telah ditetapkan.

Tabel Capaian Survei IKM 2024

No	Indikator	Jumlah Nilai Rata-Rata Per Unsur			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Persyaratan	3,77	3,87	3,87	3,86
2	Sistem, prosedur dan mekanisme	3,65	3,83	3,87	3,82
3	Waktu Penyelesaian	3,74	3,83	3,83	3,84
4	Tarif/Biaya	3,79	3,87	3,83	3,82
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,74	3,87	3,87	3,84
6	Kompetensi/kemampuan Pelaksana	3,82	3,87	3,80	3,82
7	Perilaku Pelaksana	3,88	3,87	3,87	3,90
8	Sarana dan Prasarana	3,79	3,90	3,80	3,86
9	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,82	3,87	3,87	3,84
Nilai Indeks Kepuasan masyarakat		3,78	3,84	3,84	3,84

Hasil Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP)

Survei IIPP untuk mengukur sejauh mana pelayanan publik yang diberikan oleh Balmon Mataram bebas dari praktik-praktik yang merugikan atau tidak etis, seperti pungutan liar, calo, dan diskriminasi. Hasil survei IIPP pada tahun 2024 menunjukkan nilai rata-rata yang juga cukup baik konsisten berada di atas ambang batas minimal 3,2, yang berarti capaian ini memenuhi kriteria "100%" berdasarkan standar capaian IIPP yang telah ditetapkan.



Tabel Capaian Survei IIPP 2024

NO	BULAN	Jumlah Nilai Rata-Rata Per Unsur			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Diskriminasi Pelayanan	3.80	3.87	3.84	3.85
2	Pelayanan Diluar Prosedur	3.80	3.89	3.71	3.78
3	Penerimaan Imbalan	3.96	3.93	3.87	3.89
4	Percaloan/Perantara Tidak Resmi	3.88	3.93	3.84	3.89
5	Pungutan Liar (Pungli)	3.90	3.87	3.87	3.92
Nilai Indeks Integritas Pelayanan Publik		3.87	3.90	3.83	3.87

NO	WAKTU PELAKSANAAN	Jumlah Responden (Minimal 30 Responden)				Hasil Survey		Nilai Capaian Survey (%) (Merefer ke PK)
		SFR	SOR	MITRA	TOTAL	IKM (SKALA 4)	IIPP (SKALA 4)	
1	Triwulan I	32	2	0	34	3.78	3.87	100%
2	Triwulan II	28	2	0	30	3.84	3.90	100%
3	Triwulan III	27	3	0	30	3.84	3.83	100%
4	Triwulan IV	45	4	0	49	3.84	3.87	100%
JUMLAH		132	11	0	143			

Keterangan

1. Jika hasil IKM diatas 3.2 dan IIPP di atas 3.6 maka capaian 100%
2. Jika Hasil IKM dibawah 3.2 dan IIPP sama dengan atau diatas 3.6 maka capaian 75%
3. Jika Hasil IKM diatas atau sama dengan 3.2 dan IIPP dibawah 3.6 maka capaian 75%
4. Jika Hasil IKM dibawah 3.2 dan IIPP dibawah 3.6 Maka capaian 50%

Sosialisasi Pelayanan Publik

Pada tahun 2024, Balmon Mataram melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi serta pengenalan sanksi administrasi sebanyak enam kali di berbagai wilayah di Provinsi NTB. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan pengenalan denda administrasi sesuai dengan PP No. 43 Tahun 2023 dan PM Kominfo No. 9 Tahun 2023, serta untuk memperkenalkan pembangunan Zona Integritas Balmon Mataram. Sosialisasi ini juga menyasar berbagai pihak terkait, seperti pengguna frekuensi radio, penyelenggara ISP, perusahaan swasta/BUMN/BUMD, dan penjual perangkat telekomunikasi di wilayah masing-masing.

NO	LOKASI PELAKSANAAN	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA	KETERANGAN
1.	KOTA MATARAM	Februari dan April	73	Peserta pengguna frekuensi di kota Mataram
2.	KAB. LOMBOK UTARA	April	60	Peserta pengguna frekuensi di Kab. Lombok Utara
3.	KAB. LOMBOK TIMUR	Mei	79	Peserta pengguna frekuensi dari Kab. Lotim, Kab. Loteng dan Kota Mataram
4.	KAB. LOMBOK TENGAH	Agustus	60	Peserta pengguna frekuensi dari Kab. Sumbawa Barat, Kab. Loteng dan Kota Mataram
5.	KAB. SUMBAWA	Oktober	103	Peserta pengguna frekuensi dari 5 kabupaten/kota di Pulau Sumbawa



Selain kegiatan sosialisasi langsung, Balmon Mataram juga melakukan sosialisasi melalui media elektronik, seperti iklan layanan masyarakat di radio siaran dan pemasangan baliho sebagai upaya untuk memperluas jangkauan informasi terkait penggunaan spektrum frekuensi radio dan penerapan peraturan yang berlaku.

No	Target Wilayah Sosialisasi		Jumlah Kehadiran			(%) Capaian (merefere ke KP)	Nilai Sosialisasi (merefere ke KP)
	Kab/Kota	50% Wilayah Kab/Kota	Peserta (30 Peserta)	Jumlah Wilayah	Kab/Kota		
1	10	5	212	4	Mataram, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Tengah dan Kab. Lombok Timur	80	100%
2	10	5	163	5	Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Dompu, Kab. Bima dan Kota Bima	100	

Berdasarkan uraian dan data di atas maka dapat di simpulkan bahwa Indikator Kinerja Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Pubilik dan Survey Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 140% atau melampaui target yang telah ditetapkan.

Total Capaian Idikator Kinerja Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Pubilik dan Survey Kepuasan Masyarakat adalah 140%

Rumus Capaian :

$$\text{Rumus Capaian : } \frac{\text{Capaian 1} + \text{Capaian 2}}{2} \times 100\%$$

$$\text{Rumus Capaian : } \frac{100 + 180}{2} \times 100\% = 140.5\%$$

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Pubilik dan Survey Kepuasan Masyarakat



Capaian Kinerja Renstra Balmon Mataram Tahun 2020–2024 (Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja)

Indikator Kinerja Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan



Capaian kinerja yang sangat baik dalam Indikator Kinerja Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat selama periode 2020–2024 memberikan dampak positif yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap berbagai aspek di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Beberapa dampak utama yang terlihat antara lain:

1. Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat

Sosialisasi membantu masyarakat memahami regulasi terkait frekuensi radio, prosedur perizinan, serta pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

2. Mendorong Penggunaan Frekuensi yang Legal dan Tertib

Dengan edukasi yang lebih luas, potensi pelanggaran akibat penggunaan frekuensi ilegal dapat dikurangi, sehingga gangguan komunikasi dapat diminimalkan.

3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Layanan

Survei kepuasan masyarakat memastikan layanan publik lebih terbuka dan akuntabel, sekaligus memberikan umpan balik untuk perbaikan layanan ke depan.

4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Hasil survei menjadi dasar evaluasi bagi Balmon Mataram untuk mengoptimalkan proses pelayanan agar lebih efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

5. Meningkatkan Partisipasi Publik

Dengan adanya survei dan sosialisasi, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan masukan, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan nyata.

6. Menciptakan Lingkungan Komunikasi yang Aman dan Berkelanjutan

Dengan meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi, ekosistem komunikasi menjadi lebih tertib, minim gangguan, serta mendukung pertumbuhan sektor telekomunikasi yang sehat.

Melalui sosialisasi dan survei yang berkelanjutan, diharapkan pelayanan publik di bidang frekuensi radio semakin mudah diakses, transparan, dan sesuai dengan harapan masyarakat

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Standar Nasional yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam peraturan Dirjen SDPPI Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dirjen SDPPI Tahun 2020–2024, Target indikator ini terdapat pada target Rencana strategis Dirjen SDPPI Tahun 2020–2024 yaitu Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik dan pada Sasaran Program 3. Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik,

Indikator Kinerja Sasaran Program	Target Rencana Strategis 2020–2024	Realisasi 2024
IKP 3.3 Persentase layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	100%	140%

d. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Serta Alternatif Solusi

Indikator Kinerja Sasaran Program	Keberhasilan/Kegagalan
Indikator Kinerja Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2024 telah tercapai 140% dari yang ditargetkan	BERHASIL

1. Faktor Penyebab Keberhasilan Capaian

- Balmon Mataram secara rutin melaksanakan survey kepuasan publik, baik yang berfokus pada kepuasan masyarakat maupun pada integritas pelayanan publik.
- Kolaborasi yang Efektif antara UPT, Ditjen SDPPI, Pemerintah Daerah, Stakeholder, dan Masyarakat.

2. Alternatif dan Solusi

- Menyusun jadwal survey kepuasan publik secara berkala
- Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder dan instansi terkait

e. Faktor Penunjang Keberhasilan

Kualitas SDM yang terlibat dalam pelayanan publik. SDM yang kompeten dan terampil dalam memberikan layanan yang responsif dan profesional akan memastikan tercapainya kepuasan masyarakat dan pelaksanaan sosialisasi

9. Persentase (%) Sosialisasi/Bimbingan Teknis SRC/LRC

a. Latar Belakang

Navigasi dan komunikasi maritim adalah elemen penting dalam keselamatan pelayaran. Komunikasi yang efektif di perairan sangat penting untuk mencegah kecelakaan, meningkatkan respons dalam situasi darurat, dan memfasilitasi koordinasi antara kapal dan pusat pengendalian maritim. Untuk memastikan standar keselamatan dan efisiensi komunikasi maritim, terdapat regulasi internasional yang mengharuskan pelaut memiliki sertifikasi tertentu. Di antaranya adalah sertifikasi untuk mengoperasikan peralatan komunikasi, yaitu Short Range Certificate (SRC) dan Long Range Certificate (LRC).



Sertifikasi SRC dan LRC tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga menjadi alat yang vital untuk mendukung keselamatan pelayaran, khususnya bagi perikanan rakyat. Kemampuan berkomunikasi secara benar dan efektif dapat mencegah kecelakaan dan mendukung operasi pelayaran yang aman. Sertifikasi ini diakui secara internasional, memungkinkan pelaut, termasuk nelayan, untuk beroperasi di perairan internasional dengan keyakinan bahwa mereka memenuhi standar keselamatan dan komunikasi yang diakui global. Sertifikat SRC dan LRC juga sebagai syarat untuk mendapatkan Izin Komunikasi Radio Nelayan (IKRAN) sebagai legalitas dalam mengoperasikan alat komunikasi radio.

b. Capaian Kinerja

Pada tahun 2024, Balmon Mataram berhasil melaksanakan program Maritime on the Spot (MOTS) yang merupakan program tahunan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal SDPPI. Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada nelayan dan operator kapal mengenai sertifikasi Short Range Certificate (SRC) dan Long Range Certificate (LRC).

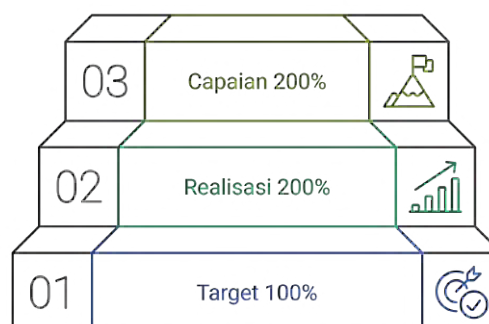
Balmon Mataram telah melaksanakan dua kali kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) Sertifikasi Operator Radio (SOR) Non-Solas pada tahun 2024, yang diselenggarakan di lokasi-lokasi strategis untuk menjangkau para nelayan. Kegiatan pertama dilaksanakan pada bulan Mei 2024 di UPT PPI Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, dengan peserta sebanyak 50 orang. Kegiatan kedua dilaksanakan pada bulan Juni 2024 di Pelabuhan Tanjung Luar, Kabupaten Lombok Timur, dengan jumlah peserta yang sama, yaitu 50 orang. Dengan demikian, Balmon Mataram berhasil melampaui target Perjanjian Kinerja UPT dengan total peserta mencapai 100 orang, mengalahkan target awal yang ditetapkan sebesar 50 orang. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja untuk indikator ini adalah 200%.

Tabel Pelaksanaan Bimbingan Teknis SRC/LRC

No	Lokasi Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jenis Kegiatan	Jumlah Peserta
1	PPI Labuhan Lombok	6 Mei 2024	Bimtek LRC	50
2	PPI Tanjung Luar	29 Juli 2024	Bimtek SRC	50

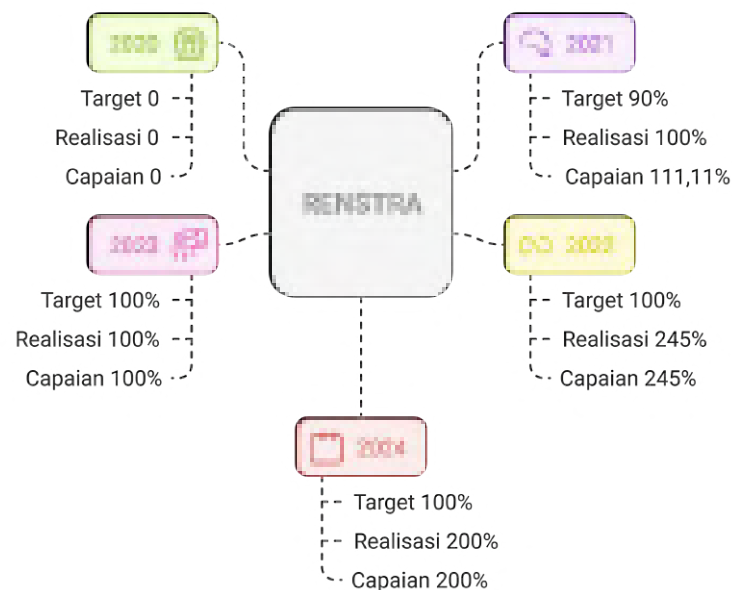
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Persentase (%) Bimbingan Teknis SRC/LRC



Capaian Kinerja Renstra Balmon Mataram Tahun 2020–2024 (Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja)

Indikator Kinerja Persentase (%) Persentase(%) Sosialisasi/Bimbingan Teknis SRC/LRC



Capaian kinerja yang sangat baik dalam Indikator Kinerja Persentase (%) Persentase(%) Sosialisasi/Bimbingan Teknis SRC/LRC selama periode 2020–2024 memberikan dampak positif yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap berbagai aspek di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Beberapa dampak utama yang terlihat antara lain:

1. Meningkatkan Kompetensi Operator Radio Maritim

Sosialisasi dan sertifikasi SRC serta LRC memastikan bahwa operator radio di kapal memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam pengoperasian peralatan komunikasi maritim sesuai standar internasional.

2. Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

Dengan adanya sertifikasi, komunikasi antar kapal serta dengan stasiun pantai menjadi lebih efektif dan dapat diandalkan, mengurangi risiko kecelakaan di laut.

3. Mendorong Kepatuhan terhadap Regulasi

Program ini memastikan bahwa operator radio maritim memenuhi ketentuan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mengurangi pelanggaran penggunaan frekuensi radio.

4. Meminimalkan Gangguan Komunikasi

Operator bersertifikat memahami prosedur komunikasi yang benar, sehingga dapat menghindari gangguan pada sistem komunikasi darurat atau operasional lainnya.

5. Meningkatkan Daya Saing SDM Maritim

Sertifikasi SRC dan LRC memberikan pengakuan resmi bagi operator radio maritim, sehingga meningkatkan peluang kerja dan profesionalisme di industri pelayaran.

6. Mendukung Efisiensi dan Keandalan Sistem Komunikasi Laut

Dengan operator yang tersertifikasi, komunikasi di sektor maritim menjadi lebih terstruktur, aman, dan sesuai dengan standar global, mendukung efisiensi operasional kapal.

Melalui pencapaian kinerja sosialisasi dan sertifikasi SRC serta LRC, diharapkan sektor maritim semakin tertib, aman, dan profesional dalam penggunaan sistem komunikasi radio.

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Standar Nasional yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam peraturan Dirjen SDPPI Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dirjen SDPPI Tahun 2020–2024, Target indikator ini terdapat pada target Rencana strategis Dirjen SDPPI Tahun 2020–2024 yaitu Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik dan pada Sasaran Program 3. Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik,

Indikator Kinerja Sasaran Program	Target Rencana Strategis 2020–2024	Realisasi 2024
IKP 3.3 Persentase layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	100%	200%

d. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Serta Alternatif Solusi

Indikator Kinerja Sasaran Program	Keberhasilan/Kegagalan
Kinerja Persentase (%) Persentase(%) Sosialisasi/Bimbingan Teknis SRC/LRC tahun 2024 telah tercapai 200% dari yang ditargetkan	BERHASIL

1. Faktor Penyebab Keberhasilan Capaian

- Kolaborasi yang intensif dengan pemangku kepentingan
- Pemilihan waktu dan lokasi yang tepat juga menentukan keberhasilan,

2. Alternatif dan Solusi

- Koordinasi dan komunikasi antara Unit Pelaksana Teknis (UPT), Ditjen SDPPI, dan UPT, Dinas Kelautan dan Perikanan serta instansi terkait yang ada di daerah .
- Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan musim melaut para nelayan

e. Faktor Penunjang Keberhasilan

Kualitas SDM yang berkompeten dan terampil dalam pelaksanaan sosialisasi/bimtek SRC/LRC sangat berpengaruh terhadap keberhasilan capaian kinerja.

10. Indikator Kinerja Persentase (%) ISR Maritim Nelayan program MOTS–IKRAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan keselamatan dan efisiensi komunikasi bagi masyarakat maritim, terutama nelayan, pemerintah melalui Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Mataram menyelenggarakan program Maritim On The Spot (MOTS) dan Izin Komunikasi Radio Nelayan (IKRAN). Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan izin komunikasi radio secara cepat dan langsung di lokasi aktivitas nelayan.



MOTS merupakan layanan jemput bola yang dilakukan di wilayah pesisir dan pelabuhan untuk mendekatkan pelayanan izin frekuensi kepada nelayan. Dengan adanya MOTS, nelayan tidak perlu datang ke kantor untuk mengurus perizinan, sehingga lebih hemat waktu dan biaya. Selain itu, program ini juga menjadi sarana sosialisasi bagi nelayan mengenai pentingnya penggunaan spektrum frekuensi radio yang legal dan sesuai peruntukannya.

Sementara itu, IKRAN adalah izin resmi yang diberikan kepada nelayan agar dapat menggunakan frekuensi radio maritim secara sah. Izin ini memastikan bahwa komunikasi antar kapal dan dengan pihak berwenang, seperti stasiun pantai dan kapal patroli, dapat berlangsung dengan lancar tanpa gangguan atau interferensi.

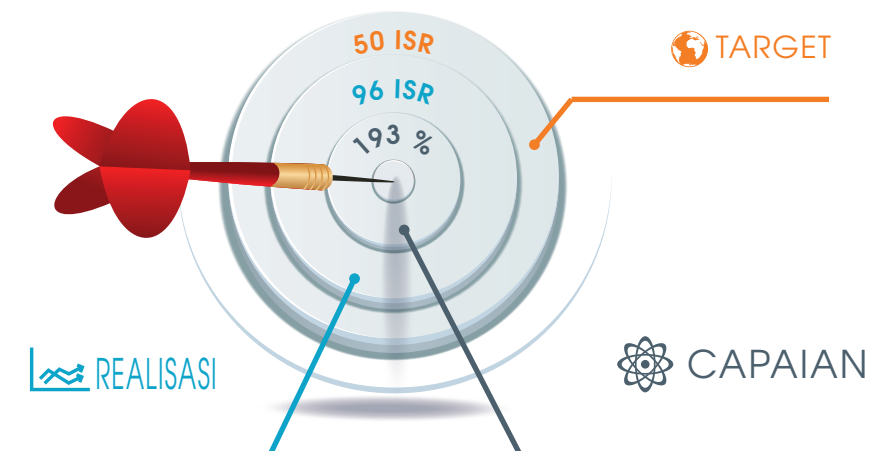
b. Capaian Kinerja

Pada tahun 2024, Balmon Mataram telah berhasil membantu nelayan dalam memberikan asistensi dan konsultasi terkait pengurusan ISR Maritim dengan hasil sebanyak 97 ISR dan IKRAN berhasil diterbitkan, melampaui target yang ditetapkan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI, yaitu sebanyak 50 ISR.

NO	WAKTU PELAKSANAAN		ISR & IKRAN					% CAPAIAN (ISR + IKRAN)/TARGET
			ISR		IKRAN	TOTAL	TARGET	
	DARI	SAMPAI	Kapal	Pantai				
1	Januari	Maret	11	0	0	11	50	22%
2	April	Juni	13	0	0	13		26%
3	Juli	September	12	1	50	63		126%
4	Oktober	Desember	10	0	0	10		20%
JUMLAH			46	1	50	97		194%

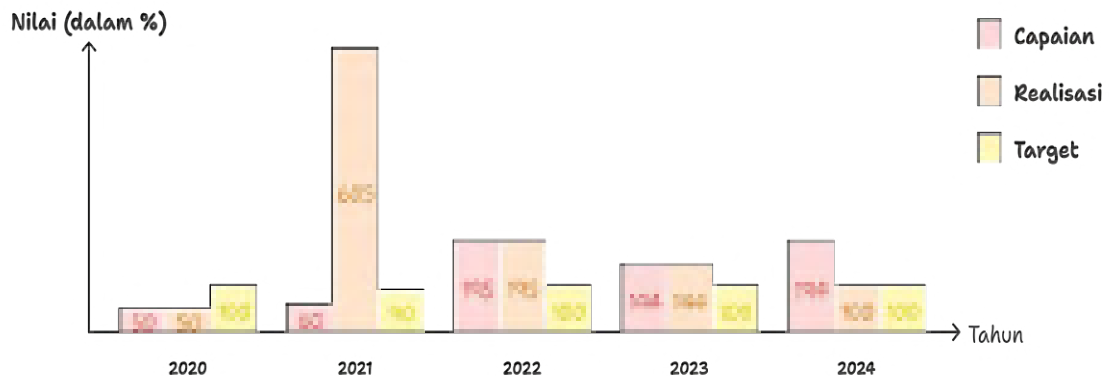
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Persentase (%) ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN



Capaian Kinerja Renstra Balmon Mataram Tahun 2020–2024 (Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja)

Indikator Kinerja Persentase (%) ISR Maritim Nelayan Program MOTS–IKRAN Masyarakat



Capaian kinerja yang sangat baik dalam Indikator Kinerja Persentase (%) ISR Maritim Nelayan Program MOTS–IKRAN selama periode 2020–2024 memberikan dampak positif yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap berbagai aspek di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Beberapa dampak utama yang terlihat antara lain:

1. Mempermudah Akses Perizinan bagi Nelayan

Dengan adanya layanan MOTS dan IKRAN, nelayan dapat memperoleh izin komunikasi radio secara lebih cepat dan mudah tanpa harus datang ke kantor pelayanan, sehingga menghemat waktu dan biaya.

2. Meningkatkan Keselamatan di Laut

Dengan tersedianya izin dan penggunaan radio komunikasi yang sah, nelayan dapat berkomunikasi dengan lebih baik saat menghadapi kondisi darurat, cuaca buruk, atau situasi berbahaya lainnya.

3. Meningkatkan Efektivitas Komunikasi Antar Nelayan dan Pihak Berwenang

Program ini memungkinkan nelayan berkomunikasi dengan sesama nelayan, kapal patroli, serta stasiun pantai secara resmi dan legal, mendukung koordinasi dalam kegiatan perikanan dan keamanan maritim.

4. Meminimalkan Gangguan Frekuensi Radio

Dengan izin yang dikeluarkan secara resmi, penggunaan spektrum frekuensi radio menjadi lebih tertib, mengurangi risiko interferensi dengan sistem komunikasi lain yang lebih vital, seperti navigasi kapal dan keselamatan pelayaran.

5. Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan terhadap Regulasi

Sosialisasi melalui MOTS dan penerbitan IKRAN membantu nelayan memahami pentingnya menggunakan frekuensi radio secara legal dan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Mendukung Perekonomian Nelayan

Dengan sistem komunikasi yang lebih baik, nelayan dapat memperoleh informasi terkini mengenai kondisi cuaca, lokasi tangkapan ikan yang potensial, dan harga jual hasil tangkapan, sehingga meningkatkan efisiensi dan pendapatan mereka.

7. Mendorong Transformasi Digital di Sektor Perikanan

Program ini sejalan dengan upaya modernisasi dan digitalisasi sektor maritim, mendukung penggunaan teknologi dalam meningkatkan keselamatan dan produktivitas nelayan. Melalui MOTS dan IKRAN, diharapkan sektor perikanan dan maritim menjadi lebih aman, tertib, dan efisien, serta memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan ekosistem komunikasi maritim

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Standar Nasional yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam peraturan Dirjen SDPPI Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dirjen SDPPI Tahun 2020–2024, Target indikator ini terdapat pada target Rencana strategis Dirjen SDPPI Tahun 2020–2024 yaitu Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik dan pada Sasaran Program 3. Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik,

Indikator Kinerja Sasaran Program	Target Rencana Strategis 2020-2024	Realisasi 2024
IKP 3.3 Persentase layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	100%	194%

d. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Serta Alternatif Solusi

Indikator Kinerja Sasaran Program	Keberhasilan/Kegagalan
Indikator Kinerja Persentase (%) ISR Maritim Nelayan Program MOTS–IKRAN tahun 2024 telah tercapai 100% dari yang ditargetkan	BERHASIL

1. Faktor Penyebab Keberhasilan Capaian

- danya loket pelayanan terpadu Balmon Mataram di Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI). Lokek pelayanan terpadu ini menjadi salah satu faktor kunci karena mempermudah nelayan dalam proses pengurusan ISR (Izin Stasiun Radio) secara lebih cepat dan efisien.
- Monitoring dan evaluasi di lapangan secara berkala. Proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin di lapangan merupakan elemen kunci untuk memastikan kualitas dan efektivitas pelayanan yang diberikan.

2. Alternatif dan Solusi

- Balmon Mataram mebuca loket pelayanan ISR Maritim berkolaborasi dengan Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI).
- Membentuk tim MOTS untuk melaksanakan monev ke lapangan secara berkala

e. Faktor Penunjang Keberhasilan

- Komunikasi yang Efektif dan Kolaborasi Intensif dengan Pemangku Kepentingan. Kolaborasi yang intens antara pihak terkait, seperti UPT Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, lembaga pemerintahan terkait lainnya, serta organisasi masyarakat nelayan,



sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran proses implementasi program. Dalam hal ini Balmon Mataram telah berkerja sama dengan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan untuk tim kerja Maritim On The Spot (MOTS)

- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkompeten dan Terampil dalam Pelayanan Publik. Keberhasilan pelaksanaan program ini sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan keterampilan SDM yang terlibat dalam proses pelayanan publik. Dalam hal ini Balmon Mataram telah melakukan pelatihan dan bimtek terhadap petugas pelayanan loket.

11. Indikator Kinerja Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR

a. Latar Belakang

Kegiatan Verifikasi Data Koordinat Site ISR merupakan bagian dari program Prima Aksi yang dicanangkan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan ISR melalui pembenahan data koordinat serta penyederhanaan proses bisnis ISR dengan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Program ini difokuskan pada Microwave Link dan Penyiaran.

Substansi utama dari kegiatan Prima Aksi adalah memperbaiki data koordinat ISR dan menyederhanakan proses bisnis ISR dalam waktu tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan analisis teknis lapangan. Dengan demikian, kegiatan ini memastikan bahwa setiap data lokasi stasiun radio dan penyiaran yang terdaftar benar dan akurat, serta memberikan dasar untuk memperbarui data dalam sistem SIMS.

Verifikasi Data Koordinat ISR bertujuan untuk memastikan bahwa lokasi stasiun radio dan penyiaran sesuai dengan posisi yang sesungguhnya di lapangan. Hasil dari verifikasi ini tidak hanya memutakhirkan data dalam SIMS, tetapi juga menyediakan referensi koordinat yang dapat digunakan untuk permohonan ISR di lokasi eksisting. Kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaran operasional serta pengelolaan frekuensi yang lebih terstruktur.

b. Capaian Kinerja

Sepanjang tahun 2024, Balmon Mataram berhasil melaksanakan verifikasi data koordinat site ISR di 5 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Target yang ditetapkan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya untuk verifikasi data koordinat ISR pada tahun 2024 adalah 2.799 ISR yang tersebar di 5 wilayah tersebut, yang mencakup 43,83% dari total sample sebesar 6.386 ISR.

Tabel Doka Target dan Hasil Verifikasi Koordinat Site Microwave Link dan penyiaran

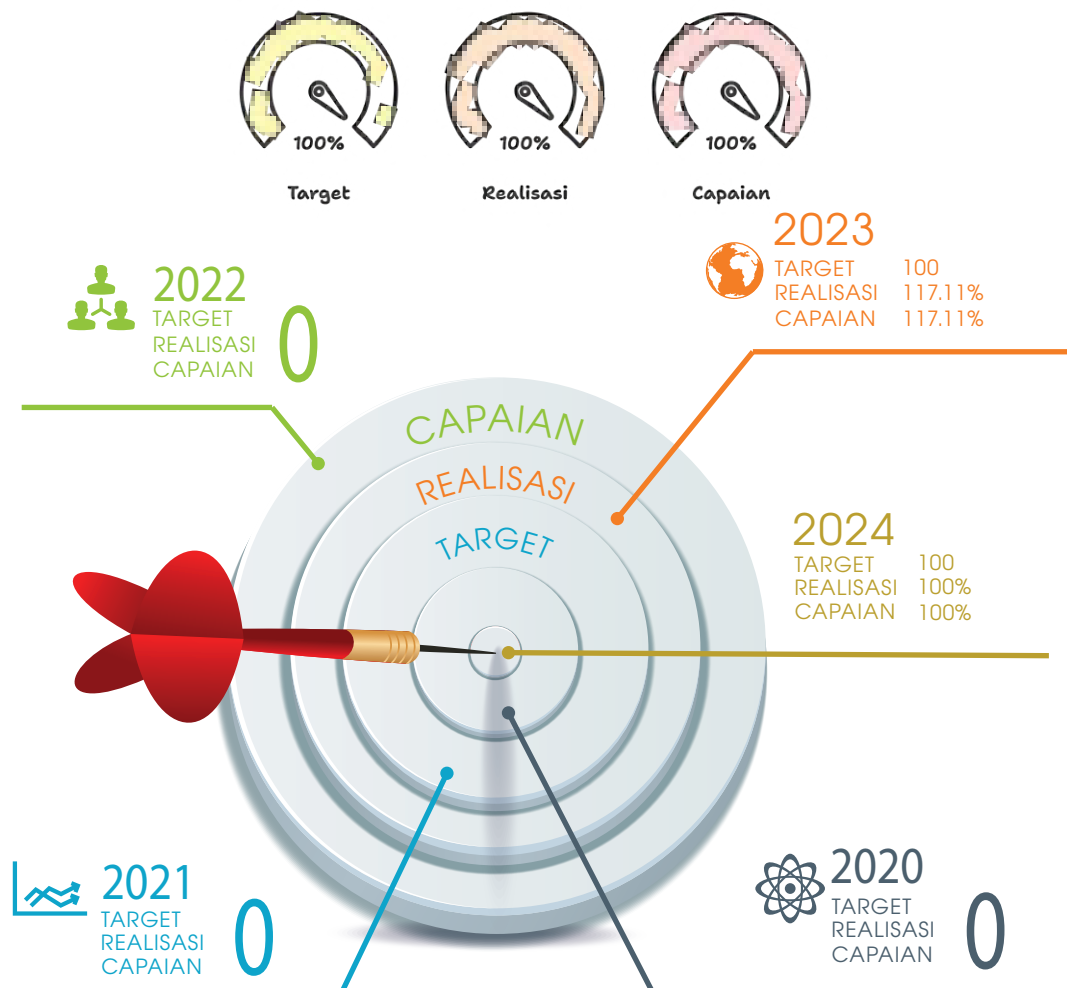
PERIODE	KABUPATEN/KOTA	TARGET TAHUN 2024	JUMLAH ISR TERFERIFIKASI	PERSENTASE
TRIWULAN I	Sumbawa Barat	2779	436	15,58%
TRIWULAN II	Sumbawa		1.079	38,55%
TRIWULAN III	Kota Bima, Kab. bima, Domp		1.221	43,62%
TRIWULAN IV	Sumbawa dan Domp		63	2,25%
TOTAL	5 Kabupaten/Kota	2779	2779	100%



Berdasarkan data capaian tersebut, Balmon Mataram berhasil mencapai 100% target untuk verifikasi data koordinat site Microwave Link dan Penyiaran pada tahun 2024, yang sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR



Capaian kinerja yang sangat baik dalam Indikator Kinerja Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR selama periode 2020-2024 memberikan dampak positif yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap berbagai aspek di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Beberapa dampak utama yang terlihat antara lain:

1. Meningkatkan Akurasi Data Frekuensi

Verifikasi koordinat memastikan bahwa setiap stasiun radio beroperasi di lokasi yang telah ditentukan, sehingga meminimalkan risiko interferensi dengan pengguna frekuensi lainnya.

2. Mencegah Gangguan Spektrum Frekuensi

Dengan data yang valid dan terverifikasi, potensi tumpang-tindih frekuensi dapat dikurangi, sehingga komunikasi dapat berjalan lebih stabil dan efisien.

3. Mempermudah Pengawasan dan Pengendalian Frekuensi

Data koordinat yang telah diverifikasi mempermudah proses monitoring oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon), sehingga pengawasan terhadap kepatuhan pengguna frekuensi menjadi lebih efektif.

4. Meningkatkan Kepatuhan Pengguna Frekuensi

Dengan adanya verifikasi yang ketat, pengguna frekuensi akan lebih disiplin dalam mengajukan izin dan mematuhi regulasi yang berlaku.

5. Mendukung Perencanaan dan Optimalisasi Spektrum Frekuensi

Data koordinat yang akurat membantu dalam perencanaan penggunaan spektrum frekuensi di masa depan, sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sesuai kebutuhan komunikasi di berbagai sektor.

6. Meminimalkan Risiko Operasi Ilegal

Verifikasi koordinat membantu mengidentifikasi penggunaan spektrum tanpa izin atau yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga tindakan pengendalian dapat dilakukan lebih cepat.

7. Meningkatkan Efisiensi Layanan Publik

Dengan data yang valid, proses perizinan ISR dapat dilakukan lebih cepat dan akurat, sehingga pelayanan kepada masyarakat dan industri menjadi lebih efisien.

Dengan pencapaian kinerja dalam verifikasi data koordinat Site ISR, pengelolaan spektrum frekuensi radio menjadi lebih tertib, aman, dan efisien, serta mendukung keberlanjutan sistem komunikasi yang andal dan bebas gangguan

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Standar Nasional yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam peraturan Dirjen SDPPI Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dirjen SDPPI Tahun 2020-2024, Target indikator ini terdapat pada target Rencana strategis Dirjen SDPPI Tahun 2020-2024 yaitu Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik dan pada Sasaran Program 3. Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Indikator Kinerja Sasaran Program	Target Rencana Strategis 2020-2024	Realisasi 2024
IKP 3.3 Persentase layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	100%	100%

d. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Serta Alternatif Solusi

Indikator Kinerja Sasaran Program	Keberhasilan/Kegagalan
Indikator Kinerja Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR tahun 2024 telah tercapai 100% dari yang ditargetkan	BERHASIL



1. Faktor Penyebab Keberhasilan Capaian

- Kerjasama dengan User: Kolaborasi yang baik antara Balmon Mataram dan penyelenggara jaringan serta lembaga penyiaran telah mendukung kelancaran proses verifikasi data koordinat, dengan mereka memberikan dukungan yang diperlukan dalam pengumpulan data koordinat.
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam pelaksanaan tugas

2. Alternatif Solusi

- Koordinasi dan komunikasi yang intensi dengan pihak terkait, khususnya pemilik site BTS atau tower pemancar dan lembaga.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan melakukan

e. Faktor Penunjang Keberhasilan

- Dukungan Data SIMS: Penggunaan Sistem Manajemen Data SIMS dari Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI sangat membantu proses verifikasi. SIMS menyediakan data awal yang dapat langsung dijadikan acuan untuk verifikasi, mempercepat pengolahan data.
- Pemanfaatan Aplikasi: Aplikasi Google Earth telah digunakan untuk mempermudah metode deskwork analysis, sehingga proses verifikasi menjadi lebih efisien dan akurat.



→ SASARAN II

“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien ”

1. Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2024

a. Latar Belakang

Pelaksanaan layanan administrasi yang efektif sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Balmon Mataram, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Balmon Mataram mengelola layanan administrasi yang terbagi dalam beberapa bagian, yaitu:

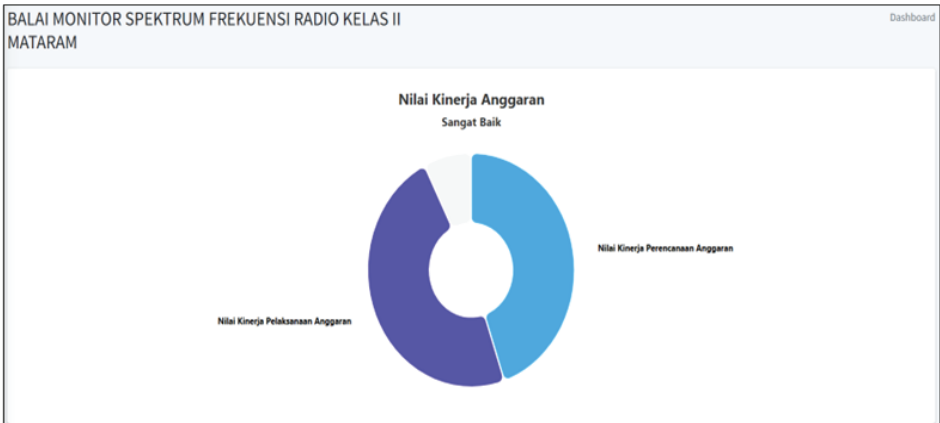
- 1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
- 2. Pengelolaan Anggaran
- 3. Pengelolaan Barang Milik Negara
- 4. Pengelolaan Barang dan jasa
- 5. Pengelolaan Kepegawaian

b. Capaian Kinerja

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran pada Balmon Mataram. NKA dihitung dengan menggabungkan dua komponen utama, yaitu nilai capaian IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) dan SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu). Perhitungan capaian NKA dilakukan dengan menggabungkan capaian IKPA dan SMART, masing-masing dengan bobot 50%, yang mengacu pada Kementerian Keuangan dalam Harmonisasi Anggaran Pusat dan Daerah (Kemenkeu Wide) pada tahun 2024. Untuk mencapai nilai yang sesuai dengan target, Perhitungan capaian NKA dilakukan dengan bobot masing-masing komponen sebesar 50%, mengacu pada standar Harmonisasi Anggaran Pusat dan Daerah (Kemenkeu Wide) tahun 2024. Untuk mencapai nilai yang sesuai dengan target, perlu adanya perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi anggaran yang efektif. Berdasarkan hasil capaian NKA.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI tahun 2024

Kode Satker	Satuan Kerja	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
654162	Balai Monitor SFR Kelas II Mataram	89,56	95,60	92,58



Capaian Kinerja Perencanaan Anggaran (Smart DJA)

Capaian kinerja perencanaan anggaran pada Balmon Mataram tahun 2024 tercatat sebesar 89,56. Dengan pembobotan 50%, maka capaian tersebut setara dengan 44,78. Komponen penilaian dalam perencanaan anggaran terdiri dari:

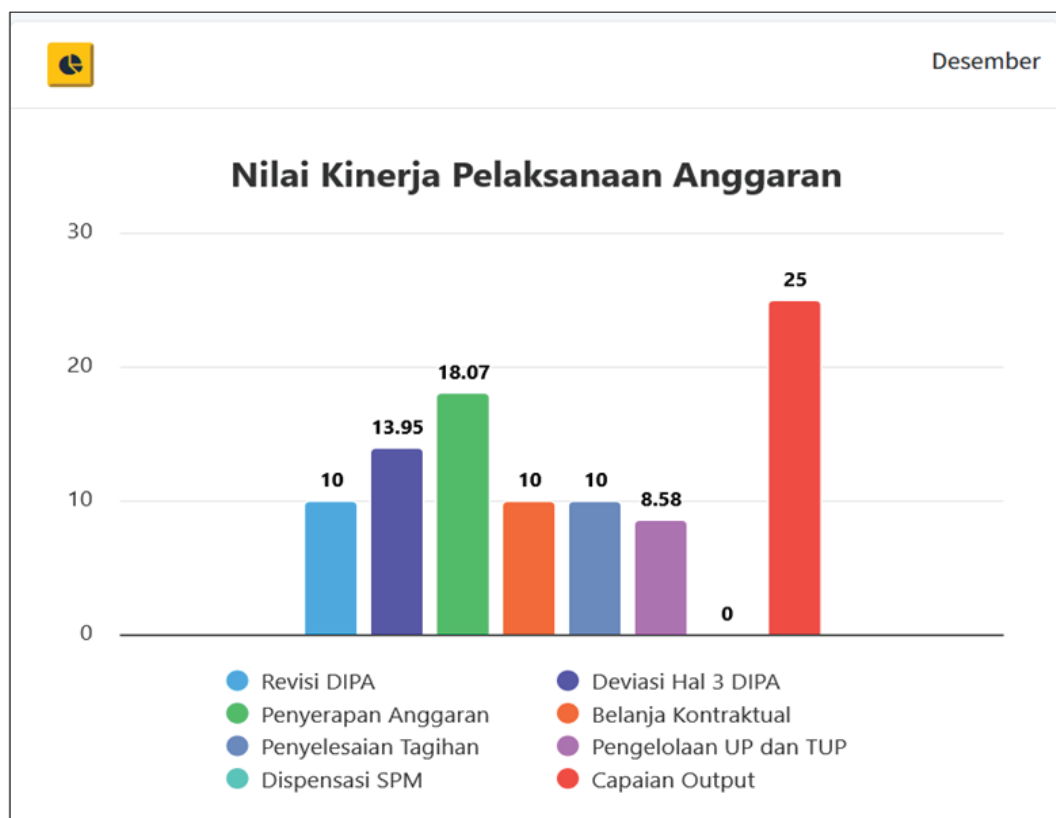
Aspek Penilaian	Realisasi	Bobot	Capaian
Capaian Rincian Output (CRO)	100	75%	75
Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK)	100	10%	10
Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK)	30,4	15%	4,56
Total Nilai			88,27



Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)

Capaian kinerja pelaksanaan anggaran pada Balmon Mataram tahun 2024 adalah 95,60, yang dengan pembobotan 50%, tercapai 47,80. Komponen penilaian yang mendasari capaian ini antara lain :

Aspek Penilaian	Realisasi	Bobot	Capaian
Revisi Anggaran	100	10%	10
Deviasi Hal 3 DIPA	92,99	15%	13,92
Penyerapan Anggaran	90,35	20%	18,07
Belanja Kontraktual Penyelesaian Tagihan	100	10%	10
Penyelesaian Tagihan	100	10%	10
Pengelolaan UP dan TUP	85,78	10%	8,58
Dispensasi SPM & Capaian Output	100	25%	25
Total Nilai			95,60



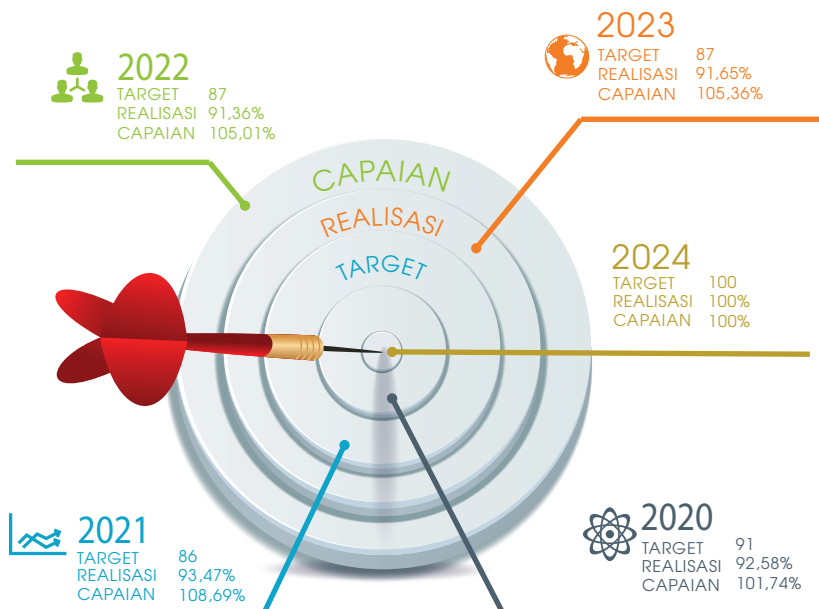
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran Program	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2024	91	92.58	101.74

Perhitungan capaian berdasarkan tabel diatas dijelaskan dengan rumus berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{92,58}{91} \times 100\% = 101,74$$

Capaian Kinerja Renstra Balmon Mataram Tahun 2020-2024 (Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Nillai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI



Capaian kinerja yang sangat baik dalam Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI periode 2020–2024 memberikan dampak positif yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap berbagai aspek di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Beberapa dampak utama yang terlihat antara lain:

1. Optimalisasi Penggunaan Anggaran

Dana yang tersedia dimanfaatkan secara efektif sesuai perencanaan, sehingga dapat mendukung berbagai program prioritas dengan hasil yang maksimal.

2. Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi

Penggunaan anggaran yang sesuai dengan prinsip efisiensi dan transparansi memastikan bahwa setiap pengeluaran memiliki justifikasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Memperbaiki Kualitas Layanan Publik

Dengan anggaran yang dikelola secara optimal, layanan publik seperti perizinan, pengawasan frekuensi, dan sertifikasi dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan berkualitas.

4. Memastikan Kepatuhan terhadap Regulasi Keuangan

Pencapaian kinerja anggaran yang baik menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, mengurangi risiko penyalahgunaan atau inefisiensi.

5. Mendukung Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya

Anggaran yang teralokasi dengan baik dapat digunakan untuk pengadaan peralatan monitoring, pengembangan sistem teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

6. Meningkatkan Kepercayaan Publik dan Stakeholder

Kinerja anggaran yang baik menunjukkan komitmen instansi dalam mengelola dana secara profesional, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak terkait terhadap institusi.

7. Memudahkan Evaluasi dan Perencanaan Program Selanjutnya

Capaian kinerja anggaran yang terukur mempermudah perencanaan dan alokasi anggaran di periode mendatang agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Dengan pencapaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran yang optimal, pengelolaan keuangan menjadi lebih akuntabel dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat pencapaian tujuan strategis, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta sektor terkait.



c. **Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional**

Capaian kinerja anggaran yang terukur mempermudah perencanaan dan alokasi Standar Nasional yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam peraturan Dirjen SDPPI Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dirjen SDPPI Tahun 2020-2024, Target indikator ini terdapat pada target Rencana strategis Dirjen SDPPI Tahun 2020-2024 yaitu Program Program Dukungan Manajemen dan pada Sasaran Program 1. Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien.

Indikator Kinerja Sasaran Program	Target Rencana Strategis 2020-2024	Realisasi 2024
IKP 1.6 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI	88%	92.58%

d. **Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Serta Alternatif Solusi**

Indikator Kinerja Sasaran Program	Keberhasilan/Kegagalan
Indikator Kinerja Persentase (%) Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI tahun 2024 tercapai telah tercapai 101.03% dari yang ditargetkan	Secara umum berhasil, namun ada beberapa aspek penilaian yang belum maksimal pencapaiannya

1. **Penyebab Tidak Maksimal Keberhasilan**

- Pada Kinerja Perencanaan Anggaran terdapat aspek penilaian efisiensi SBK capaian belum maksimal
- Pada Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdapat aspek penilai deviasi halaman 3 DIPA, aspek penilaian penyerapan anggaran, dan aspek penilaian pengelolaan UP dan TUP yang capaian belum maksimal.

2. **Penyebab Tidak Maksimal Keberhasilan**

- Aspek penilaian efisiensi SBK kurang maksimal dikarenakan terdapat sisa anggaran melebihi standar (20%), sehingga pelaksanaan kegiatan pada RO SBK agar dilaksanakan sesuai standar SBK atau maksimal 20%.
- Aspek penilaian deviasi halaman 3 DIPA kurang maksimal dikarenakan adanya tidak konsisten pelaksanaan anggaran terhadap rencana penarikan dana, adanya kebijakan kebijakan dalam pelaksanaan anggaran terutama pada pekerjaan fisik.
- Aspek penilaian penyerapan anggaran kurang maksimal dikarenakan adanya blokir anggaran perjalanan dinas yang tidak bisa direalisasikan.
- Aspek penilaian pengelolaan UP dan TUP yang kurang maksimal dikarenakan pagu UP yang besar sehingga tidak bisa maksimal revolving UP setiap bulannya, pagu UP agar diajukan tidak terlalu besar sehingga menyulitkan untuk revolving setiap bulannya.



e. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

- Kolaborasi yang efektif dan sinergis antara sub bagian umum dan tim kerja di Balmon Mataram merupakan faktor krusial dalam mencapai target kinerja. Selain itu, peran Kepala Balmon Mataram dalam melaksanakan tugas dan fungsi (tusi) serta memastikan pelaksanaan perjanjian kinerja dengan baik, turut memperkuat pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin, baik dari internal Balmon Mataram maupun eksternal oleh unit kerja Eselon I, sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat menghasilkan output yang efektif.
- Kerja sama yang intensif dengan instansi terkait, seperti Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sangat berperan penting dalam mendukung pencapaian target kinerja.
- Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya yang maksimal dalam menjalankan berbagai prosedur dan sistem yang ada, serta komitmen tinggi terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel.

2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran

e. Latar Belakang

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah laporan yang menyajikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang terdiri dari berbagai komponen, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan ini disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan UAKPA. Pelaporan ini mencakup laporan Barang Milik Negara (BMN) serta laporan GLP (Glosarium dan Laporan Perubahan) yang melibatkan seluruh aspek aset dan keuangan yang dikelola dan ditatausahakan oleh Balai Monitor (Balmon) Mataram. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel, menuntut pemerintah untuk menanggapi hal ini dengan serius dan sistematis. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (Good Governance), dimana setiap langkah pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka.



Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan, Balmon Mataram secara rutin menyampaikan laporan keuangan yang mencakup laporan pertanggungjawaban pada Semester I, Semester II, dan tahunan. Pelaporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan anggaran dan pengelolaan sumber daya yang ada dalam organisasi.

b. Capaian Kinerja

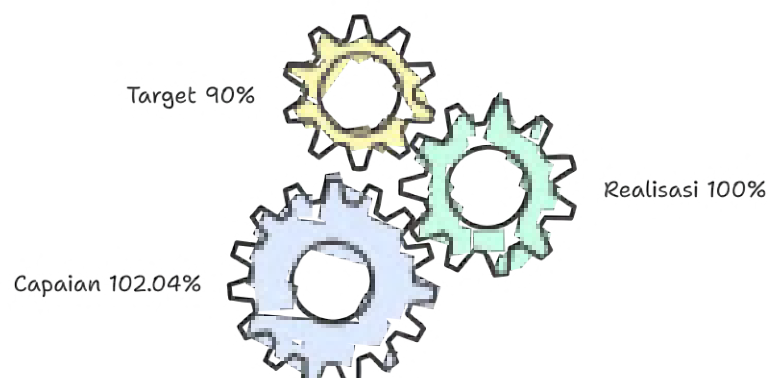
Pada tahun 2024, capaian kinerja terkait dengan Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) berhasil terealisasi Nilai 100, melebihi target yang ditetapkan Nilai 98. Dengan demikian, capaian kinerja ini mencatatkan hasil sebesar 102,04%. Capaian kinerja ini merupakan hasil penilaian Biro Keuangan Kemenkominfo atas pelaksanaan keuangan tahun 2024.

**Tabel Hasil Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja
atas Laporan Keuangan Tahun 2024**

NO	INDIKATOR	BOBOT	PENGURANG
1	Jumlah transaksi koreksi audit	50%	0
2	Kesalahan penganggaran berdasarkan LHP BPK	20%	0
3	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan akhir tahun	10%	0
4	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan ke Entitas Pelaporan	5%	0
5	Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	10%	0
6	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan ke Entitas Pelaporan	5%	0

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

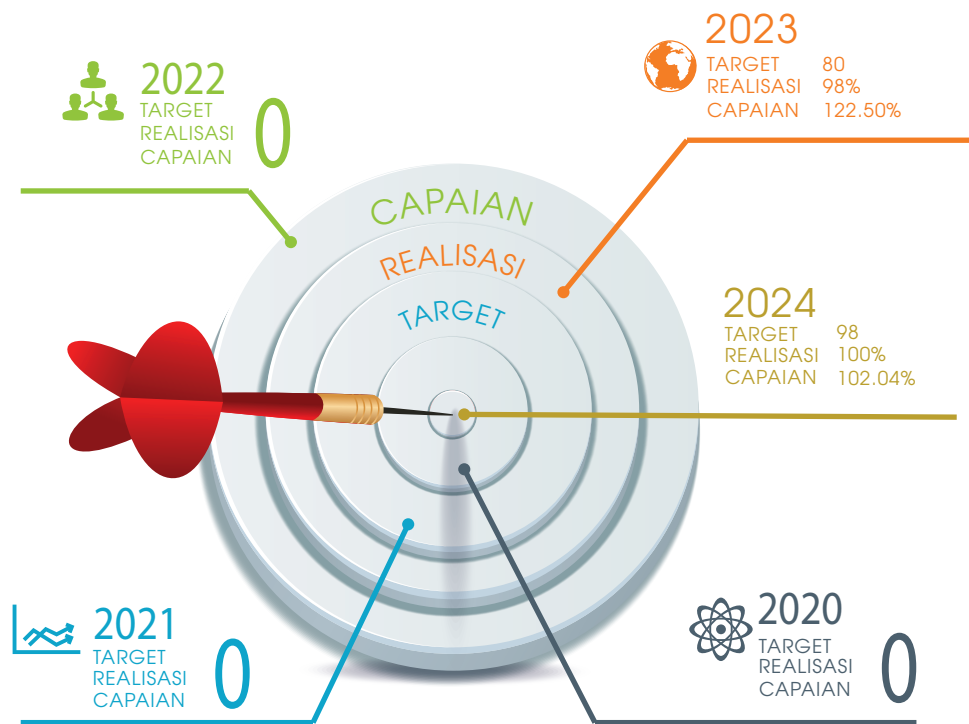
Capaian Indikator Kinerja Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)



Capaian Kinerja Renstra Balmon Mataram Tahun 2020-2024 (Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja)

Indikator Kinerja Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)





Capaian kinerja yang sangat baik dalam Indikator Kinerja Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) selama periode 2020-2024 memberikan dampak positif yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap berbagai aspek di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Dampak utama adalah Nilai Opini Laporan Keuangan di lingkungan Ditjen SDPPI adalah baik.

- c. Standar Nasional yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam peraturan Dirjen SDPPI Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dirjen SDPPI Tahun 2020-2024, Target indikator ini tidak terdapat pada target Rencana strategis Dirjen SDPPI Tahun 2020-2024 karena Indikator Kinerja Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) tambahan dari Biro Keuangan pada tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Program	Target Rencana Strategis 2020-2024	Realisasi 2024
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	0	100%

d. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Serta Alternatif Solusi

Indikator Kinerja Sasaran Program	Keberhasilan/Kegagalan
dalam Indikator Kinerja Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) tahun 2024 telah tercapai 100% dari yang ditargetkan	BERHASIL

1. Faktor Penyebab Keberhasilan

- Upaya yang maksimal dalam menjalankan berbagai prosedur dan sistem yang ada, serta komitmen tinggi terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel.

- Proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin, baik dari internal Balmon Mataram maupun eksternal oleh unit kerja Eselon I, sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat menghasilkan output yang efektif.

2. Alternatif Solusi

- Melakukan monev secara berkala
- Konsisten melaksanakan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku.

e. Faktor Penunjang Keberhasilan

Kerja sama yang intensif dengan instansi terkait, seperti Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sangat berperan penting dalam mendukung pencapaian target kinerja.

B. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pemanfaatan sumber daya di Balmon Mataram berpengaruh dalam mendukung peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Balmon Mataram. Penyebab adanya peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja di atas, dapat diidentifikasi melalui tiga aspek sebagai berikut:

1. Ekonomi

Pengelolaan anggaran Balmon Mataram telah dilaksanakan secara ekonomis mulai dari tahap perencanaan. Penyusunan anggaran Balmon Mataram selaku UPT Ditjen SDPPI yang dilaksanakan dengan mengacu kepada sasaran dan target kinerja ditjen SDPPI dan dirumuskan untuk menjawab kebutuhan Kemkominfo, mitra kerja, dan internal Ditjen SDPPI. Dalam prosesnya, penyusunan anggaran Balmon Mataram juga telah melalui proses reviu yang dilaksanakan oleh auditor internal yang ditugaskan untuk memastikan rancangan anggaran telah sesuai dengan sasaran dan target kinerja, ketentuan yang berlaku, dan ekonomis. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, pengelolaan anggaran Balmon Mataram dimonitoring dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan organisasi menghasilkan output terbaik.

2. Efektifitas

Berdasarkan pengukuran kinerja tahun 2024, diketahui bahwa dari 13 indikator yang ditetapkan sebagai hasil program, telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan membandingkan tingkat pencapaian hasil dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan anggaran program pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat dan layanan publik serta program dukungan manajemen Balmon Mataram terkelola dengan efektif. Tercapainya tingkat efektivitas kinerja tersebut tidak lepas dari adanya pengendalian proses pencapaian target kinerja yang dilaksanakan secara sistematis dan periodik oleh pimpinan beserta seluruh pegawai Balmon Mataram.



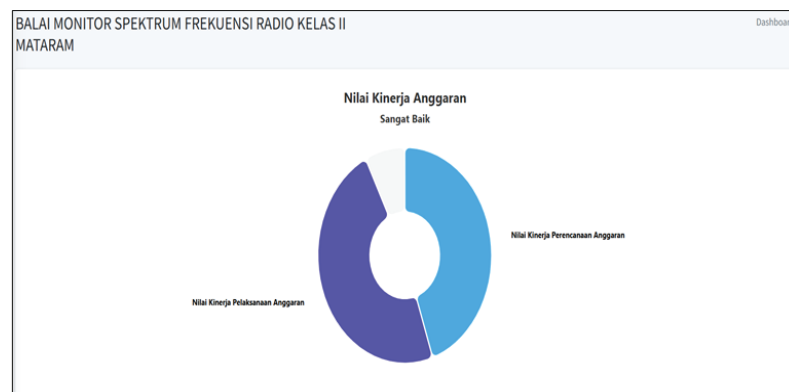
3. Efisiensi

Tingkat efisiensi atas pelaksanaan anggaran program pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat dan layanan publik dan program dukungan manajemen tahun 2024 dapat dilihat dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang meliputi capaian output dan capaian indikator kinerja. Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran Balmon Mataram dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dapat dinilai cukup efisien. Dengan mengacu pada konsep dan kriteria di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk mendukung tugas dan fungsi Balmon Mataram telah dikelola dengan ekonomis, efektif, dan cukup efisien.

Dalam rangka memberikan informasi kinerja yang akuntabel mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran, penilaian kinerja anggaran Balmon Mataram mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang diperoleh dari nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan nilai Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dengan proporsi sebagai berikut :

Tabel Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI tahun 2024

Kode Satker	Satuan Kerja	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
654162	Balai Monitor SFR Kelas II Mataram	89,56	95,60	92,58



a. Capaian Kinerja Perencanaan Anggaran (Smart DJA)

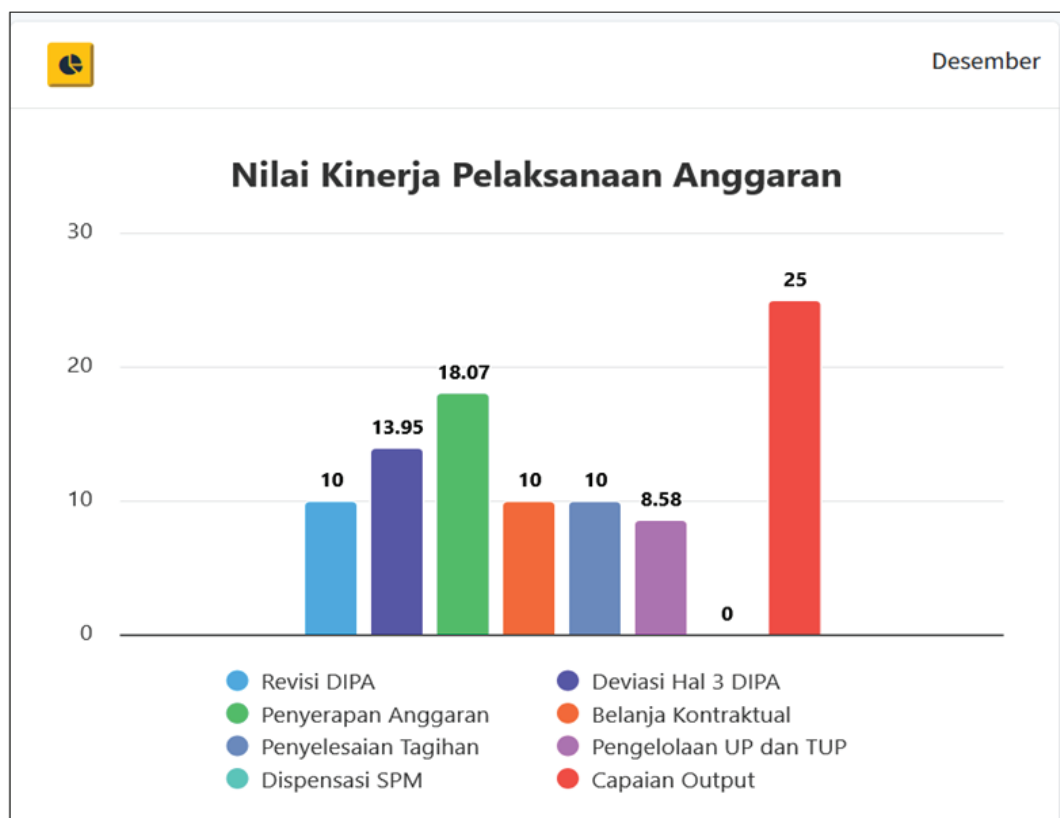
Capaian kinerja perencanaan anggaran pada Balmon Mataram tahun 2024 tercatat sebesar 89,56. Dengan pembobotan 50%, maka capaian tersebut setara dengan 44,78. Komponen penilaian dalam perencanaan anggaran terdiri dari:



b. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)

Capaian kinerja pelaksanaan anggaran pada Balmon Mataram tahun 2024 adalah 95,60, yang dengan pembobotan 50%, tercapai 47,80. Komponen penilaian yang mendasari capaian ini antara lain :

Aspek Penilaian	Realisasi	Bobot	Capaian
Revisi Anggaran	100	10%	10
Deviasi Hal 3 DIPA	92,99	15%	13,92
Penyerapan Anggaran	90,35	20%	18,07
Belanja Kontraktual Penyelesaian Tagihan	100	10%	10
Penyelesaian Tagihan	100	10%	10
Pengelolaan UP dan TUP	85,78	10%	8,58
Dispensasi SPM & Capaian Output	100	25%	25
Total Nilai			95,60



D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pagu anggaran Balai Monitor Mataram untuk Tahun Anggaran 2024 berdasarkan DIPA No. SP DIPA-059.03.2.654183/2024 yang diterbitkan pada 24 November 2024 adalah sebesar Rp 16.138.975.000,-, yang terdiri dari dua sumber anggaran:

1. Rupiah Murni (RM): Rp 4.594.849.000,-
2. PNBPNP: Rp 11.544.126.000,-

Setelah dilakukan revisi, pagu anggaran Balmon Mataram mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 15.495.663.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran mencapai 98,36%. Angka tersebut sudah termasuk anggaran yang diblokir melalui mekanisme Automatic Adjustment sebesar Rp 83.429.000,-, yang tidak dapat direalisasikan. Berikut ini adalah rincian lebih lanjut terkait dengan realisasi anggaran tersebut:

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
51. Belanja Pegawai	2.943.217.000	2.913.986.526	99,01
52. Belanja Barang	9.271.560.000	9.052.281.911	97,63
53. Belanja Modal	3.280.886.000	3.278.611.500	99,93
TOTAL	15.495.663.000	15.244.879.93	98,38

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan Program

PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
GE. Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	8.282.827.00	8.108.700.491	97,90
WA. Program Dukungan Manajemen	7.212.836.000	7.136.179.446	98,94
TOTAL	15.495.663.000	15.244.879.93	98,38



Tabel Capaian Output

No.	Rincian Output	TVRO	RVRO	Progres
1	078 Layanan Dukungan Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio UPT (Layanan)	1	1	100
2	U35 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Kepulauan (Layanan)	4	4	100
3	U36 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kepulauan (Layanan)	16	16	100
4	U37 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kepulauan (Layanan)	7	7	100
5	U38 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Kepulauan (Layanan)	5	5	100
6	U40 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat/Laut Wilayah Kepulauan (Layanan)	1	1	100
7	U41 Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Kepulauan (Layanan)	1	1	100
8	U42 Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kepulauan (Layanan)	2	2	100
9	U43 Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kepulauan (Layanan)	1	1	100
10	U44 Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Kepulauan (Layanan)	1	1	100
11	CAN.101 Perangkat Monitoring UPT	9	9	100
12	CCL.101 Pemeliharaan Alat Monitoring UPT	1	1	100
13	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	1	100
14	EBA.994 Layanan Perkantoran	2	2	100
15	EBB.951 Layanan Sarana Internal	33	33	100



Pengelolaan Barang Milik Negara

Barang Milik Negara (BMN) harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Pengelolaan BMN Balmon Mataram di Tahun 2024 telah dilakukan melalui aplikasi SIMAN dan SAKTI, yang memungkinkan penatausahaan yang terintegrasi antara arus barang dan uang. Berikut adalah posisi BMN pada neraca per 31 Desember 2024 :

Posisi Barang di Neraca

Tabel Neraca Balmon Mataram per 31 Desember 2024

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
117111	Barang Konsumsi	37,781,900
131111	Tanah	3.773.996.000,
132111	Peralatan dan Mesin	37,958,251,141,
133111	Gedung dan Bangunan	7,410,314,805
134111	Jalan dan Jembatan	33.970.000,
134112	Irigasi	228.325.000,
134113	Jaringan	139.064.000,
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(22,686,215,691)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(789,477,852)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(33.970.000,)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(79,913,750)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(108,072,250)
162151	Software	3.475.186.709,
162161	Lisensi	50.128.570,
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(2,357,184,557)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(50.128.570,)
JUMLAH		27,002,055,455

Penghapusan Barang Milik Negara

Pada Tahun 2024, tidak ada proses penghapusan aset BMN, namun terdapat proses lelang material bongkaran fasad gedung dan pagar kantor serta material bongkaran renovasi tower, ruang rapat dan garasi kantor. Proses penghapusan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Sekjen Kementerian Kominfo dan melalui mekanisme lelang elektronik (e-Auction).

Penetapan Status Penggunaan (PSP)

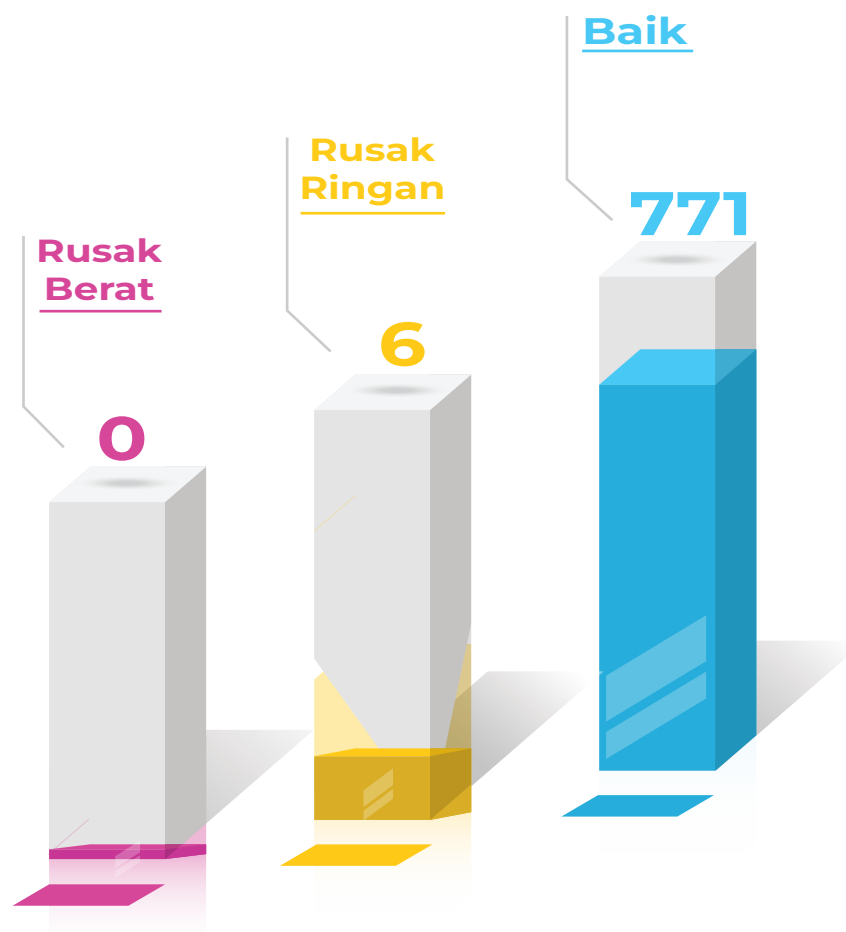
Pada tahun 2024, telah diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (SK PSP) untuk 9 item BMN, mencakup barang dengan nilai sampai dengan Rp100 juta serta barang dengan nilai di atas Rp100 juta. Selain itu, telah diajukan PSP untuk 109 barang, baik yang bernilai hingga Rp100 juta maupun yang bernilai lebih dari Rp100 juta, melalui aplikasi SIMAN.

Inventarisasi BMN

Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN), yang juga dikenal dengan istilah Sensus BMN, merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan Penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN itu sendiri mencakup serangkaian kegiatan yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang mengharuskan kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN/Daerah. Hal ini juga selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN.

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan sensus BMN atau inventarisasi tahap kedua yang merupakan kelanjutan dari inventarisasi tahap pertama yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Hasil inventarisasi BMN tahun 2024 tercatat dalam Grafik berikut



Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Pengelolaan administrasi kepegawaian di Balai Monitor Mataram bertujuan untuk menata dan mengelola sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai, serta untuk memaksimalkan potensi dan kesejahteraan pegawai. Pada tahun 2024, jumlah pegawai yang bekerja di Balmon Mataram tercatat sebanyak 36 orang, yang terdiri dari:



- 19 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil)
- 15 orang PPNP (Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Non PNS)
- 2 orang pegawai kontrak/leasing

Tabel Pegawai Balmon Mataram Berdasarkan Jabatan

Eselon III	Eselon IV	Ketua Tim	Staff/JFPF	Staff/JF Perencana	Staff/JF Umum	PPNP	Kontrak Paruh Waktu
1 pegawai	1 pegawai	3 pegawai	4 pegawai	1 pegawai	9 pegawai	15 pegawai	2 pegawai

Tabel Pegawai Berdasarkan Penempatan

Kepala Kantor	Sub. Bag. Umum	Tim Kerja Monev SFR dan APT	Tim Kerja Penertiban SFR dan APT	Tim Kerja Pemeliharaan Infrastruktur SFR dan APT
1 pegawai	19 pegawai	7 pegawai	3 pegawai	6 pegawai

Pengelolaan Persuratan

Pengelolaan administrasi persuratan di Balai Monitor Mataram merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran komunikasi dan koordinasi antar unit kerja serta dengan pihak eksternal. Pengelolaan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa surat-menyurat baik yang bersifat internal maupun eksternal dapat dikelola secara efektif, efisien, dan tepat waktu.

Pada tahun 2024, pengelolaan persuratan di Balmon Mataram dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu secara konvensional dan dengan memanfaatkan aplikasi SiMaya (Sistem Manajemen Administrasi dan Persuratan).

Tabel Rekapitulasi

Surat Masuk	Periode												TOTAL
	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Jumlah	77	74	52	41	71	68	79	63	68	69	65	55	782

Surat Keluar	Periode												TOTAL
	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Nodin	31	14	14	14	12	19	25	17	18	13	13	11	201
Surat Dinas	46	83	44	58	85	55	60	79	88	65	74	68	805
Surat Tugas	33	30	25	31	36	30	49	38	34	36	34	30	406



Pengelolaan Barang dan Jasa

Untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional pada tahun 2024, Balmon Mataram melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan mengimplementasikan metode e-purchasing atau e-katalog. Penggunaan e-purchasing ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, serta memastikan bahwa seluruh transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan penerapan metode ini, diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan dan meminimalisir potensi penyimpangan, sekaligus memberikan kemudahan bagi para penyedia barang dan jasa dalam melakukan transaksi.

Tabel Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024

No	Nama Paket	No	Nama Paket
1	Antenna Kit	13	General Medical Check-Up ASN
2	Antenna Handheld Directional R&S HE-400	14	Manage Router
3	Genset Portable	15	Sewa Link Internet Operasional Kantor
4	Inverter	16	Sewa Link Internet Transportable
5	Receiver Digital	17	Alat Bermain Anak
6	Baterai Portable	18	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran UPT
7	TV Wall	19	Sound System
8	Upgrade Argus 6	20	Pembenahan Arsip
9	Pekerjaan Fisik Interior Custom	21	Server Monitoring
10	Meubelair Lantai 2		
11	Peningkatan Kualitas SDM		
12	Jasa Konsultasi Pemeliharaan Sistem ISO		

D. IMPLEMENTASI BerAKHLAK

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mataram mendukung implementasi core values ASN "Berakhlak" yang tercermin dalam pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam setiap Indikator Kinerja Organisasi, sebagai berikut:





Budaya kerja ASN dibangun secara berkelanjutan dengan melakukan internalisasi nilai dasar BerAKHLAK. Selain penerapan dalam kegiatan sehari-hari dan penilaian atas nilai kerja ASN yang dilakukan secara periodik setiap bulan melalui e_Kinerja, merupakan salah satu upaya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mataram dalam menanamkan nilai BerAKHLAK adalah melalui kegiatan internalisasi budaya kerja di lingkungan Balai Monitor Mataram.

Selain penguatan budaya kerja ASN dengan nilai BerAKHLAK, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mataram juga turut aktif dalam komitmen Kemkominfo memerangi judi online. Dalam rangka mencegah merebaknya aktivitas judi online di lingkungan Kemkominfo, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mataram telah melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan Aktivitas Judi Online yang mulai dilakukan pada tanggal 10 Juli 2024. Seluruh pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mataram sebanyak 19 orang telah melakukan penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan Aktivitas Judi Online.

E. Benchmark UPT 2024

Telah dilakukan perbandingan realisasi kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio lainnya di lingkungan Ditjen SDPPI. Perbandingan realisasi kinerja dimaksud adalah sebagai berikut:



No	Nama UPT	IKSK 1.1		IKSK 1.2		IKSK 1.3		IKSK 1.4		IKSK 1.5		IKSK 1.6		IKSK 1.7		IKSK 1.8	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Medan	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	100	100	170.39	100	100	100	100
2	Pekanbaru	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	100	100	121.43	100	100	100	100
3	Palembang	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	105.26	100	104	100	100	100	100
4	Surabaya	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	100	100	128.33	100	100	100	100
5	Bandung	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	98.81	100	100	100	100	100	100
6	Semarang	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	100	100	165.29	100	100	100	173.33
7	Yogyakarta	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	100	100	222.73	100	100	100	100
8	Tangerang	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	100	100	100	100	100	100	100
9	Jakarta	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	100	100	100	100	100	100	100
10	Samarinda	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	100	100	111.36	100	100	100	100
11	Makassar	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	105.26	100	254.00	100	100	100	100
12	Kupang	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	100	100	100	100	100	100	100
13	Denpasar	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	100	100	227	100	100	100	100
15	Batam	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	100	100	425	100	100	100	100
14	Aceh	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	100	100	286	100	100	100	100
16	Padang	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	100	100	226.25	100	100	100	100
17	Jambi	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	100	100	146	100	100	100	100
18	Bengkulu	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	100	100	111	100	95.55	100	103.34
19	Lampung	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100	100	100	100	100	100	100
20	Pontianak	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	100	100	193.50	100	100	100	100
21	Manado	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	100	100	126.92	100	100	100	100
22	Palangkaraya	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	100	100	262.85	100	100	100	100
23	Merauke	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	100	100	247.5	100	100	100	100
24	Banjarmasin	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	100	100	134.17	100	100	100	100
25	Mataram	100	100	100	100	100	100	100	100	95.00	100	100	228	100	100	100	140
26	Palu	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	100	100	250	100	100	100	100
27	Jayapura	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	50.00	100	100	100	100	100	91.63
28	Pangkalpinang	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	100	100	100	100	100	100	100
29	Kendari	100	100	100	100	100	100	100	100	95.00	100	100	200	100	100	100	100
30	Ambon	100	100	100	100	100	0.00	93.00	100	95.00	100	100	200	100	100	100	180
31	Gorontalo	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	100	100	141.33	100	100	100	233.33
32	Manokwari	100	105.60	100	101.30	100	100	93.00	100	95.00	100	100	113	100	100	100	100
33	Ternate	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	100	100	205	100	100	100	100
34	Mamuju	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	100	100	227.14	100	176	100	100
35	Tanjung Selor	100	100	100	100	100	100	93.00	100	95.00	100	100	147	100	100	100	100

No	Nama UPT	IKSK 1.9		IKSK 1.10		IKSK 1.11		IKSK 2.1		IKSK 2.2		Total Target SBK (selama 1 tahun)	Total Capaian SBK (selama 1 tahun)	Luas Wilayah (km2)	Total Kabupaten	Status Kelas UPT
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian					
1	Medan	100	140	100	209	100	100	92.00	93.96	98	100	102	102	72.981,23	33 Kab/Kota	Balmon Kelas I
2	Pekanbaru	100	225	100	204	100	93.41	89.00	96.28	98	100			89.935,90	12 Kab/Kota	Balmon Kelas I
3	Palembang	100	100	100	100	100	100	90.00	106.49	100	95	52	52	86.771,68	17 Kab/Kota	Balmon Kelas I
4	Surabaya	100	157	100	340	100	100	90.00	93.02	100	0				38 Kab/Kota	Balmon Kelas I
5	Bandung	100	100	100	100	100	100	89.50	89.50	90	0	94	97	35.377	22 Kab/Kota	Balmon Kelas I
6	Semarang	100	129	100	197.65	100	100	92.85	92.28	98	100	82	82	27.999,60	30 Kab/Kota	Balmon Kelas I
7	Yogyakarta	100	503.01	100	104	100	100	89	90.97	98	100	126	154	8.101,65	10 Kab/Kota	Balmon Kelas I
8	Tangerang	100	100	100	100	100	100	88	92	100	100	62	62	9.160,70	8 kab/ kota	Balmon Kelas I
9	Jakarta	100	100	100	100	100	100	89	90.97	100	100	58	58	4.934,43	11 Kab/Kota	Balmon Kelas I
10	Samarinda	100	211.76	100	411.11	100	100	90.17	90.87	100	100	47	48	127.346,92	10 Kab/Kota	Balmon Kelas I
11	Makassar	100	298	100	241	100	100	89	91.90	80	100	85	85	46.717,48	24 Kab/Kota	Balmon Kelas I
12	Kupang	100	100	100	100	100	100	88	93.42	80	95	65	79	47.350,00	22 Kab/Kota	Balmon Kelas I
13	Denpasar	100	577	100	365	100	100	90.76	92.16	98	100					
15	Batam	100	286	100	333	100	100	90.66	91.99	100	100	55	55	8.201,72	7 Kab/Kota	Balmon Kelas II
14	Aceh	100	338	100	580	100	100	88	90.11	100	100					
16	Padang	100	180	100	180	100	100.20	89.02	91.01	100	100					
17	Jambi	100	146	100	120	100	100	91.00	92.15	100	100	58	58	50.160,05	11 Kab/Kota	Balmon Kelas II
18	Bengkulu	100	112.79	100	100	100	108.03	99	86.64	100	100	49	49	19.919,33	10 Kab/Kota	Balmon Kelas II
19	Lampung	100	363.30	100	363.30	100	100	100	100	100	100					
20	Pontianak	100	100	100	320	100	100	94	92.19	100	95.00	48	48	147.307	14 Kab/Kota	Balmon Kelas II
21	Manado	100	182.97	100	158	100	100	90	91.08	100	0.00	39	39	14.500,28	15 Kab / Kota	Balmon Kelas II
22	Palangkaraya	100	100	100	127.50	100	100	98.39	95.01	100	100	36	36	153.564,50	14 Kab/Kota	Balmon Kelas II
23	Merauke	100	102.63	100	140	100	100	90.57	92.34	80	100	27	27	144.207	5	Balmon Kelas II
24	Banjarmasin	100	145	100	142.50	100	100	89.89	90.43	100	100	36	36	38.744,23	13 kab/kota	Balmon Kelas II
25	Mataram	100	200	100	194	100	100	91	92.58	98	100	38	38	19.675,89	10 Kab/Kota	Balmon Kelas II
26	Palu	100	180	100	360	100	100	91.80	92.09	100	100				24 Kab/kota	Balmon Kelas II
27	Jayapura	100	96	100	20.00	100	100	75.46	0.00	100	0.00					
28	Pangkalpinang	100	243	100	193.33	100	100	87	94.04	100	0.00			16.690	7 Kab/kota	Loka Monitor
29	Kendari	100	115	100	182	100	100	89	93.62	100	95	52	52	174.600	17 Kab/kota	Loka Monitor
30	Ambon	100	100	100	546.67	100	100	95	93.80	98	0					
31	Gorontalo	100	256.75	100	420	100	208.41	90.10	91.99	100	100					
32	Manokwari	100	112	100	240	100	100	89	90.85	100	100	37	37	102.946,15	13 kab/kota	Loka Monitor
33	Ternate	100	106.38	100	100	100	100	89.38	93.13	100	100	43	43	145.801,10	10 kab/kota	Loka Monitor
34	Mamuju	100	375	100	640	100	100	88	90.71	100	100				6 Kab/kota	Loka Monitor
35	Tanjung Selor	100	105	100	230	100	100	95.28	94.58	98	95	39	39	75.467,70	5 Kab/Kota	Loka Monitor

F. Kinerja Lainnya

Selain kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja, Balmon Mataram juga telah melaksanakan berbagai kegiatan lainnya selama tahun 2024, yang mencerminkan dedikasi dan pencapaian signifikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, di antaranya:

1. Tahun 2024, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal SDPPI Nomor: 120 Tahun 2024 tentang Pelaksana monitoring dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta alat dan atau perangkat telekomunikasi serentak secara nasional tahun 2024, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram telah mengimplementasikan sanksi administrasi berupa denda terhadap pelanggaran penggunaan SFR dan APT, dengan menerbitkan 32 (tiga puluh dua) Surat Pemberitahuan Penetapan denda (SP2D) terhadap 32 (tiga puluh dua) pengguna yang melanggar, dan seluruhnya telah lunas terbayar secara online melalui aplikasi SIMPONI Kementerian keuangan.
2. Penghargaan pada Ifas Fest 2024 Pada tahun 2024, dimana Balmon Mataram berhasil meraih berbagai penghargaan bergengsi dalam acara tahunan Ifas Fest yang diselenggarakan oleh SDPPI, antara lain:
 - Penghargaan Kategori Idea dan Innovation
 - Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik
 - Penghargaan Pengelola BMN Terbaik
 - Penghargaan SDPPI Creator Photo CompetitionBukti pencapaian ini dapat dilihat melalui foto piagam penghargaan yang diperoleh:
 - Foto Piagam Penghargaan Idea dan Innovation
 - Foto Piagam Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terbaik
 - Foto Piagam Penghargaan Pengelola BMN Terbaik
3. Penghargaan atas Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) yang diraih oleh Balmon Mataram pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian luar biasa dengan berhasil meraih predikat sebagai satuan kerja pilot project pembangunan ZI dari Menteri Komunikasi dan Informatika. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Balmon Mataram dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan upaya maksimal dalam membangun integritas dan sistem pemerintahan yang bersih, tetapi juga menjadi contoh bagi instansi lain dalam menjalankan reformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
4. Pelaksanaan ISO 9001:2015 Balmon Mataram menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup audit "Kegiatan Pelayanan Penunjang Pemerintah untuk Pemantauan Frekuensi Radio". Semua klausul dalam persyaratan ISO 9001:2015 telah diterapkan, kecuali pada aspek rancangan dan pengembangan produk dan jasa, karena layanan yang diberikan merupakan kegiatan penunjang pemantauan frekuensi radio pemerintah.

Pelaksanaan audit internal dan tinjauan manajemen telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, dan bukti terkait kemampuan sistem manajemen untuk memenuhi persyaratan serta hasil yang diharapkan tercatat dengan baik
5. Pelaksanaan Event-Event Penting Tahun 2024
Sepanjang tahun 2024, Balmon Mataram berperan aktif dalam pengawasan dan pengamanan frekuensi radio untuk berbagai event penting yang diselenggarakan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini meliputi event nasional seperti Pemilu, Idul Fitri, Pilkada, dan Posko Nataru, serta event internasional seperti ajang balap

internasional yang membutuhkan pengawasan ketat terhadap spektrum frekuensi radio yang digunakan. Berikut adalah rincian pelaksanaan pengawasan pada kedua kategori event tersebut:

Event Nasional

Event-event nasional yang memerlukan pengawasan dan pengendalian ketat terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio mencakup frekuensi-frekuensi krusial seperti penerbangan, marabahaya, radar cuaca, maritim, keamanan, serta frekuensi seluler. Pengawasan ini penting untuk memastikan kelancaran dan keamanan selama event, serta menghindari gangguan pada sistem komunikasi yang dapat mempengaruhi operasional event tersebut. Beberapa event nasional yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain:

1. Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024 (12 – 16 Februari 2024)

Balmon Mataram melakukan pengawasan terhadap 159 frekuensi selama Pemilu Presiden 2024 di sekitar wilayah Pulau Lombok. Pengawasan difokuskan pada frekuensi-frekuensi krusial yang digunakan untuk keamanan, radar cuaca, marabahaya, serta komunikasi publik. Untuk memastikan kelancaran dan tanpa gangguan, tim pengawasan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti TNI/POLRI, Airnav, serta pihak penyelenggara, komunitas amatir radio, dan operator seluler. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh frekuensi yang digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berfungsi dengan optimal.

2. Posko Monitoring SFR Idul Fitri 1445 (4 – 17 April 2024)

Selama Posko Idul Fitri 1445, Balmon Mataram memantau sebanyak 3566 frekuensi radio yang digunakan dalam berbagai kegiatan komunikasi selama libur Lebaran. Pengawasan dilakukan untuk memastikan tidak ada gangguan pada frekuensi yang digunakan untuk layanan publik, keamanan, marabahaya, serta komunikasi darurat. Tim pengawasan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti TNI/POLRI, Airnav, BMKG, Ditnav dan penyelenggara komunikasi seluler guna memastikan kelancaran komunikasi selama periode ini.

3. Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 (25 – 29 November 2024)

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di wilayah Pulau Lombok, Balmon Mataram melakukan pengawasan terhadap 176 frekuensi yang digunakan untuk mendukung proses pemilihan. Pengawasan terfokus pada frekuensi yang digunakan untuk keamanan, komunikasi publik, serta layanan darurat. Koordinasi dengan TNI/POLRI, Airnav, dan pihak lainnya seperti organisasi amatir dan operator seluler sangat penting untuk memastikan tidak terjadi gangguan frekuensi yang dapat mengganggu jalannya Pilkada.



4. Posko Natal dan Tahun Baru (21 Desember 2024 – 2 Januari 2025)

Pada Posko Nataru, tim Balmon Mataram memantau 5533 frekuensi yang digunakan untuk berbagai keperluan komunikasi selama periode liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Pengawasan dilakukan terhadap frekuensi-frekuensi yang digunakan untuk layanan darurat, keamanan, serta sistem komunikasi publik. Kolaborasi dengan instansi terkait seperti TNI/POLRI, Airtel, dan penyelenggara komunikasi seluler sangat penting untuk memastikan tidak ada gangguan yang dapat menghambat kelancaran liburan Nataru.

Event Balap Internasional

Selain event nasional, Balmon Mataram juga berperan aktif dalam pengawasan event balap internasional yang diselenggarakan di wilayah NTB, seperti ajang balap motor dan mobil berskala internasional. Pada event-event ini, pengawasan dilakukan dengan koordinasi intens bersama tim penyelenggara event serta instansi terkait guna memastikan frekuensi radio yang digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak mengganggu kelancaran event, mengingat pentingnya komunikasi yang lancar dan aman untuk keberhasilan acara. Beberapa event balap internasional yang telah dilaksanakan di NTB antara lain:

1. Porsche Challenge Indonesia (PSCI) – Sirkuit Mandalika (13-14 Januari 2024)

Tim pengawasan SFR Balmon Mataram telah melakukan pengawasan terhadap 18 stasiun radio yang digunakan dalam penyelenggaraan Event Porsche Challenge Indonesia (PSCI) di Sirkuit Mandalika. Frekuensi-frekuensi yang digunakan mencakup 16 stasiun radio untuk komunikasi tim penyelenggara dan pembalap, layanan siaran, serta tim medis. Dua stasiun radio yang digunakan untuk broadcast live streaming juga telah memiliki Izin Kelas.

2. FIM Motocross World Championship (MXGP) Seri 11 pada tanggal 29 – 30 Juni 2024 dan Seri 12 pada tanggal 6 – 7 Juli 2024 di Sirkuit Selaparang Mataram.

Pada dua seri event MXGP 2024 yang diadakan di Sirkuit Selaparang, Balmon Mataram melakukan pengawasan terhadap 33 kanal frekuensi yang digunakan untuk berbagai keperluan komunikasi, termasuk komunikasi penyelenggara, tim pembalap, layanan siaran, serta tim medis. Frekuensi-frekuensi yang digunakan pada pita 400 MHz (untuk komunikasi penyelenggara), 500 MHz (untuk audio monitor), 2 GHz dan 6 GHz (untuk video broadcast), serta 3 GHz dan 6 GHz (untuk layanan SNG) dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya gangguan.



3. Shell Eco Marathon Asia Pasifik dan Timur Tengah 2024 – Sirkuit Mandalika (2–6 Juli 2024)

Tim Balmon Mataram melakukan pengawasan terhadap 8 kanal frekuensi pada band 400 MHz yang digunakan oleh penyelenggara, peserta, dan vendor event. Frekuensi yang digunakan untuk komunikasi selama event berlangsung telah dipastikan legal, dengan koordinasi yang intensif dengan penyelenggara serta pihak terkait untuk menjaga kelancaran komunikasi selama acara.

4. FIM Asia Road Racing Championship (ARRC) 2024 – Sirkuit Mandalika (26–28 Juli 2024)

Pada event ARRC 2024, tim pengawasan Balmon Mataram memantau 18 kanal frekuensi yang digunakan oleh penyelenggara untuk berbagai keperluan komunikasi, termasuk komunikasi tim penyelenggara, tim pembalap, serta untuk siaran langsung. Pengawasan dilakukan pada berbagai pita frekuensi yang digunakan, seperti pita 400 MHz untuk komunikasi penyelenggara, 600 MHz untuk wireless mic yang digunakan dalam siaran langsung, 2 GHz untuk video handheld camera dan on-board camera, serta 5,8 GHz untuk drone yang digunakan dalam pendukung layanan broadcasting.

5. MotoGP World Championship Seri ke-15 2024 – Sirkuit Mandalika (27–29 September 2024)

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan MotoGP Seri ke-15 di Sirkuit Mandalika, tim Balmon Mataram bekerja sama dengan Direktorat Pengendalian SDPPI, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung, dan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu untuk melakukan pengawasan terhadap 241 Izin Stasiun Radio (ISR). Pengawasan ini mencakup frekuensi yang digunakan untuk komunikasi penyelenggara, tim pembalap, serta siaran langsung. Untuk memastikan bahwa semua frekuensi dapat berfungsi secara optimal selama acara berlangsung, tim pengawasan melakukan simulasi (rehearsal) bersama pihak-pihak terkait, seperti Dorna, MGPA, Brimob, dan operator seluler.

Pada saat kunjungan Presiden RI, tim pengawasan juga berkoordinasi langsung dengan tim Paspampres terkait penggunaan jammer di area sirkuit guna menghindari gangguan yang dapat mempengaruhi kelancaran komunikasi. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa seluruh pita frekuensi yang digunakan, termasuk VHF, UHF, 2 GHz, 3 GHz, dan 5,8 GHz, berfungsi dengan baik tanpa adanya gangguan, memastikan kelancaran jalannya acara yang berlangsung.





Bukti partisipasi Balmon Mataram dalam event-event ini dapat dilihat melalui foto dokumentasi pada halaman Galeri Foto yg terdiri dari :

- Foto Kegiatan MXGP 2024
- Foto Kegiatan ARRC
- Foto Shell Eco-Marathon
- Foto Kegiatan MotoGP

Dengan pencapaian yang signifikan dalam pengawasan dan pengamanan frekuensi radio untuk berbagai event penting pada tahun 2024, Balmon Mataram terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan kelancaran komunikasi serta pengelolaan spektrum frekuensi radio yang aman dan sesuai ketentuan. Pengawasan yang dilakukan mencakup koordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti TNI/POLRI, Airnav, dan penyelenggara event, untuk memastikan tidak terjadinya gangguan yang dapat mempengaruhi jalannya acara baik di event nasional maupun internasional.

BAB IV PENUTUP

Dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram selama tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Program Kerja Tahun Anggaran 2024

Secara umum, program kerja tahun anggaran 2024 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan, mencerminkan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram. Pelaksanaan program kerja ini mencakup berbagai kegiatan pengawasan spektrum frekuensi radio, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta respons terhadap kebutuhan pengelolaan frekuensi untuk berbagai event nasional dan internasional.

2. Pencapaian Target Perjanjian Kinerja

Target yang tercantum dalam perjanjian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram untuk tahun 2024 umumnya telah tercapai dengan baik. Bahkan, beberapa indikator kinerja berhasil melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan komitmen dan dedikasi tinggi dalam pencapaian tujuan organisasi. Hal ini mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan frekuensi radio, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait.

3. Tindakan Terhadap Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi

Tindak lanjut terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio telah dilaksanakan dengan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pemberian sanksi berdasarkan Undang-Undang yang ada. Langkah ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam penggunaan spektrum frekuensi radio serta mendorong kesadaran para pemangku kepentingan agar lebih taat terhadap peraturan yang ditetapkan. Selain itu, tindakan ini juga mendukung terciptanya pengelolaan spektrum frekuensi yang lebih efisien, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram terus berupaya untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka menjaga integritas pengelolaan spektrum frekuensi radio di Indonesia.

4. Kebutuhan Penambahan SDM Fungsional Pengendali Frekuensi

Mengingat luasnya wilayah dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, terdapat kebutuhan mendesak untuk penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) fungsional pengendali frekuensi radio. Penambahan SDM ini sangat penting untuk memaksimalkan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dengan lebih efektif dan efisien, serta menjamin kelancaran pengelolaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Balmon Mataram.



GALERI FOTO



MXGP

25-30 Juni 2024



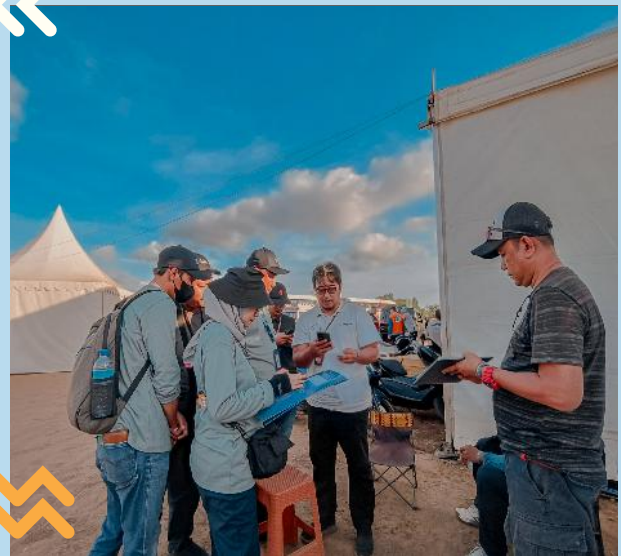
MXGP 2024

25-30 Juni 2024



MXGP 2024

25-30 Juni 2024



MXGP 2024





13-14 Januari 2024



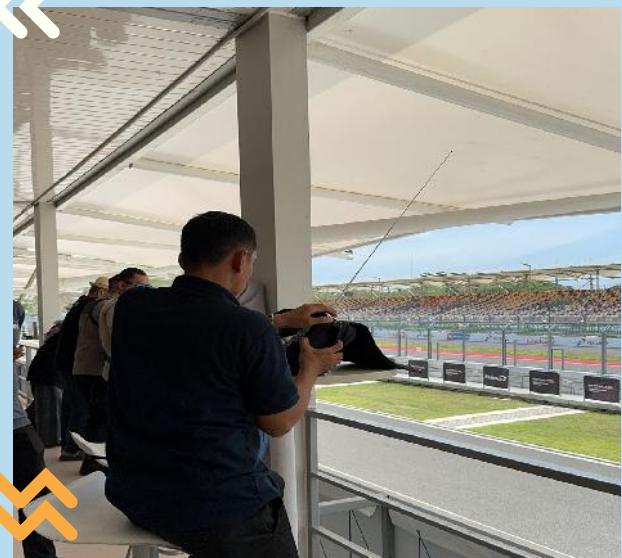
porsche sprint challenge

13-14 Januari 2024



porsche sprint challenge

13-14 Januari 2024



porsche sprint challenge



13 Jan-02 Feb 2024



OBSSON Spektrum Frekuensi Radio

13 Jan-02 Feb 2024



OBSSON Spektrum Frekuensi Radio

13 Jan-02 Feb 2024



OBSSON Spektrum Frekuensi Radio





Shell
Eco-marathon®

02 - 06 Jul 2024



Shell Eco Marathon

02 - 06 Jul 2024



Shell Eco Marathon

02 - 06 Jul 2024



Shell Eco Marathon



FEDERATION INTERNATIONALE DE MOTOCYCLISME OF ASIA

FIM ASIA ROAD RACING CHAMPIONSHIP

CALENDAR **2024**

24 - 28 Jul 2024



Asia Road Racing Championship

24 - 28 Jul 2024



Asia Road Racing Championship

24 - 28 Jul 2024



Asia Road Racing Championship





27 - 29 Sep 2024



MOTOGP

27 - 29 Sep 2024



MOTOGP

27 - 29 Sep 2024



MOTOGP





25 AGUSTUS 2024



UNAR NON REGULER

25 AGUSTUS 2024



UNAR NON REGULER

25 AGUSTUS 2024



UNAR NON REGULER



02 - 05 Sep 2024



PENERTIBAN NASIONAL

02 - 05 Sep 2024



PENERTIBAN NASIONAL

02 - 05 Sep 2024



PENERTIBAN NASIONAL



Posko Monitoring

04 - 08 APRIL 2024



Posko Monitoring Mudik

04 - 08 APRIL 2024



Posko Monitoring Mudik

04 - 08 APRIL 2024



Posko Monitoring Mudik



SOSIALISASI

07 MEI 2024



SOSIALISASI TERTIB SFR

07 MEI 2024



SOSIALISASI TERTIB SFR

07 MEI 2024



SOSIALISASI TERTIB SFR



20 FEBRUARI 2024



ZONA INTEGRITAS

20 FEBRUARI 2024



ZONA INTEGRITAS

20 FEBRUARI 2024



ZONA INTEGRITAS



Address

Jl. Singosari No.4 Mataram Kekalik Jaya
Kelurahan Sekarbela Kecamatan Mataram Kota Mataram
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Contact Us

Whatsapp: 0878 8215 9159 Tlp. 0370-646411 Fax. 0370-648740
Email: upt_mataram@postel.go.id
Website: balmonmataram.postel.go.id

Social Media

 [balmon.mataram](https://www.facebook.com/balmon.mataram)  [balmon.mataram](https://www.instagram.com/balmon.mataram)  [balmon.mataram](https://twitter.com/balmon.mataram)